

**PERANAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL BERBASIS
KLASTER INDUSTRI
(Studi tentang pengembangan Sentra industri mebel dan kayu pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan di Kota Pasuruan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**ROSIFAN ANWAR H.
NIM. 0510310119**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIC
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH
MALANG
2010**

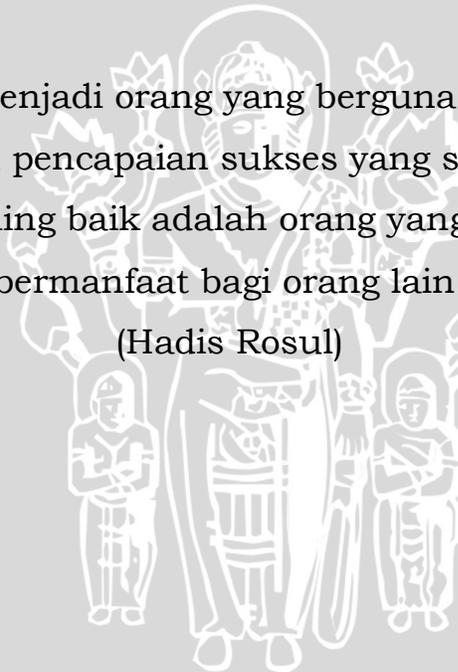
Motto

Menjadilah seseorang yang Expert dalam segala hal
karena itu bisa melahirkan sosok yang besar.

(Jamil Azaini)

Berusahalah menjadi orang yang berguna bagi orang lain
karena hal itu pencapaian sukses yang sesungguhnya.
orang yang paling baik adalah orang yang berguna atau
bermanfaat bagi orang lain.

(Hadis Rosul)



RINGKASAN

Rosifan Anwar 2009 *“Peranan pemerintah daerah dalam pengembangan industri kecil berbasis klaster industri”*. (Studi tentang pengembangan klaster industri mebel dan kayu pada Dinas perindustrian dan perdagangan Kota Pasuruan) Ketua pembimbing : Drs. Mochammad Makmur MS. Anggota : Drs, Minto Hadi Msi.

Proses pembangunan di masa lalu yang kurang menguntungkan, dan berakibat terjadinya krisis ekonomi, menimbulkan kesadaran semua pihak, khususnya pemerintah, untuk berpihak pada pemberdayaan UKM. Paradigma pembangunan kemudian lebih mengarah pada pemberdayaan ekonomi dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas yang berdasarkan pada semangat kerakyatan, dan kemandirian dalam upaya penciptaan pemerataan dengan tanpa meninggalkan aspek pertumbuhannya. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan mengenal dan menginterpretasikan peran dan upaya-upaya dari pemerintah sebagai media terciptanya perekonomian yang adil. ditambah otonomi daerah sekarang semua hal itu dibebankan kepada daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah untuk dapat memanfaatkan potensi-potensi dan kesempatan-kesempatan yang ada. Dari uraian diatas peneliti memfokuskan pada Peranan pemerintah daerah dalam pengaturan ekonomi khususnya sektor perindustrian melalui pengembangan dan pembinaan aspek produksi dengan melaksanakan program peningkatan kualitas kelambagaan optimalisasi koperasi dan penataan struktur industri. Aspek pemasaran dengan melaksanakan peningkatan efektifitas perdagangan dalam negeri, dan memperluas jaringan pemasaran produk. Aspek Sumber Daya Manusia dengan melaksanakan pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif dan aspek teknologi dengan melaksanakan program peningkatan kemampuan teknologi industri. Jenis penelitian adalah kualitatif.

Klaster industri kecil adalah sekumpulan usaha kecil yang terdiri dari usaha inti dan usaha penunjang yang muncul dan saling bekerjasama pada satu lokasi geografis tertentu untuk mencapai kondisi yang paling ekonomis baik bagi masing-masing usaha tersebut maupun secara keseluruhan. Usaha inti adalah usaha kecil yang memproduksi produk utama suatu klaster. Sedangkan usaha penunjang adalah usaha kecil yang mendukung kelancaran proses produksi usaha inti. Pengembangan industri kecil dengan pendekatan klaster akan memberikan hasil yang lebih efektif dan efisien. itu karena usaha kecil yang hidup di dalam klaster memiliki performance yang lebih baik daripada usaha kecil individual dan program pengembangan terhadap satu klaster dapat menjangkau beberapa usaha kecil yang hidup di dalamnya. Program pengembangan industri kecil dengan pendekatan klaster dapat dilakukan dengan menumbuhkan klaster baru dan mengembangkan klaster yang telah ada sesuai dengan pola pertumbuhan alamiahnya. Sehingga dengan adanya konsep klaster industri ini diharapkan merupakan suatu system untuk mengatasi faktor-faktor penghambat dan dampak yang ditimbulkan seperti sulitnya jaringan pemasaran, sulitnya modal, ketergantungan industri dengan instansi terkait dan masalah mahalnya bahan baku.

SUMMARY

Rosifan anwar 2009 *"The role of local government in the development of small industries based on industrial clusters "*. (Studies to development claster industry on the furniture industry and office for industry and commerce administrative departments of Public Pasuruan).

The process of development in the past that are less favorable, and the resulting economic crisis, led to the awareness of all parties, particularly governments, to take sides in the empowerment of firm. Paradigm of development and more directed to the economic empowerment by involving the community at large based on the spirit of democracy, and independence in the creation of equitable distribution of efforts by without leaving aspects of growth. Describing the research goals is to recognize and interpret the role and efforts of the government as a media creation of a fair economy. regional autonomy plus now all the things that are charged to the region. In this case the local government to be able to take advantage of the potential and opportunities that exist. From the above research focuses on local government's role in setting industry-sector economy, especially through the development and production with the coaching aspect of implementing quality improvement programs to optimize instritution cooperatives and the industrial structure arrangement. Marketing aspects of enhancing the effectiveness of implementing domestic trade, and expand marketing network products. Aspects of Human Resources to implement entrepreneurship development and competitive advantage and technological aspects with increased capacity to implement industrial technology is a descriptive type of research is qualitative research techniques.

Small industry cluster is a collection of small business consisting of the core business and supporting businesses that arise and working together on a specific geographic locations to achieve the most economical conditions for both individual and enterprise as a whole. Core business is small business that produces the main product of a cluster. While efforts are supporting small businesses that support the smooth production process core business. The development of small industry cluster approach will yield results more effectively and efficiently. it's because small businesses that live in the cluster has a better performance than the individual and small business development programs to a cluster can reach several small businesses that live in it. Small industry development program with the cluster approach can be done by growing new clusters and develop an existing cluster in accordance with its natural growth pattern. So with the concept of industry cluster is expected to be a system to overcome the inhibiting factors and the impact such as the difficulty of marketing networks, the difficulty of capital, dependence on industry with related institutions and issues of raw material is expensive.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta solawat tidak hentinya saya panjatkan kepada rosulullah SAW sebenar-benarnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Peranan Pemerintah Daerah dalam pengembangan industri kecil berbasis klaster industri (studi tentang pengembangan sentra industri mebel dan kayu pada dinas perindustrian dan perdagangan Kota Pasuruan)

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana ilmu administrasi public pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi khususnya dalam penyelesaian skripsi ini . Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh Karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang terhormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Sumartono MS selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Bapak Dr. Khoirul Muluk, Ssos, Msi selaku ketua jurusan fakultas ilmu administrasi public
3. Bapak Drs. Mochammad Makmur MS selaku dosen pembimbing 1 yang telah meluangkan tenaga pikiran untuk memberikan bimbingan dan nasehat yang berharga bagi penulis.
4. Bapak Drs.Minto Hadi MSi selaku dosen pembimbing 2 yang telah meluangkan tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan nasehat yang berharga bagi penulis
5. Bapak dosen penguji yang telah berkenaan hadir memberikan saran nasehat masukan yang bermanfaat bagi penulis untuk menyempurnakan dan menjadikan skripsi ini lebih baik.

6. Bapak Dr, T Kuncoro, Msi selaku kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam memperoleh sumber data.
7. Bapak Drs. Yanuar Arfiansyah selaku coordinator bagian pendataan yang telah membantu dan menyediakan waktu berbincang dengan penulis dalam kaitannya dengan penyelesaian tugas akhir.
8. Ucapan terima kasih saya aturkan kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun secara spiritual hingga penulis dapat menyelesaikan studi sarjana dari awal hingga akhir.
9. Selanjutnya ucapan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman kelas F kelas E yang selama ini kita kompak
10. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu memberi motivasi serta dorongan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini hingga usai.

Demi kesempurnaan skripsi ini saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi fihak yang membutuhkan. serta kritik dan saran yang diberikan kepada penulis untuk dapat mengarah kepada perbaikan.

Malang, 10 November 2009

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| MOTTO..... | i |
| TANDA PENGESAHAN..... | ii |
| PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI..... | iii |
| RINGKASAN..... | iv |
| SUMMARY..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR TABEL..... | viii |
| DAFTAR GAMBAR..... | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Perumusan Masalah..... | 9 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 9 |
| 1.4 Kontribusi Penelitian..... | 10 |
| 1.5 Sistematika pembahasan..... | 10 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| 2.1. Pengertian Peranan..... | 12 |
| 2.2. Pengertian Peranan Pemerintah..... | 13 |
| 2.3. Pengertian Pemerinah Daerah..... | 16 |
| 2.4..Pengertian Industri, Klaster industri dan Pengembangan Klaster industri..... | 17 |
| 2.4. 1). Pengertian Industri..... | 17 |



| | |
|--|----|
| 2.4. 2). Pengertian Kluster Industri Kecil..... | 17 |
| 2.4. 3). Pengembang Kluster Industri Kecil..... | 18 |
| 2.5. Pengelompokan industri dan UKM..... | 26 |
| 2.6 Kriteria dan Peranan Industri Kecil dan UKM..... | 30 |
| 2.7. Keunggulan dan kelemahan industri Kecil..... | 34 |
| 2.7.1). Kelebihan Industri Kecil dan UKM..... | 34 |
| 2.7.2). Kelemahan Industri kecil dan UKM..... | 36 |
| 2. 8. Pembinaan dan startegi pengembangan sektor industri..... | 38 |
| 2.1.1). Pembinaan dan pengembangan industri kecil dan UKM..... | 38 |
| 2.1 2). Fungsi dan tujuan pengembangan industri kecil..... | 40 |
| 2.1 3). Pengembangan dalam UU No.9 Th 05..... | 41 |
| 2.1.4). Faktor yang berpengaruh dalam Pengembang industri ... | 45 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| 3. 1. Jenis penelitian | 47 |
| 3. 2. Fokus Penelitian..... | 48 |
| 3. 3. Lokasi dan Situs Penelitian..... | 49 |
| 3. 4. Jenis dan Sumber data..... | 49 |
| 3. 5. Teknik Pengumpulan Data..... | 50 |
| 3. 6. Instrument Penelitian..... | 52 |
| 3.7. Analisis Data..... | 52 |

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| 4. I. Penyajian Data..... | 54 |
| 4.1. Gambaran Umum Kondisi wilayah Kota Pasuruan..... | 54 |
| 4.1. 1. Letak Geografis Kota Pasuruan..... | 54 |



| | |
|--|-----|
| 4.1. 2. Keadaan Penduduk Kota Pasuruan..... | 56 |
| 4.2. Gambaran umum Disperindag Kota Pasuruan..... | 57 |
| 4.2 1. Posisi Kedudukan Tugas dan Fungsi Disperindag..... | 60 |
| 4.2 2. Struktur Organisasi Disperindag Dikota Pasuruan..... | 60 |
| 4.2 3. Kondisi Pegawai dan Kelembagaan..... | 66 |
| 4.3. Pengembangan dan Pembinaan industri mebel kota Pasuruan | |
| 4.3.1. Perkembangan Unit Usaha..... | 67 |
| 4.3.2. Perkembangan sentra industri mebel..... | 71 |
| 4.3.3. Profil perkembangan industri mebel dikota pasuruan.... | 73 |
| 4.4. Program Kerja Disperindag Kota Pasuruan Tahun 2009 | |
| 4.4.1 Visi dan Misi Kota Pasuruan..... | 81 |
| 4.4.2 Renstra Disperindag Kota Pasuruan Tahun 2009..... | 81 |
| 4.5. Upaya Disperindag kota Pasuruan dalam Membina industri kecil mebel | |
| 4.5.1 Pengembangan Aspek Produksi | 88 |
| 4.5.2 Pengembangan Aspek Pemasaran..... | 92 |
| 4.5.3 Pengembangan Aspek Sumberdaya manusia | 97 |
| 4.5.4 Pengembangan Aspek Teknologi..... | 101 |
| 4.6 . Faktor Pendukung dan Penghambat dalam mengembangkan industri kecil mebel dan kayu..... | 105 |
| 4.6.1 Faktor Pendukung dalam mengembangkan industri mebel | |
| 4.6.2 Faktor Penghambat dalam mengembangkan industri mebel | |
| 4.B. PEMBAHASAN | |
| 4.1 Visi dan Misi Kota Pasuruan..... | 106 |
| 4.2 Renstra Disperindag Kota Pasuruan Tahun 2009..... | 106 |

4.3 Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengembangan dan pembinaan industri kecil mebel dan kayu di Kota Pasuruan.... 110

4.3.1 Pengembangan dan pembinaan Aspek Produksi..... 114

4.3.2 Pengembangan dan pembinaan Aspek Pemasaran..... 120

4.3.3.Pengembangan dan pembinaan Aspek SDM..... 124

4.3.4 Pengembangan dan pembinaan Aspek Teknologi..... 130

4.4.Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pembinaan dan pengembangan industri mebel Kota Pasuruan..... 134

4.4.1. Faktor pendukung dalam pengembangan industri mebel.... 134

4.4.2. Faktor penghambat dalam pengembangan industri mebel... 135

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan..... 138

5.2. Saran..... 140

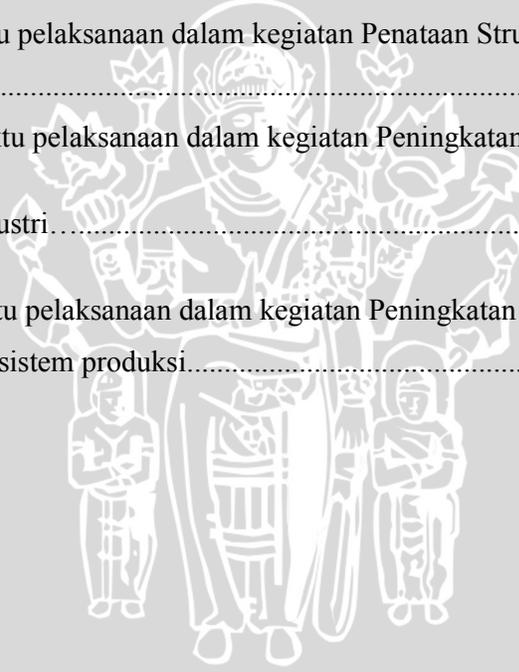
DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....



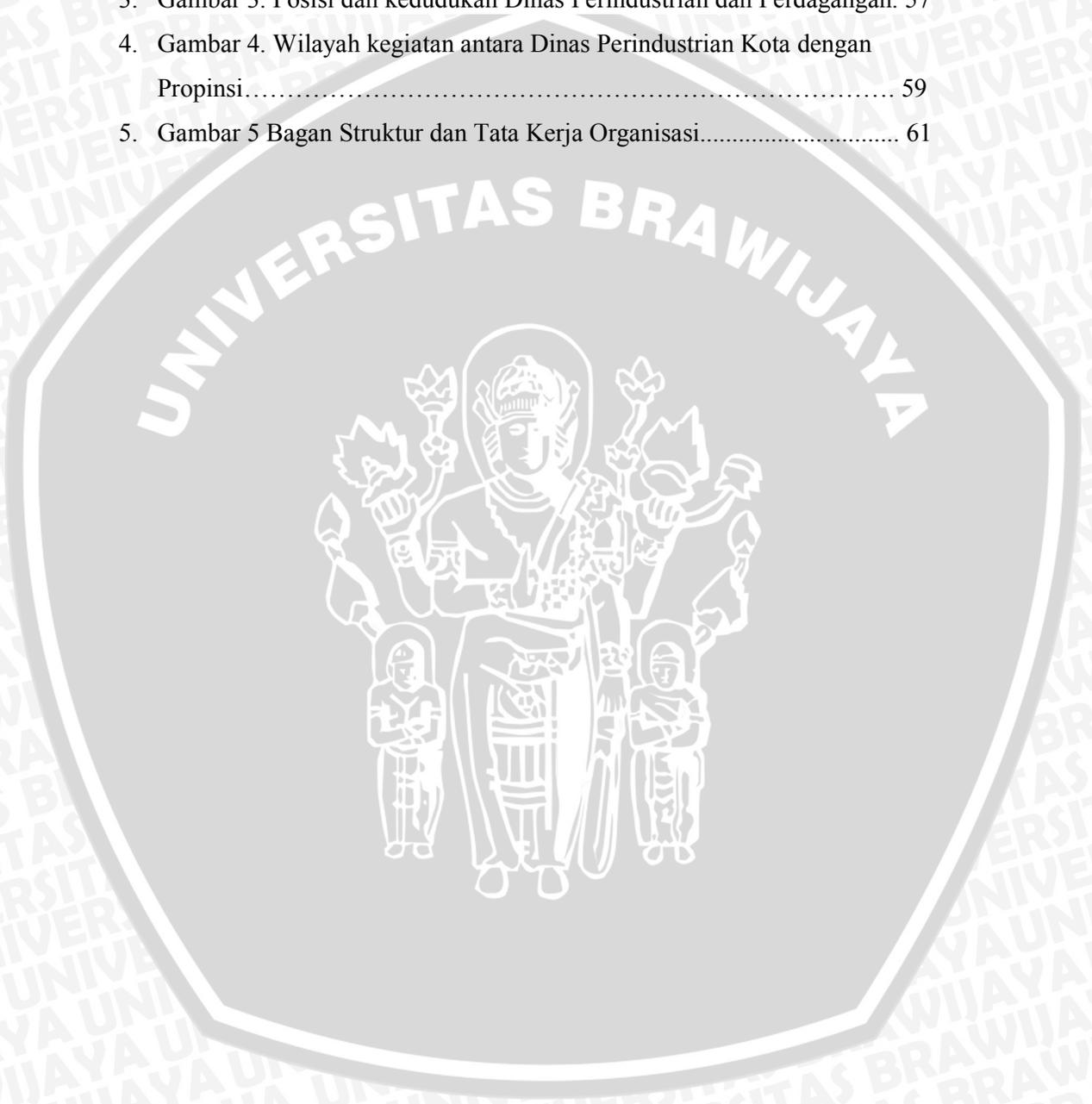
DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----|
| 1. Tabel 1. Pengelompokan kegiatan usaha ditinjau dari jumlah pekerja..... | 26 |
| 2. Tabel 2. Jumlah, Perkembangan, kepadatan penduduk Kota Pasuruan tahun 2009..... | 56 |
| 3. Tabel 3. Komposisi pegawai pada Dinas Perindustrian..... | 66 |
| 4. Tabel 4. Jenis Kapasitas nilai produksi pertahun..... | 73 |
| 5. Tabel 5. Penjualan Pertahun..... | 75 |
| 6. Tabel 6. Jenis dan kebutuhan..... | 75 |
| 7. Tabel 7. Jenis mesin dan Peralatan..... | 76 |
| 8. Tabel 8. Waktu pelaksanaan dalam kegiatan peningkatan kualitas kelembagaan dan koperasi..... | 90 |
| 9. Tabel 9 .Waktu pelaksanaan dalam kegiatan Penataan Struktur Industri..... | 92 |
| 10. Tabel 10. Waktu pelaksanaan dalam kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri..... | 103 |
| 11. Tabel 11 Waktu pelaksanaan dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas IPTEK dalam sistem produksi..... | 105 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| 1. Gambar 1. Analisis Model Interaktif..... | 53 |
| 2. Gambar 2. Peta Kota Pasuruan..... | 54 |
| 3. Gambar 3. Posisi dan kedudukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. | 57 |
| 4. Gambar 4. Wilayah kegiatan antara Dinas Perindustrian Kota dengan Propinsi..... | 59 |
| 5. Gambar 5 Bagan Struktur dan Tata Kerja Organisasi..... | 61 |



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keterangan telah melakukan riset Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan
2. Agenda Kerja Program bidang koperasi UMKM dan perindustrian dan perdagangan.
3. Pedoman Wawancara.
4. Gambar Contoh unit usaha perdagangan “Kramat Jati”
5. Gambar macam-macam Jenis hasil kerajinan industri mebel dan kayu
6. Gambar . Profil perkembangan sentra industri mebel dan kayu
7. Gambar . Para pengrajin kayu
8. Gambar . Para pedagang hasil kerajinan
9. Gambar . Industri Pengepul Kayu.
10. Curriculum Vitae



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses pembangunan di masa lalu yang kurang menguntungkan, dan berakibat terjadinya krisis ekonomi, telah menimbulkan kesadaran semua pihak, khususnya pemerintah, untuk berpihak pada pengembangan usaha masyarakat. Paradigma pembangunan kemudian lebih menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas yang berdasarkan pada semangat kerakyatan, kemartabatan dan kemandirian dalam upaya penciptaan pemerataan dengan tanpa meninggalkan aspek pertumbuhannya. Ditengah terjadinya krisis ekonomi usaha besar dan konglomerat banyak yang gulung tikar karena tanggungan utang yang makin melambung akibat depresiasi nilai tukar rupiah yang merosot tajam, ekonomi rakyat justru dapat tetap bertahan. Sektor ini bahkan telah dapat menopang akses yang ditimbulkan krisis, dengan menampung para pengangguran disektor informal. Industri kecil sebagai suatu komunitas masyarakat, barangkali harus diperhitungkan sebagai kekuatan strategis yang mendukung pengembangan kekuatan masyarakat, baik dalam kekuatan material maupun kekuatan moral, sebagai penguatan ekonomi masyarakat. Adanya keterkaitan industri di Kota Pasuruan adalah pada jenis kelompok dan kelompok industri adalah pemberi kontribusi besar terhadap keuangan Pemerintah Daerah (penyumbang PAD) sekaligus didalamnya bernaung masyarakat kecil (pekerja) rata-rata pengrajin berlindung 10 – 100 tenaga kerja, sebagai kekuatan moral adalah memberikan kekuatan bergaining position terhadap berbagai pihak yang memiliki kompetensi. Peran serta masyarakat merupakan kata kunci perubahan paradigma pemberdayaan UKM, sedangkan pemerintah tidak lebih hanyalah menjalankan fungsi sebagai regulator, fasilitator dan stimulator. Ditambah dengan munculnya konsep otonomi daerah bagi daerah dinilai sangat memberikan daerah dapat berperan aktif dalam pembangunan. Pengertian daerah otonomi dimaksud agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri yang tidak bergantung

kepada pemerintah pusat, oleh karena itu daerah otonom harus mempunyai kemampuan dan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu sendiri. Kewenangan yang luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri melalui sumber-sumber pendapatan yang dimiliki. Hal ini meliputi semua kekayaan yang dikuasai oleh daerah dengan batas-batas kewenangan yang ada dan selanjutnya digunakan untuk membiayai semua kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri. Jadi agar daerah dapat menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya perlu ada sumber pendapatan daerah, sesuai dengan apa yang dikatakan Soedjito (2003: 36) yaitu : Semakin besar keuangan daerah, semakin besar pulalah kemampuan daerah untuk menyelenggarakan usaha-usahanya dalam bidang keamanan, ketertiban umum, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan pada umumnya bagi wilayah dan penduduknya, atau dengan kata lain semakin besarlah kemampuan daerah untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan pemberian urusan kepada daerah termasuk sumber keuangannya, maka dalam bunyi pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dicantumkan Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah (PAD), karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat.

Dengan penggalan dan peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam

penyelenggaraan urusan daerah, untuk itu disinilah peran aktif daerah sebagai pelaku utama dalam peningkatan sumber pendapatan daerah. Dilihat dari kajian kasus dan masalah yang akan diteliti pemerintah Daerah khususnya pemerintah kota pasuruan dilihat memiliki potensi yang menjanjikan dalam urusan pengelolaan industri. Industri kecil ini merupakan salah satu strategi untuk dapat mendapatkan sumber keuangan baru yang menjanjikan bagi Pemerintah daerah khususnya.

Departemen Perindustrian memberikan batasan bahwa penerapan strategi dasar yang ditempuh oleh pemerintah dititik beratkan pada :

Industri yang mendaya gunakan keunggulan komparatif dan pengelolaan SDA yang dimiliki (Resources Based Industry) Industri yang menggunakan tenaga kerja banyak (labor Intensif Industry) industri bercirikan padat teknologi

Dengan landasan ini pengembangan industri kecil sangatlah tepat mengingat jangkauan sangat luas dan disesuaikan dengan potensi SDA yang mendukungnya karena dengan perkembangan industri akan membawa dampak pemerataan kesempatan kerja pemerataan berusaha dan pemerintah pendapatan dibidang-bidang lain sehingga terbentuk industri yang kuat mendukung pembangunan nasional. beberapa masalah Serta secara umum yang dihadapi pemerintah mencakup tiga faktor utama yaitu:

Pertama, dari sektor permodalan dalam hal ini pihak investor mereka dalam mencairkan modal bagi industri kecil perlu adanya jaminan sedangkan sebagian besar mereka berada dikalangan bawah untuk itu permodalan ini perlu adanya perhatian khusus oleh pemerintah sehingga industri dapat berperan banyak dalam perkembangannya.

Kedua, Pengelolaan yaitu baik penguasaan iptek dan sumber-sumber baru bidang sehingga bidang industri dapat bergerak maju dalam hal ini pemerintah sebagai pengerak bidang industri secara aktif perlu adanya sosialisasi secara berkelanjutan kepada para pelaku industri kecil.

Ketiga, dari sektor pemasaran dan jaringan usaha industri kecil dinegara-negara berkembang umumnya terbentur dengan adanya sistem pemasaran yang sama. Kebanyakan pasar dikuasai produk luar sehingga produk dan

lokal kurang diminati sebagian masyarakat. Hal ini tentu sangat memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Pemerintah haruslah bertindak dan membuat peraturan yang membatasi produk luar yang masuk sehingga produk lokal dapat bersaing dan berkembang dipasar dalam negeri.

Selanjutnya perwujudan keberpihakan pemerintah pada industri kecil secara formal tersebut menyebutkan tentang perlunya keberpihakan pemerintah dalam pengembangan industri kecil dan berbagai bentuk kemitraan permodalan pemasaran teknologi dan sebagainya. adanya undang-undang itu sebagai bukti dan landasan hukum bagi pengembangan usaha kecil itu sendiri. Adapun kebijakan tersebut diimplementasi dengan meluncurkan program-program yang bertujuan pembinaan dan memperkuat industri.

Pengembangan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Melihat potensi yang begitu besar terhadap sektor UMKM, pemerintah melalui berbagai kebijakan telah berusaha memberi peluang lebih bagi sektor ini untuk terus berkembang dan lebih menambah peran dari masing-masing komponen klaster sehingga tercipta koordinasi untuk dapat meningkatkan hasil produk UKM.

Dalam kajian ini unggulan daerah sebenarnya industri Mebel dan Kayu ini merupakan klaster industri salah satu jenis industri kelompok Saleh (1987:51-53) di daerah yang berpotensi atau terbukti memiliki keunggulan daya saing. Konsep Klaster Industri adalah kelompok industri spesifik yang dihubungkan oleh jaringan mata rantai proses penciptaan/peningkatan nilai tambah, baik melalui hubungan bisnis maupun non bisnis. Para pelaku (stakeholders) dalam suatu klaster industri biasanya dikelompokkan kepada industri inti, pemasok, pendukung, terkait, dan pembeli serta institusi

pendukung (non industri) yang berhubungan secara intensif dan membentuk partnership. Klaster industri memiliki pengertian yang lebih luas dari sentra industri. Sentra industri lebih merupakan bagian integral dan sebagai titik masuk (entry point) dari upaya pengembangan klaster industri. Keterkaitan Konsep Klaster Industri dengan Peningkatan Daya Saing Industri Kesejahteraan/kemakmuran sangat ditentukan oleh daya saing, yang pada dasarnya diciptakan bukan diwariskan. Bagi peningkatan kesejahteraan/kemakmuran yang terpenting bukanlah di industri apa suatu negara/daerah/wilayah bersaing, melainkan bagaimana negara/wilayah/daerah tersebut bersaing. Produktivitas sebagai ukuran daya saing suatu negara/daerah bergantung pada keseluruhan industrinya (klaster-klaster industri) dan untuk peningkatan produktivitas jangka panjang inovasi sangat diperlukan. Beberapa esensi penting dari klaster industri kurang optimal dan dinilai sangat kurang dalam sumbangsinya terhadap keuangan daerah. Serta program kebijakan yang dinilai tidak tepat sasaran tidak efektif. Sehingga para pelaku industri kecil kesulitan berkembang dan hanya bisa jalan ditempat. Pemerintah kurang memperhatikan kondisi sentra ini meski banyak peraturan dan undang-undang yang mengatur hal tersebut seperti Untuk mewujudkan berkaitan dengan industri pemerintah telah mengeluarkan kebijakan UU No. 5 Th 1984 pemerintah melakukan pengaturan pembinaan untuk mengembangkan bidang usaha industri secara seimbang terpadu terarah untuk memperkokoh struktur industri nasional. dalam kenyataannya peraturan yang mengatur sentra kluster industri dipasuruan itu belum bisa dijadikan patokan sebagai keberhasilan pemerintah terbukti meski dibuatnya program-program baru bagi kebijakan usaha kenyataannya tidak berperan banyak bagi sentra usaha kecil.

Dalam judul ini peneliti mencoba meneliti berkaitan dengan diatas mengambil contoh Kota Pasuruan yaitu terfokus pada Kluster-kluster atau sentra-sentra industri kecil dan industri menengah UKM yaitu lebih spesifiknya industri mebel dan kayu. Apabila dikembangkan oleh pemerintah daerah pasuruan dinilai dapat menjadi sumber penerimaan keuangan baru pemerintah daerah pasuruan. Dan apabila dioptimalkan dapat

menjadi sumber Pendapatan Asli daerah (PAD) yang besar diperiode jangka panjang. Dalam kajian ekonomi pemerintahan dikatakan UKM merupakan pilar perekonomian di Indonesia hal ini sudah diakui secara luas dan dengan dikeluarkannya Undang-undang No.9 tahun 1995 tentang pemberdayaan usaha kecil dalam UU tersebut, negara mengakui pentingnya kontribusi UKM bagi pembangunan nasional sebagaimana dikatakan dalam konsideren Undang-undang tersebut Bahwa dalam pembangunan nasional usaha kecil sebagai bagian integral dunia usaha dan merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang. Meski terbilang baru namun industri ini dinilai sangat menjanjikan untuk perkembangan pendapatan kota pasuruan mendatang hal ini juga didukung oleh banyak faktor yang mendukung menjajarkannya sentra industri mebel dan kayu ini yaitu :

Pertama, segi lokasi kawasan industri ini sudah mulai banyak para pembuat dan pengrajin kayu jadi sangat memungkinkan untuk terus dapat berkembang dan membentuk suatu daerah sentra industri yang kuat. Juga dari segi kulture masyarakat disekitar kawasan itu juga memiliki kesamaan dalam hal berhubungan dan berinteraksi sehari-hari.

Kedua, lokasi yang sarat dengan sangat memudahkan para pengunjung karena daerahnya yang berada disekitar jalan raya yang mengarah kekota besar. Namun, meski keunggulan-keunggulan diatas peran pemerintah daerah pasuruan juga sangat vital sebagai pembuat kebijakan.

Selain itu berdirinya sentra industri kecil ini juga dilatar belakangi oleh adanya UU No. 32 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa salah satu urusan yang wajib ditangani oleh pemerintah kota/kabupaten adalah mengenai pembangunan fasilitas pengembangan koperasi dan UKM. Dari penjelasan diatas bahwa pemerintah berusaha menciptakan iklim yang kondusif dan berbagai bentuk pembinaan yang pada akhirnya peran pemerintah mempunyai peran vital untuk dapat meningkatkan industri secara optimal. Di kawasan Kota Pasuruan merupakan daerah sentra industri mebel terbesar di Jawa Timur. Sedikitnya, sekitar 1.000 usaha mikro kecil menengah dan

sekitar 30.000 tukang kayu menggantungkan mata pencarian pada usaha ini. Peta industri mebel di Pasuruan layaknya sebuah piramida. Paling bawah adalah tukang kayu yang jumlahnya terbanyak. Di atasnya adalah perajin mebel yang rata-rata mempekerjakan 10-30 tukang kayu. Di atasnya lagi adalah pedagang yang umumnya mengambil mebel mentah dari para perajin. Di posisi teratas piramida adalah pengusaha yang punya tukang kayu sendiri dan memasarkan produk dalam skala lebih besar.

Produk industri mebel di Pasuruan, antara lain, adalah kursi, meja, tempat tidur, lemari, dan bufet. Selama ini, produk tersebut sebagian besar dipasarkan ke daerah-daerah di Jawa Timur. Sebagian lagi dipasarkan ke sejumlah daerah di Jawa Barat dan Jawa Tengah serta ke luar Pulau Jawa, seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat.

Dari faktor Sumberdaya Manusia dari sumber para pekerja kebanyakan para pengrajin maupun pekerja dilingkungan mebel pasuruan ini adalah para pendatang dengan berbagai latar belakang suku adat yang berbeda dapat bertemu dalam persaingan industri mebel ini ditambah juga penduduk asli setempat yang kalah jumlah diteliti juga mereka hanya sedikit yang memiliki pendidikan sederajat yang mengarah pada permebelan dan pertukangan. Sehingga produk-produk yang dihasilkan berkisar barang mentah dan barang setengah jadi. Seandainya kawasan ini dapat dikelola dengan baik bahan mentah berupa barang setengah jadi bisa menjadi barang unggulan dengan adanya sentuhan teknologi yakni ditambah dengan industri pengecatan, industri pemotongan kayu moderen serta promosi yang baik tentu akan menjadikan kawasan ini semakin bernilai jual tinggi.

Dari segi teknologi industri mebel ini tentu perlu adanya perhatian yang lebih dari pemerintah khususnya berkaitan dengan aspek teknologi semakin berkembangnya alat-alat teknologi dan informasi tentu sedikit banyak berpengaruh pada proses produksi yang terjadi dalam industri mebel ini melalui teknologi diharapkan dapat menjadikan semakin berkembangnya kawasan industri ini. Seperti contoh dari teknologi informasi maka menjadikan kawasan ini mulai dikenal oleh masyarakat yang dulunya tidak mengetahui sekarang menjadi mengetahui adanya industri mebel di

Pasuruan. Contoh kedua yaitu dari segi efisiensi dengan berkembangnya teknologi permesinan menjadikan diciptakannya berbagai mesin-mesin seperti untuk memotong kayu, penghalus kayu juga pengecatan produk. Hal ini tentu membantu juga memudahkan para pembuat produk mebel serta dapat mempercepat waktu pengerjaan membuat barang mebel. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya yaitu adanya persaingan antara pedagang besar atau pedagang yang memiliki modal besar dengan pengusaha kecil ini jelas jauh perbandingannya pedagang besar akan semakin untung dengan modal yang besar sebaliknya pedagang kecil akan semakin bangkrut karena persaingan dengan pedagang besar.

Melihat tingkat kesulitan para perajin mebel, menuntut pemkot melakukan proteksi untuk produksi mebel. Dari kasus diatas dapat dinilai posisi para perajin sekarang ini.

Pemkot harus bergerak cepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan diatas. karena potensi mebel di Kota Pasuruan sangat bisa diandalkan. Langkah proteksi yang bisa diambil adalah dengan mengupayakan produk hukum berupa Peraturan Daerah dalam tata niaga mebel. Sehingga, pengusaha kecil bisa terlindungi dari monopoli pedagang besar serta inovasi-inovasi yang sesuai sebagai langkah mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi industri mebel pasuruan.

Berangkat dari kasus tersebut diatas jelas bahwa masalah utama yang dihadapi oleh industri ini adalah bidang pemasaran, bidang Sumber daya manusia dan juga bidang produksi barang. Untuk itu kawasan klaster industri ini perlu adanya penanganan dari pemerintah daerah. Maka, peneliti berupaya mencari kebenaran sejauh mana pemerintah melakukan kebijakan yang dapat digunakan sebagai pelindung kawasan industri ini khususnya para pelaku industri kecil dari berbagai masalah-masalah untuk itu peneliti mengambil judul : “ *Peranan Pemerintah Daerah dalam pengembangan industri kecil berbasis klaster industri (studi tentang pengembangan industri mebel dan kayu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Pasuruan)*”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas permasalahan penelitian adalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Upaya Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengembangan industri mebel dan kayu dipasuruan.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam perkembangan Klaster Industri mebel dan kayu dikota Pasuruan.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang menjadi tujuan peneliti adalah aspek-aspek yang berhubungan dengan :

1. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengembangan klaster industri mebel dan kayu dipasuruan.
2. Untuk mengetahui Faktor pendukung dan penghambat dalam perkembangan klaster industri mebel dan kayu di Pasuruan.

1.4 Kontribusi Penelitian

1. Bagi diri sendiri

Untuk lebih meningkatkan pemahaman tentang upaya pemerintah daerah dalam pengembangan klaster industri dan mendalami langkah-langkah yang selama ini sudah dan akan diambil oleh lembaga tersebut dalam menangani masalah tersebut.

2. Bagi Teori

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu adminstasi negara khususnya yang berhubungan dengan pembangunan daerah.

1.5 Sistematika Pembahasan

Alur pemikiran penulis maka bab yang dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan latar belakang peneliti Rumusan masalah, Tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika pembahasan

BAB II Kajian Pustaka

Dalam bab ini diuraikan pengertian Pengertian Peranan, Pengertian Peranan pemerintah daerah, Pengelompokan industri, Kriteria dan peranan Pengelompokan industri, Keunggulan dan Kelemahan industri.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini mengenai fokus penelitian, Jenis penelitian, Sumber data, Tehnik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian Analisis Data, serta Keabsahan Data.

BAB IV Hasil Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan mengenai : Data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, tujuan penelitian sesuai dengan fokus Penelitian, Data yang ditampilkan dianalisis dan diinterpretasikan.

BAB V Penutup.

Dalam bab ini diuraikan mengenai Kesimpulan atas data dan hasil dalam penelitian sebagai bahan masukan pada pihak-pihak yang berkaitan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Peranan

Dilihat dalam *kamus bahasa indonesia (1997: 751)* peran didefinisikan sebagai perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa. Peran juga bisa diartikan sebagai bagian yang dimainkan oleh seseorang.

Pengertian Peranan menurut ilmu sosiologi yaitu : merupakan perilaku dan tugas yang diharapkan dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan dan status yang dimiliki.

Menurut *Wojowasito (1974: 67)* peranan dilakukan orang atau kelompok kewenangan menjadi atau melaksanakan suatu khas. Peranan ialah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok kepentingan dalam melaksanakan kegiatan.

Menurut *Soekanto (2004: 243)* pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.

Sedangkan pengertian peranan menurut *Cohen, Bj dan Simanora, S (1983: 76)* adalah suatu perilaku yang diharapkan untuk orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu. serta pentingnya peranan karena mengatur perilaku seseorang dan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu yang dapat diramalkan.

Dari beberapa pengertian peranan diatas, maka peranan yang dilakukan seseorang ditentukan sebelumnya dan kewenangan yang dimiliki ini dalam menjalankan tugasnya baik dalam hubungan pejabat pemimpin atau seluruh masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya suatu kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan status kedudukan. Maka dari itu peranan bersifat dinamis dan aktif. seseorang atau kelompok kewenangan berdasarkan ketentuan yang telah dan oleh disimpulkan adalah serangkaian kegiatan aktifitas seseorang yang memegang pimpinan dalam suatu kelompok sedangkan dipihak lain menjadi bagian dari peranan tersebut.

2.2. Pengertian Peranan Pemerintah

Pengertian Peranan Pemerintah secara tradisional selalu mengacu pada apa yang diungkapkan oleh : Adam Smith dalam bukunya yang terkenal “*Wealth Of Nations*” bahwa Pemerintah memiliki tugas melindungi masyarakat dari pelanggaran dan invasi masyarakat lainnya dari ketidakadilan atau tekanan dari anggota masyarakat lainnya, serta bertugas menegakkan administrasi keadilan secara pasti “ Pandangan ini menempatkan peran pemerintah secara terbatas hanya pada pertahanan, keadilan. Kebutuhan masyarakat diluar hal tersebut terpenuhi sendiri oleh masyarakat dengan berinteraksi satu sama lainnya dalam lembaga pasar. selain itu peran pemerintah daerah dalam kajian memberikan layanan publik terdapat tercermin dari penggunaan instrumen kebijakannya. Dengan melakukan analisis terhadap penggunaan instrumen ini sebenarnya dapat diketahui bagaimana karakter pemerintah daerah jika dibandingkan dengan unsur lain.

Sedangkan Peranan Pemerintah Menurut Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka dimulai era baru dalam Pemerintahan daerah dengan adanya otonomi luas dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan yang besar dalam menyelesaikan masalah-masalah sendiri. Bekerja untuk memenuhi aturan menjadi bekerja untuk mewujudkan misi *Kaloh, (2002:132). Osborne dan Gaebler* menyarankan bahwa pemerintah memiliki peran : 1) mengarahkan, kewajiban pemerintah untuk menyediakan layanan, tetapi untuk melihat bahwa mereka diberikan"). 2) memberdayakan masyarakat untuk menyelesaikan masalah sendiri bukan sekadar memberikan pelayanan. 3) mendorong persaingan, bukan monopoli. 4) didorong oleh misi, bukan aturan-aturan. 5) menjadi berorientasi pada hasil dengan dana hasil daripada input. 6) memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi 7) berkonsentrasi pada mendapatkan uang, bukan menghabiskannya.8) berinvestasi dalam masalah mencegah daripada mengobati krisis. 9) melakukan desentralisasi kewenangan. 10) memecahkan masalah dengan mempengaruhi kekuatan pasar dari pada membuat program-program public.

Setelah perubahan paradigma peranan Pemerintah yang dipengaruhi oleh adanya pengertian otonomi daerah maka peran pemerintah menjadi lebih ringan karena daerah juga memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan Pemerintah hanya terpusat pada bagaimana berupaya menjaga keamanan bagaimana melindungi masyarakat dari tindakan negara lain serta berupaya menjaga regulasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar terjalin koordinasi yang baik. pengertian peranan tidak lepas dari pada konsep pembangunan yang merupakan studi teori dari penelitian ini. pembangunan yang dilakukan pemerintah melalui Disperindag bertujuan akhir sebagai untuk mencapai pertumbuhan masyarakat umumnya.

Mengapa Pemerintah ikut campur dalam suasana ekonomi masyarakat hal ini dijawab berkenaan dengan dasar suasana pasar yang tidak sempurna (penguasa pasar, monopolistik, pengendali harga oleh produsen bersifat merugikan) maka intervensi atau campur tangan pemerintah sangat diperlukan. Bagaimanapun peran tersebut dilakukan, tidak pada jaminan bahwa tindakan yang diambil selalu dapat efektif artinya ada kemungkinan bahwa peranan pemerintah tersebut akan menambah persoalan baru.

Regulasi mempunyai arti mengendalikan dengan aturan ialah hal-hal yang berkaitan dengan pembatasan ataupun penyesuaian yang diperlukan. Dari definisi itu dapat dipandang bahwa ada upaya dari lembaga atau pemerintah untuk mengatur secara berkesinambungan sehingga terjadi keharmonisan antara pengatur dengan yang diatur juga mempunyai ruang untuk melarang ataupun memperbolehkan untuk melakukan aktifitas serta penyesuaian dari peraturan yang ada saat ini pula.

Peraturan merupakan bagian penting dari kehidupan kita contoh nyata yang mudah dapat kita lihat misalkan penempatan waktu libur, jam kerja, rambu-rambu lalu lintas selanjutnya dapat dibayangkan seandainya hal itu tidak ada mungkin akan ada setumpuk masalah yang timbul dalam kaitannya ekonomi tentunya dalam pengaturan transaksi dan pasar perlu juga dibuat peraturan yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang disepakati

bersama. Regulasi dipandang relevan sepanjang hal tersebut memperbaiki produktifitas dan efisiensi alokasi serta dinamika dalam industri. mengambil suatu keputusan tentang kebijakan baik secara individual terhadap jenis komoditi ataupun secara kelompok industri serta kepentingan-kepentingan masyarakat nasional. Dalam sejarahnya dipermulaan abad ke 20 muncul konsep kebebasan ekonomi yang lebih dikenal dengan “ *Laissez Faire*” atau memberikan kebebasan pada pihak swasta untuk berperan aktif dalam ekonomi dengan sangat sedikit dalam keterlibatan peran pemerintah dalam menentukan variable ekonomi seperti harga, upah, bunga dan variable lainnya dalam hal ini memang suatu peluang besar dari sektor swasta untuk dapat mencapai yang diinginkan namun kondisi tersebut juga memiliki segi negatif yaitu dalam hal penguasaan pasar, sehingga mereka yang tidak mempunyai modal, informasi teknologi dan pemasaran yang kuat seperti usaha kecil dan menengah UKM maka akan terjadi kegagalan pasar untuk itu diperlukan Regulasi dan kebijakan yang berguna untuk menstabilkan sistem perekonomian sehingga kepentingan nasional masih dapat terlindungi. Sedangkan instrumen regulasi menurut *B. Taufik (2002 : 55-56)* antara lain :

1. Pengendalian Harga dengan hal ini perlu dalam rangka perlindungan terhadap konsumen ataupun produsen pemerintah mengendalikan harga.
2. Pengendalian kuantitas hal ini dari produk atau jasa yang dijual dengan menggunakan ataupun tidak menggunakan regulasi harga.
3. Pengendalian masuk dan keluar dalam instrumen ini dilakukan pengaturan terhadap jumlah perusahaan baru yang masuk didalam pasar tentunya juga dengan pertimbangan kemungkinan yang akan timbul dengan perusahaan yang ada saat ini dipasar.
4. Pengendalian lainnya disini pemerintah mengatur selain variable diatas juga mengatur variable lain yang dapat digunakan, pengaturan infestasi, standarisasi dalam upaya perlindungan pengusaha dalam negeri dll.

2.3. Pengertian Pemerintah Daerah

Pengertian Pemerintahan Daerah maupun Pemerintah Daerah berasal dari istilah Inggris *Local Government* atau istilah Belanda *Local Bestuur*. Kedua istilah asing tersebut dapat mengacu pada fungsi sebagai Pemerintahan Daerah (lokal). Dalam arti organ (institusi), istilah *local authority* (UN. 1961). Dalam arti tersebut utamanya mengacu pada *council* (raad) atau DPRD. Konsekuensinya konsep pemerintahan daerah (lokal) mencakup fungsi yang dilakukan juga oleh *Council* (Raad) atau DPRD. *Local Government* dapat pula berarti daerah otonom.

Pada umumnya berbagai UU Pemerintahan Daerah sebelum UU No. 22 Tahun 1999 memiliki cara pandang yang tepat azas dalam memberi pengertian tentang Pemerintah Daerah dan pemerintahan daerah sebagaimana pengertian *local Government* dan dewan pemerintah Daerah. Berkenaan dengan UU No. 32. tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 menjelaskan bahwa Otonomi daerah adalah Hak, wewenang dan kewajiban daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya dan masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dilihat dari konsep ini maka Pengertian Pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya harus menyelenggarakan otonomi daerah.

Peranan pemerintah daerah dalam pengembangan kluster industri Karena berada di daerah maka Pemerintah Kabupaten, Kota dan Propinsi harus bekerjasama membangun kluster usaha. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dikerjakan bersama yaitu : 1. Membentuk forum pengembangan keunggulan daerah atau memperkuat forum daerah yang ada. 2. Menganggarkan aktifitas pengembangan kluster atau memanfaatkan dana yang ada untuk menstimulir upaya intervensi ke kluster usaha. 3. Mencari dan memilih unggulan produk di kluster yang ada. 4. Menyusun program tindak pengembangan kluster dengan menugaskan BDSP terpilih. 5. Menjalankan forum bersama mendukung dan mengendalikan program tindak tahun pertama. 6. Mengkoordinasikan sumberdaya dan program Pemerintah yang ada untuk sinergi penguatan. 7. Mengajak dan menggerakkan sumberdaya dan dukungan lokal, Lembaga

Pengabdian pada Masyarakat Perguruan Tinggi, Unit Pelayanan Teknis, BPPT untuk membantu penelitian, informasi, dan nasihat teknis. 8. Menyertakan atau paralel mengembangkan klaster pariwisata yang disinergikan dengan program pengembangan klaster usaha.

2.4. Pengertian industri, Klaster industri dan Pengembangan Klaster Industri

2.4.1). Pengertian Industri

Apa yang dimaksud dengan industri menurut *Puerwadarminta (1984:380)* adalah “Kegiatan berusaha untuk membuat atau menghasilkan barang-barang “ sedangkan menurut *Basu Swastha dan Ibnu S. (1988:11)* mengatakan bahwa Pengertian industri sering kali dihubungkan dengan adanya mekanisasi, teknologi dan hal-hal yang datang dari negara-maju, jadi dapat dikatakan bahwa sebuah industri merupakan suatu kelompok perusahaan yang memproduksi barang untuk pasar yang sama pula” jadi yang dimaksud pengembangan industri adalah merupakan suatu rangkaian usaha perubahan kearah yang lebih baik disektor industri dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional yang kuat dan kokoh. Dalam pengembangan industri perlu diusahakan agar tercipta iklim kondisi agar tercipta ikatan yang erat antara industri kecil, industri menengah, dan industri besar.

Dengan adanya keterkaitan antara golongan-golongan industri tersebut dalam pengembangan dan pembinaan usaha industri maka akan mampu memperkokoh struktur ekonomi nasional.

2.4.2). Pengertian Klaster Industri kecil.

Pengertian adalah sekumpulan usaha kecil yang terdiri dari usaha inti dan usaha penunjang yang muncul dan saling bekerjasama pada satu lokasi geografis tertentu untuk mencapai kondisi yang paling ekonomis baik bagi masing-masing usaha tersebut maupun secara keseluruhan. Usaha inti adalah usaha kecil yang memproduksi produk utama suatu klaster. Sedangkan usaha penunjang adalah usaha kecil yang mendukung kelancaran proses produksi usaha inti.

Klaster industri oleh *Michael Porter (1998)* didefinisikan sebagai “*a geographically proximate group of interconnected companies and associated institutions in a particular field, linked by commonalities and complementarities*”. Pengelompokan perusahaan sejenis yang bekerja saling melengkapi dan saling memperkuat terbukti memiliki daya saing yang tinggi.

Menurut Profesor Schmidz klaster usaha adalah kumpulan dari pengusaha secara sektoral dan kawasan Klaster di negara maju didefinisikan sebagai suatu industri sejenis yang berkerumun secara geografis yang mempunyai saling keterkaitan dan jaringan yang erat. Sebaliknya penelitian di negara berkembang menunjukkan klaster adalah aglomerasi usaha kecil dan mikro.

Alfred Marshall (1920) adalah ekonom pertama yang banyak membahas pengembangan industri berbasis klaster. Distrik industri sebagai embrio pertumbuhan klaster cenderung memiliki daya saing tinggi karena menciptakan efisiensi kolektif dalam memanfaatkan ketersediaan sumber bahan baku lokal, tenaga kerja dengan ketrampilan khusus, penyebaran pengetahuan (*knowledge spillover*) yang cepat, dan keterkaitan hulu-hilir yang kuat.

2.4.3). Pengembangan Klaster Industri Kecil.

Langkah-langkah Pengembangan Klaster Industri Upaya dan proses pengembangan (perkuatan) klaster industri pada dasarnya terdiri atas empat tahap generic, yaitu, aktivitas awal inisiatif pengembangan (perkuatan), penyusunan kerangka dan agenda pengembangan (perkuatan), implementasi dan pemantauan, evaluasi serta perbaikan/penyempurnaan. Beberapa tahapan operasional dalam pengembangan klaster industri secara garis besar adalah :

1. Perumusan masalah atau isu-isu yang menimbulkan kebutuhan untuk menetapkan suatu klaster sebagai tujuan dalam mengembangkan daya saing.

2. Identifikasi kluster yang dicapai Dalam tahapan ini yang paling awal dilakukan adalah pengumpulan data mengenai profil daerah, profil ekonomi dan informasi tentang masing-masing kluster potensial.
3. Identifikasi beberapa alternatif kluster terpilih sebagai tujuan Pada tahap ini dilakukan review tentang pengembangan kluster alternative yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah diidentifikasi.
4. Penilaian kluster untuk setiap alternatif Dalam tahap ini dilakukan kajian atas kluster alternative melalui analisis input-output dan analisis SWOT
5. Penentuan kluster pilihan Dalam tahap ini yang paling penting adalah memastikan mana yang paling efektif, efisien dan strategis.
6. Perumusan strategi untuk menetapkan kluster Dalam tahap ini dilakukan perumusan strategi untuk mengimplementasikan kebijakan dilapangan yang mencakup grand design, model pengembangan, sosialisasi, dan monitoring pelaksanaan.
7. Implementasi pengembangan kluster dengan menetapkan rencana tindakan Pengembangan suatu kluster industri perlu disesuaikan dengan konteks kasus spesifik dan disepakati para stakeholders kunci, dan mempertimbangkan kaidah-kaidah yang berlaku termasuk kebijakan formal yang terkait dengan perencanaan pembangunan.

Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kluster Pengembangan kluster industri perlu diimbangi dengan upaya perbaikan peran pemerintah, khususnya instansi pemerintah daerah yaitu : sebagai fasilitator dalam pengembangan jaringan dalam kluster, kualitas dalam mengembangkan keunggulan daya saing yang dinamis, memperkuat system dukungan terpadu bagi kluster termasuk kelembagaan, menciptakan struktur insentif untuk menghilangkan/mengurangi ketidak efisienan pasar dan sistemik yang terjadi dalam system inovasi. Sementara itu, peran litbang atau perguruan tinggi adalah penyedia pengetahuan/teknologi yang sejalan

dengan pengembangan daya saing klaster, termasuk penyedia SDM spesialisasi yang berkualitas dan pengetahuan keunggulan riset, sebagai bagian dari instrumen kebijakan yang sesuai dengan distinctive capabilities masing-masing dalam proses peningkatan nilai tambah keseluruhan klaster, sebagai katalis dalam proses inovasi dan difusi, gudang pakar, pemberi pengaruh, dan kelompok pendesak strategic serta pendukung moral dan pemberi peringatan dini dalam pengembangan klaster, peran generic lain seperti fasilitasi, peningkatan kapasitas anggota/stakeholders klaster, advisory dan advokasi bagi klaster industri tertentu. Sedangkan peran lembaga pemerintah non departemen seperti BPPT adalah perlu terus mengembangkan kompetensi dan distinctive capabilities serta semakin mampu melaksanakan peran strategisnya dalam mengembangkan/ memperkuat klaster.

Kerangka Umum Kebijakan Berbasis Klaster

1. Kebijakan berorientasi peningkatan inovasi Dalam perkembangan perdagangan regional maupun internasional beragam hambatan tarif maupun non tariff secara bertahap dihapuskan, sedangkan negara maju kini semakin bergeser untuk menggunakan hambatan teknis yang pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemampuan pengetahuan/teknologi. Kapasitas inovasi atau kemampuan bereaksi berproaksi secara tepat dan cepat terhadap perkembangan pasar merupakan kunci dalam memelihara posisi kompetitif ditengah ketatnya persaingan global yang dinamis. Kapasitas inovatif nasional atau kapsitas inovatif daerah adalah potensi suatu negara atau daerah untuk menghasilkan aliran inovasi relevan yang komersial, pada dasarnya dipengaruhi oleh tiga factor yaitu infrastruktur inovasi umum yang merupakan sehimpunan investasi dan kebijakan terobosan yang mendukung inovasi dalam keseluruhan ekonomi negara atau daerah, lingkungan spesifik klaster untuk inovasi (the cluster specific environment for innovation) yang tercermin dalam kerangka empat determinan daya saing porter (the four diamond framework) dan kualitas keterkaitan (the quality of linkages) hubungan antara infrastruktur inovasi umum dengan lingkungan klaster industri bersifat timbal balik. Untuk

peningkatan keunggulan daya saing nasional agar mampu bersaing dalam perdagangan internasional maka dibutuhkan sumber daya iptek termasuk UMK, perlu investasi yang terarah untuk memperkuat keterkaitan antara pembentukan kemampuan iptek dengan pembentukan keunggulan daya saing dan perlu kerjasama/kolaborasi antara knowledge pool (perguruan tinggi/lembaga litbang) sebagai sumber pengetahuan dan teknologi dengan penggunanya (swasta khususnya UKM). Ketiga elemen itulah yang krusial bagi peningkatan rantai nilai keseluruhan sehingga akan membentuk/memperkuat daya saing kolektif, baik UKM, mitra bisnis, dan sumber daya teknologinya. Model kebijakan yang dapat menjadi alternatif antara lain adalah keunggulan nasional, networking antara perusahaan/UKM, pembangunan daerah dan pengklasteran industri-litbang teknologi (*Den Hertog, 2001 :32*).

2. Kerangka Bagi Kebijakan Lain Rosenfeld (2001) menyampaikan beberapa pilihan kebijakan dalam mendorong dan meningkatkan daya saing klaster yaitu pengorganisasian penyampaian jasa layanan dalam klaster, mengarahkan investasi dalam klaster, memperkuat jaringan dan membangun hubungan, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Kebijakan dalam rangka pengembangan perkuatan klaster industri sebenarnya bersifat unik dan setiap kasus bergantung pada beragam factor termasuk tingkat perkembangannya, prioritas klaster, ketidaksempurnaan pasar dan preferensi pasar, dan situasi anggaran. Dalam proses pengembangan klaster industri agar dapat menjadi pendekatan efektif yang menghasilkan sinergi positif dan sebagai proses yang berkelanjutan maka kolaborasi dengan berbagai pihak perlu terus dikembangkan, perlu partisipasi aktif dari semua pihak dan platform kebijakan dan instrumennya pun perlu memberikan keluwesan sesuai dengan consensus stakeholder dan karakteristik lokal. Dalam proses penjabaran rencana tindak, program utama untuk menumbuh-kembangkan unggulan daerah secara umum perlu memperhatikan elemen-elemen penting antara lain, penciptaan iklim ekonomi yang kondusif, peningkatan

daya saing UKM, pengembangan dan pemanfaatan potensi spesifik lokal dan penguatan keterkaitan rantai nilai tambah ekonomi.

Program pengembangan industri kecil dengan pendekatan kluster dapat dilakukan dengan menumbuhkan kluster baru dan mengembangkan kluster yang telah ada sesuai dengan pola pertumbuhan alamiahnya. Di Indonesia belum banyak kluster usaha yang memenuhi kualifikasi seperti yang ada di negara maju. Yang ada adalah kerumunan pengusaha sektoral tadi yang belum menjalin keterkaitan usaha. Inilah yang kita kenal dengan sebutan sentra usaha. Teori efisiensi kolektifitas menjelaskan pengembangan usaha kecil dan mikro berbasis kluster adalah efektif. Kerumunan secara geografis memudahkan pembeli mencari pemasok produk. Lagi pula pembeli dapat memesan dalam jumlah yang besar. Tenaga kerja yang di pool memungkinkan pengusaha mempekerjakan mereka sesuai kebutuhan. Ada fleksibilitas dalam pengkaryaan tenaga kerja. Pengusaha yang berkelompok lebih mudah berhubungan langsung ke pasar, lebih mudah mengakses informasi pasar, teknologi, dan pelatihan. Secara aktif, dan ini elemen yang krusial dalam kluster, pengusaha yang berkelompok lebih mudah bekerjasama untuk membeli bahan baku, pemasaran, bagi fasilitas produksi, pelatihan dan penelitian.

Fenomena di lapangan memperlihatkan bahwa tidak semua usaha kecil hidup di dalam kluster dan kluster yang telah ada memperlihatkan adanya perbedaan dalam jumlah dan ukuran usaha inti, spesialisasi usaha penunjang, serta perbedaan ukuran usaha penunjang yang hidup di dalamnya. Fenomena tersebut menunjukkan diperlukannya persyaratan khusus untuk menjadi suatu kluster industri kecil dan kluster yang telah terbentuk akan tumbuh dengan pola yang berbeda-beda. Penelitian ini berusaha memahami proses terbentuknya kluster dan perbedaan pola pertumbuhan kluster, sehingga fenomena pola pertumbuhan kluster industri kecil dapat diperjelas dan dapat menjadi dasar bagi pengembangan industri kecil dengan pendekatan kluster.

Dengan pendekatan ini penelitian dilakukan secara komprehensif dimulai dari aktivitas di dalam usaha kecil, aktivitas antar usaha kecil di

dalam kluster dan hubungannya dengan lingkungan luar kluster. Proses pengambilan data dilakukan bersamaan dengan analisis data secara simultan dengan metode snowball dari kluster pertama sampai dengan kluster yang keenam. Hasil analisis dari kluster pertama digunakan sebagai dugaan bagi analisis terhadap kluster berikutnya sampai hasil analisis tidak berubah-ubah lagi. Dengan demikian, maka dapat dilakukan generalisasi untuk keseluruhan kluster. Analisis dilakukan untuk mencari penjelasan terhadap aktivitas kehidupan kluster secara komprehensif yang dapat menyebabkan munculnya usaha inti dan usaha penunjang di dalam suatu kluster. Hal ini karena keduanya merupakan unsur pembentuk kluster dan kemudian mereka juga mengalami perubahan sampai terbentuk pola pertumbuhan tertentu.

Di Indonesia belum banyak kluster usaha yang memenuhi kualifikasi seperti yang ada di negara maju. Yang ada adalah kerumunan pengusaha sektoral tadi yang belum menjalin keterkaitan usaha. Inilah yang kita kenal dengan sebutan sentra usaha. Teori efisiensi kolektifitas menjelaskan pengembangan usaha kecil dan mikro berbasis kluster adalah efektif. Kerumunan secara geografis memudahkan pembeli mencari pemasok produk. Lagi pula pembeli dapat memesan dalam jumlah yang besar. Tenaga kerja yang di pool memungkinkan pengusaha mempekerjakan mereka sesuai kebutuhan. Ada fleksibilitas dalam pengkaryaan tenaga kerja. Pengusaha yang berkelompok lebih mudah berhubungan langsung ke pasar, lebih mudah mengakses informasi pasar, teknologi, dan pelatihan. Secara aktif, dan ini elemen yang krusial dalam kluster, pengusaha yang berkelompok lebih mudah bekerjasama untuk membeli bahan baku, pemasaran, bagi fasilitas produksi, pelatihan dan penelitian.

Prospek Kluster Usaha Unggulan Indonesia memiliki lebih kurang 14000 kluster yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Lebih dari 9800 adalah kluster usaha kecil dan mikro dan sisanya adalah kluster agro dan perikanan. Bila rata-rata setiap kluster mempunyai 50 anggota maka ada 700.000 pengusaha kecil dan mikro terlibat atau setara dengan lebih

dari 3 juta pekerja terlibat. Penguatan usaha yang ada di klaster diyakini akan meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Bila setiap kabupaten dan kota berhasil menjadikan 3-5 klaster unggulan maka akan terjadi efek berganda yang dapat meningkatkan ekonomi daerah. Kegiatan pemasaran antar daerah meningkat. Masyarakat pengusaha di klaster yang semakin sejahtera bisa menjadi salah satu pilar kelompok menengah daerah yang makin hari makin maju.

Klaster industri kecil merupakan salah satu alternatif pertumbuhan usaha kecil. Usaha kecil dapat berkembang menjadi klaster pada kondisi permintaan pasar lebih besar daripada output yang dihasilkan oleh usaha kecil tersebut. Agar dapat melayani sejumlah dan beraneka produk yang diminta pasar, maka usaha kecil harus meningkatkan kemampuan proses produksi. Peningkatan "Kemampuan Proses Produksi" dapat dilakukan dengan menambah kapasitas proses produksi. Penambahan kapasitas seringkali tidak dapat dilakukan sepenuhnya karena adanya hambatan-hambatan yang berasal dari karakteristik bahan, proses produksi produk, dan pasar yang dilayani. Keputusan untuk mengatasi hambatan penambahan kapasitas proses dilakukan dengan pertimbangan ekonomis. Jika hambatan tersebut dapat diatasi sepenuhnya, maka usaha kecil dapat berkembang menjadi usaha besar atau usaha besar tertarik untuk mengatasi hambatan yang dialami usaha kecil karena adanya peluang melayani pasar dalam jumlah besar. Jika hambatan tersebut tidak dapat diatasi sepenuhnya, maka pasar tersebut akan tetap dilayani usaha kecil.

Pada batas tersebut usaha kecil memutuskan untuk melayani produk tertentu dan menetapkan bahwa produk yang lain lebih ekonomis jika dikerjakan oleh pihak lain. Pihak lain akan mempertimbangkan kesempatan tersebut beserta lokasi tempat usaha. Jika atas dasar pertimbangan ekonomis kesempatan tersebut lebih menguntungkan dikerjakan di lokasi usaha kecil yang telah ada, maka akan muncul beberapa usaha kecil di lokasi yang sama yang disebut sebagai usaha inti.

Selain itu penambahan kapasitas proses produksi harus tidak merugikan usaha kecil dengan mengakibatkan proses produksinya tidak

berjalan "lancar". Proses produksi dapat berjalan "lancar" jika tidak ada kapasitas yang menganggur, tidak ada tahap proses yang harus menunggu, dan tidak ada persediaan bahan. Jika kelancaran proses produksi belum terpenuhi, maka pada tahap yang terganggu kelancarannya akan lebih ekonomis jika dikerjakan pihak luar usaha inti. Dengan pertimbangan ekonomis, usaha inti akan menentukan darimana pihak lain tersebut diperoleh. Sementara pihak lainpun akan memutuskan apakah akan menerima kesempatan tersebut dan dimana beroperasi. Jika atas dasar pertimbangan ekonomis pihak lain tersebut akan beroperasi pada lokasi yang sama dengan usaha inti dan usaha inti juga memutuskan untuk menggunakan usaha penunjang di dalam lokasi, maka akan muncullah usaha penunjang dalam lokasi tersebut. Di Indonesia sesungguhnya kita telah mengenal konsep Lingkungan Industri Kecil dan Sentra Industri sejak 1979. Lingkungan industri tumbuh melalui perencanaan dan keterlibatan pemerintah, sedangkan sentra industri kecil lebih tumbuh secara alami. Konsep-konsep tersebut pada awalnya dikembangkan untuk membina industri kecil dengan lebih baik, dari segi biaya maupun ketepatangunaannya.

Pada pertengahan 1990-an sejumlah departemen juga mengembangkan konsep pengembangan industri berbasis kluster. Bahkan ada departemen yang telah menerbitkan inventarisasi jumlah kluster potensial, yaitu kluster yang memiliki potensi bertumbuh tinggi. Memang harus diakui, sebagian besar embrio kluster di Indonesia sulit berkembang karena berbagai sebab, seperti beratnya kendala bahan baku dan banyaknya beredar produk pengganti (substitute) dengan kinerja produk lebih baik.

Selama kehidupan kluster, akan terjadi perubahan jumlah dan ukuran usaha inti, serta spesialisasi dan ukuran usaha penunjang. Perubahan-perubahan tersebut untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi pada pasar dan upaya peningkatan kapasitas proses produksi melalui inovasi. Keputusan untuk melakukan perubahan datang dari usaha inti maupun usaha penunjang dengan menggunakan pertimbangan

ekonomis. Perubahan-perubahan tersebut akan membentuk klaster dalam pola pertumbuhan tertentu agar dapat mencapai kondisi yang paling ekonomis.

2.5. Pengelompokan Industri Kecil dan UKM

Anderson, (1987) mengemukakan definisi pengelompokan kegiatan usaha dan industri ditinjau dari jumlah pekerja sebagai berikut :

Tabel 1.1

Pengelompokan Kegiatan usaha ditinjau dari jumlah pekerja

| | | |
|----------------|---------------------|--------------------------|
| Usaha | - Kecil I – kecil | 1 – 9 Pekerja |
| | - Kecil II – kecil | 10 – 19 Pekerja |
| Usaha menengah | Besar – kecil | 100 – 199 Pekerja |
| | Kecil – menengah | 201 – 499 Pekerja |
| | Menengah – menengah | 500 – 999 Pekerja |
| | Besar – menengah | 1000 – 1999 Pekerja |
| Usaha besar | | Lebih besar 2000 Pekerja |

Sumber : Anderson, Tommy D. (1987), Profid in Small Firm,

Industri dapat digolongkan kedalam berbagai kriteria sehingga dalam penelitian dapat diketahui batasan untuk memudahkan dalam mengidentifikasi jenis industri. Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 589 Tahun 1999 tentang Perindustrian dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

- a) Industri Hulu disebut Industri Dasar yaitu berwujud industri yang mengolah sumber atau bahan baku, bahan setengah jadi atau bahan jadi menjadi padat modal.
- b) Industri Hilir disebut Aneka industri yaitu berwujud industri yang mengolah sumber daya alam dan energi (pertanian, kehutanan, pertambangan dan energi). dan industri Manufacturing.

- c) Industri Kecil, digambarkan sebagai industri padat karya yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang tidak mungkin tertampung pada sektor diatas.

Dari uraian diatas dapat dilihat dan diketahui kelompok industri didasarkan oleh pengolahan dari proses produksi.

Sedangkan menurut Biro Pusat Statistik dalam *Arsyad (1986:176)*, pengelompokan industri menurut jumlah tenaga kerja dibedakan menjadi:

- 1) Perusahaan / Industri Besar jika memperkerjakan 100 orang atau lebih.
- 2) Perusahaan / Industri Sedang jika memperkerjakan 20-99 orang.
- 3) Perusahaan / Industri Kecil jika memperkerjakan 5-19 orang.
- 4) Industri Kerajinan rumah tangga jika memperkerjakan kurang dari tiga orang (termasuk tenaga kerja yang tidak dibayar).

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa dari segi kesempatan kerja yang diciptakan, maka industri kerajinan rumah tangga adalah paling penting sedangkan dari segi nilai tambah yang dihasilkan maka perusahaan-perusahaan atau industri besar paling menonjol. Batasan industri kecil dengan industri berskala besar Meski terjadi kesulitan dalam penentuan batasan antara industri kecil dengan industri besar namun patokan dapat digolongkan aspek tenaga kerja dan modal. Biro Pusat Statistik dalam *Kuncoro (1997:314-315)*. Mengklasifikasikan :

Titik Sartika P dan Abdulrahman dalam Laporan data base 2005

Diluar negeri tentang usaha kecil :

- 1) Usaha Kecil di Inggris jumlah karyawan 1 – 200 orang
- 2) Usaha Kecil di Jepang jumlah karyawan 1 – 300 orang.
- 3) Usaha Kecil di Amerika jumlah Karyawan 1 -500 orang

Indonesia

- a. Deperindag RI tahun 1991 mengelompokkan industri kedalam industri kecil dan kerajinan. UKM didefinisikan sebagai kelompok perusahaan yang dimiliki penduduk indonesia dengan aset kurang dari 600 juta (diluar nilai tambah dan bangunan yang digunakan).
- b. Bank Indonesia Usaha kecil kurang dari 600 juta Usaha menengah lebih dari 600 juta.

c. Inpres No. 10 tahun 1999

Usaha menengah adalah unit kegiatan yang mempunyai kekayaan bersih lebih dari 200 juta sampai dengan 1 Milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).

d. UU No.5 tahun (1995).

Usaha kecil ialah kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana telah diatur ndang-undang. Pengertian industri kecil bersifat relatif sehingga perlu adanya betasah yang menimbulkan definisi industri kecil dari berbagai segi.

Dari definisi diatas, penulis memberikan batasan tentang industri kecil yaitu Industri yang memiliki tenaga kerja antara 5 sampai 19 orang permodalannya kurang dari 25 juta, mempunyai aset tidak lebih dari 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan) serta omset penjualan tidak lebih dari 2 milyar. Namun batasan yang dipakai sebagai indikator tersebut tidak dapat diberlakukan secara umum.Batasan itu beralakunya sangat dibatasi oleh konteks ruang dan waktu. Sebagaimana dikatakan oleh *Wasis (1978:19-20)*. Pengertian besar kecilnya perusahaan atau skala perusahaan harus dilihat secara khusus. Dan ada bermacam-macam kriteria untuk mengukur besar kecilnya perusahaan misalkan jumlah modal, jumlah tenaga, jumlah produk, jumlah omset dan jumlah nasabah.

Menurut *Saleh (1987:51-53)* diindonesia terdapat 3 jenis industri kecil yaitu :

- a. Industri lokal adalah sekelompok jenis industri yang menggantungkan kelangsungan hidupnya pada pasar besar setempat yang terbatas. Secara relatif tersebar dari segi lokasinya. Skala usaha kelompok ini sangat kecil dan mencerminkan pola perusahaan yang bersifat subsistem. Target pemasarannya sangat terbatas sehingga pada umumnya menggunakan sarana yang terbatas dan sederhana. Adapun karena pemasaran hasil produk ditangani sendiri maka jasa perdagangan perantara boleh dikatakan kurang menonjol.

- b. Industri yang terkelompok atau sentra industri kecil adalah kelompok jenis industri yang dari segi satuan usaha mempunyai skala kecil, tetapi membentuk suatu pengelompokan atau suatu kawasan produksi yang terdiri dari kumpulan unit usaha yang menghasilkan barang sejenis. Ditinjau dari segi tempat pemasarannya, kategori yang kedua ini umumnya menjangkau pasar lebih luas dari pada kategori yang pertama sehingga peranan pedagang perantara pengepul, menjadi cukup menonjol.
- c. Industri Mandiri yaitu kelompok industri yang mempunyai sifat-sifat industri kecil, tetapi mempunyai kemampuan beradaptasi dengan teknologi produksi cukup canggih. Pemasaran hasil industri produksi kelompok ini relatif tidak tergantung pada peranan pedagang perantara. Dimaksudkan dengan adanya sifat-sifat industri kecil yang masih dipunyai oleh kelompok industri ini adalah skala unit usaha yang relatif kecil atau sistem manajemen yang digunakan masih sangat sederhana. Pada dasarnya kelompok industri mandiri ini tidak sepenuhnya dapat dinisbahkan sebagai bagian dari kecil industri kecil mengingat kemampuannya yang lampau tinggi dalam mengakomodasi beragam aspek modernisasi. Dan sesungguhnya atas dasar skala penyerapan tenaga kerja semata, maka kelompok ini menjadi termasuk kedalam bagian dari sub sektor industri kecil.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa sentra industri kecil atau kluster industri adalah kumpulan dari industri-industri kecil yang sejenis pada suatu kawasan dan wilayah. Dalam kasus yang akan diteliti menggunakan jenis industri ini sehingga dengan adanya pusat pertumbuhan industri kecil (sentra industri kecil) akan sangat memudahkan dalam pembinaan pengembangan serta penyuluhan untuk dapat meningkatkan produksi dan pemasaran. Juga dapat digunakan sebagai sarana kerja bagi sejumlah pengusaha kecil setempat. Seperti misalnya penggunaan peralatan tertentu secara bersama-sama untuk memperbaiki dan menyempurnakan produk.

Dengan demikian diharapkan hasil produksi dari pengusaha ini dapat meningkatkan mutu produksinya sehingga menghasilkan produksi yang

bernilai jual tinggi pada akhirnya akan menaikkan pendapatan pengusaha itu sendiri.

Subsektor industri yang merupakan bagian integral sektor industri nasional yang terbesar adalah dari segi kuantitas dan heterogenitasnya. Sub sektor ini banyak menyerap tenaga kerja yang tidak mempunyai lapangan pekerjaan tetap, tenaga kerja keluar dari sektor lain terutama sektor pertanian. Sub sektor ini banyak memberikan penghasilan yang cukup besar sebagian masyarakat. Karena itu kerangka untuk mewujudkan sektor industri yang mempunyai kapabilitas tinggi, mantap dan tangguh bagi perekonomian nasional, menghapuskan adanya perkembangan kemajuan yang serasi, seimbang dan terpadu antar sub sektor industri, maupun antar sektor industri dengan sektor yang berkembang lainnya.

2.6. Kriteria dan Peranan Industri Kecil dan UKM

Pembangunan dan pengembangan industri di Indonesia dinilai sebagai dimensi kembar dengan titik perhatian pada perkembangan pertumbuhan ekonomi kebersamaan dengan pemerataan pendapatan, sehingga sektor industri diharapkan dapat berperan sebagai pemicu tingkat pertumbuhan ekonomi dan sekaligus juga mampu memeratakan perluasan kerja dan pendapatan. Sehingga dengan kriteria dapat dibedakan dan dikelompokkan menjadi bidang ilmu yang mudah untuk dikajin.

Menurut Pasal 5 Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- c. Milik Warga Negara Indonesia;
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
- e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

2. Kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, nilai nominalnya, dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan menurut Tugiman (2001:4) kriteria industri kecil dan UKM adalah :

1. Umumnya bersifat usaha keluarga dengan kriteria posisi kunci dipegang oleh pemilik, keuangan dipegang keluarga dan perusahaan cenderung berbaur, tidak menuntut mekanisme pertanggung jawaban yang ketat, motivasi yang tinggi, dan tidak terdapat spesialisasi dalam manajemen.
2. Menggunakan teknologi sederhana dalam proses produksi.
3. Hasil produksi dipasarkan pada pasar lokal atau dalam negeri.
4. Lemahnya manajemen, permodalan, pemasarannya dan administrasi.
5. Mudah berganti usaha.
6. Umumnya tidak memiliki jaminan yang cukup.
7. Standar industri hanya terbatas lokal.
8. Kebanyakan pemilik asli pribumi.

Hal lain diungkapkan yaitu menurut Kuncoro (1997: 315-316) ciri khas karakteristik industri kecil dan UKM ialah :

1. Tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan industri kecil dikelola dengan oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus sebagai pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekat.
2. Rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri dan sumber-sumber lain seperti keluarga dan kerabat dekatnya.
3. Sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum dipunyainya status badan hukum. Atau belum adanya perijinan yang jelas.
4. Ditinjau dari golongan industri tampak bahwa hampir sepertinya bagian dari seluruh industri kecil bergerak pada kelompok usaha

industri makanan, minuman atau tembakau diikuti oleh kelompok industri barang galian bukan logam, industri tekstil dan industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya termasuk perabotan rumah tangga.

5. Kriteria usaha kecil tersebut menurut UU No. 9 tahun 2005 pasal 5 sebagai berikut :

- Berdasarkan Total Aset paling banyak
- yaitu perusahaan yang memiliki kekayaan bersih sebanyak 200 juta tidak termasuk tanah dan tempat pendirian usaha.
- Berdasarkan total penjualan bersih pertahun.
- Yaitu pengusaha yang mempunyai penghasilan bersih pertahun paling banyak 1 juta.
- Berdasarkan status Kepemilikan
- Yaitu pengusaha yang berbentuk perseorangan, bila berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Usaha ialah suatu unit ekonomi yang melakukan aktifitas dengan tujuan menghasilkan barang dan jasa untuk dijual dan ditukarkan dengan barang lain.
- Milik warga Negara Indonesia

Berdiri sendiri, bukan merupakan anak cabang perusahaan yang dimiliki.

Menurut pasal 1 UU No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil dan UKM adalah :

Ayat 1

Usaha kecil ialah kegiatan ekonomi rakyat bersekala kecil dan memenuhi kriteria bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Ayat 2

Usaha menengah dan usaha besar adalah kegiatan conomi yang mempunyai criteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari pada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil.

Dari pendapat-pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa karakteristik industri kecil ialah masih rendahnya pengelolaan manajemen

yang diketahui dengan tidak adanya pembagian tugas yang jelas, rendahnya akses dalam memperoleh kredit dari lembaga formal serta sebagian besar tidak berbadan hukum dan tidak ada ijin usaha. Sedangkan peranan industri kecil dalam krisis global saat ini sangat penting. Meski banyak kendala dan tantangan yang benar-benar harus dipikirkan keberadaannya selain dapat mengurangi pengangguran juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat lokal dan didesa-desa tempat sentra industri kecil tersebut berada.

Sejarah perekonomian telah ditinjau kembali untuk mengkaji ulang peranan usaha skala kecil dan UKM. Beberapa kesimpulan telah ditarik beberapa hal Pertama, Pertumbuhan ekonomi dunia yang sangat cepat sebagaimana yang terjadi dijepang, telah dikaitkan dengan besaran sektor usaha kecil dan UKM. Kedua, dalam penciptaan lapangan kerja di AS sejak perang dunia kedua sumbangan UKM ternyata tidak bisa diabaikan begitu saja dimasa negara-negara tersebut mulai memperbaiki perekonomiannya industri kecil dan UKM berperan penting sebagai awal tumbuhnya perekonomian negara-negara maju.

Dari beberapa pendapat menyebutkan antara lain :

Menurut Ananta dan Anwar UKM memiliki peran penting dalam tenaga terkaitannya dengan lapangan kerja. Sebagaimana telah diketahui, UKM merupakan suatu bentuk usaha produktif yang memiliki potensi besar dalam penyediaan lapangan kerja meskipun dalam kriterianya disebutkan adanya pembatasan dalam jumlah tenaga kerja untuk dapat digolongkan dalam UKM. Namun dengan mendorong dan pengembangan pertumbuhan UKM untuk dapat meningkatkan produksinya, maka diharapkan potensi tersebut akan terwujud melihat sifat UKM yang menggunakan tenaga kerja manusia, maka sangat intensif dalam penggunaan sumberdaya lokal dalam kaitanya sebagai penyedia lapangan kerja.

Menurut *Wibowo (1996:2)* Peranan industri kecil :

- a. Pertama, sebagai penyerap tenaga kerja

- b. Kedua, ikut menyelenggarakan peredaran perekonomian negara dan mampu hidup berdampingan.
- c. Ketiga, industri dapat memegang peranan penting dalam menopang usaha besar.
- d. Keempat, dapat menyediakan bahan mentah, bahan baku, suku cadang, pembungkus, bahan pembantu lainnya.
- e. Kelima, berfungsi sebagai ujung tombak bagi industri lainnya pun menyalurkan sebagai konsumen pemakai.

Dari pendapat-pendapat diatas, jelas sekali peranan industri kecil dapat berfungsi sebagai upaya peningkatan pendapatan, maka otomatis usaha untuk mencapai tingkat kemakmuran dapat dilihat dari semakin meningkatnya pendapatan nasional.

2.7. Keunggulan dan Kelemahan Industri Kecil

Hal ini dilatarbelakangi oleh tidak menutup kemungkinan bahwa setiap usaha dapat untung maupun dapat juga rugi. Dikarenakan setiap industri maupun usaha membutuhkan suatu persaingan yang dapat memicu terjadinya kerja keras diantara para pelaku usaha.

2.7.1). Kelebihan Industri kecil

Kelebihan dari usaha berbentuk badan usaha ini antara lain :

1. Pemilik sebagai pemilik usaha berhak menentukan laba sendiri maksudnya setiap penjualan atau proses produksi perolehan laba dibuat oleh pemilik sekaligus pengelola usaha.
2. Dalam pengendalian tidak memerlukan yang handal atau pendidikan yang tinggi pengelolaan mulai dari produksi

hingga sampai pemasaran yang dilakukan bersifat sederhana dan dengan seminimal mungkin proses produksi.

3. Resiko beban usaha menjadi kecil yaitu ditanggung oleh pengelola sekaligus pengusaha itu sendiri.

4. Bebas menentukan harga produksi barang dan jasa sendiri artinya pengusaha memiliki modal sendiri digunakan untuk biaya produksi sesuka pengelola sekaligus pemilik usaha.
5. Proses perijinan hukum cukup sederhana karena usaha bersekala kecil jadinya mudah dalam pendirian usaha.
6. Mudah dibubarkan pemilik hal ini terjadi bila pemelilik mengalami kerugian besar dan akan menutup usahanya. Tapi apabila pemilik memiliki modal lagi hal ini bisa membuat jenis usaha yang sama
7. Umumnya mempunyai kemampuan Survive artinya usaha kecil memiliki kemampuan untuk bersaing dan berkembang dalam dunia usaha.
8. Diversifikasi dibuka luas dan lebar diversifikasi diartikan sebagai pembedaan dunia usaha jadi antara usaha satu dengan yang lain diberikan kebebasan kepada para pelaku dunia usaha untuk mendirikan usaha berbeda.
9. Tidak membutuhkan investasi besar mempunyai ketergantungan secara moril yaitu usaha kecil dan UKM termasuk investasi kecil sehingga tidak memiliki resiko besar apabila terjadi kerugian besar hingga kebangkrutan usaha tersebut.

Dinegara-negara berkembang UKM dinilai perlu adanya perhatian besar dari pemerintah karena industri dan UKM menyangkut kepentingan rakyat dan masyarakat banyak. Ada Beberapa keunggulan industri kecil dan UKM terhadap usaha besar antara lain :

- a. Inovasi dalam tehnologi yang telah dengan mudah terjadi pengembangan produk.
- b. Hubungan kemanusiaan yang akrab diantara pengusaha kecil.
- c. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja.
- d. Fleksibilitas dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibandingg dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis.
- e. Terdapatnya dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan.

2.7.2). Kelemahan Industri Kecil dan UKM

Permasalahan yang timbul banyak dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya : permasalahan yang berhubungan dengan faktor menurut Juwaini (1996:15) antara lain :

- a. Kelemahan dalam mempunyai peluang Akses pasar dalam memperbesar pasar
- b. Kelemahan dalam unsur struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur akses sumber-sumber modal.
- c. Kelemahan dibidang organisasi dan manajemen
- d. Keterbatasan dibidang pemanfaatan dan penguasaan teknologi
- e. Keterbatasan jaringan usaha dan kerjasama usaha
- f. Kelemahan dalam mental usaha.

Dapat dipaparkan lagi Serta secara umum yang dihadapi pemerintah mencakup tiga faktor utama yaitu Pertama dari sektor permodalan dalam hal ini pihak infestor mereka dalam Masalah-masalah yang dihadapi industri kecil menurut Tambunan (2002 : 73)

- a. Masalah kesulitan pemasaran
- b. Masalah keterbatasan finansial
- c. Keterbatasan SDM
- d. Maslah bahan baku
- e. Masalah keterbatasan tehnologi.

Diluar masalah klasik seperti permodalan, Tehnologi Sumber Daya Manusia, Pemasaran dan sebagainya pengusaha kecil juga rawan menghadapi masalah-masalah yang bersifat umum menurut Irianto (1996: 18) sekurang-kurangnya ada tujuh permasalahan pokok yang diidentifikasi sebagai penyebab kegagalan pengusaha kecil seperti dibawah ini :

1. Kelalaian (*neglect*)
2. Tindak kecurangan (*fraud*)
3. Tidak memiliki pengalaman dalam bisnis yang dijalankan (*lack of experimen in line*)

4. Pengalaman yang tidak sesuai dengan bisnisnya (*unbalanced Experience*)
5. Tidak berkompeten (*incompetence*)
6. Bencana (*disaster*)

sedangkan menurut Picle dan Abrahamson dalam Irianto (1996: 18) menunjukkan beberapa faktor penyebab yang menjadikan bisnis pengusaha kecil mengalami kegagalan. Ada sembilan faktor seperti berikut antara lain :

1. Kurang pengalaman meliputi :
 - a. *Lack of experience in line*
 - b. *overconcentration of experience*
2. Manajemen kurang kompeten (*incompeten of manajemen*)
3. Posisi bersaing lemah (*weak competitive position*)
4. Tidak memiliki control penyediaan barang yang layak (*lack of proper inventory control*)
5. Kelalaian (*neglect*)
6. Kontrol piutang yang tidak memadai (*inadequate credit control*)
7. Volume penjualan produksi yang rendah (*low sales volume*)
8. Lokasi usaha yang buruk (*poor lokasion*)
9. Bencana alam (*disaster*)

2.8 Pembinaan dan Strategi Pengembangan Industri Kecil

2.8.1). Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan UKM

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan usaha kecil menengah (UKM) dalam jangka panjang adalah bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UKM dalam proses pembangunan nasional khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.

Apabila pemerintah akan melakukan pembinaan UKM secara efektif sebaiknya memusatkan pada 3 kelompok tujuan dari pembinaan UKM ini

adalah untuk menjadikan UKM menjadi usaha besar. Ada dua aspek pembinaan yang harus diperhatikan yaitu :

1. Aspek sumber daya manusia apakah dapat meningkatkan kualitas SDM atas usaha sendiri atau dorongan dari pihak luar.
2. Pengelolaan dalam arti praktek bisnis yang terdiri atas beberapa hal antara lain perencanaan pelaksanaan, dilaksanakan dan pengawasa. (hidayat, 2000) adapun UKM dapat mengadaptasi, menguasai dan mengembangkan tehnologi serta selalu menciptakan inovasi, maka hal tersebut akan memotifasi Usaha UKM dalam pengembangan pemasaran hingga dapat menjadi usaha ekspor yang menjanjikan.

Dibawah ini disajikan tiga model pembinaan UKM Menganut pada sumber-sumber internasional antara lain ;

Pertama. Adalah Model APEC (1995)

Kedua, adalah Model UNDP (1997) dan

Ketiga, Model Singapura (1993) (hidayat, 2000). tiga model tersebut sebagai berikut :

1. Dilingkungan APEC, para menteri yang membidangi UKM dalam pertemuannya pad tahun 1995 telah mengidentifikasi lima pokok penting dalam proses pembinaan dan pengembangan Ukm yakni SDM, Keuangan, Tehnologi, dan Akses pasar Akses informasi.
2. Untuk mendukung Policy dan Regulator UNDP Mengemukakan bahwa diperlukan support service yang terdiri dari tujuh bidang yaitu SDM, advysory service, Keuangan, Akses Pasar, instruktural, Jaringan usaha, asosiasi sektoral dan teknologi.
3. Model selanjutnya adalah singapura berbeda dengan dua diatas ada empat tahap yang akan dilalui UKM yakni : Start-up, growth, expansion,dan going-oveseas. Untuk tiap tahap telah diidentifikasi paket bantuan bagi UKM.

Sedangkan diindonesia pembinaan UKM di Indonesia saat ini perlu adanya pendekatan secara menyeluruh berbagai aspek antara lain pasar, modal, teknologi dan menejemen menyeluruh dan juga manajemen pemasaran.

Menurut Suryana (2001; 43) Strategi Pengembangan UKM dalam menghadapi krisis saat ini adalah dengan teori Recource-based Strategi karena sangat sesuai diterapkan dalam pengembangan UKM Nasional. Strategi ini adalah Strategi yang menggunakan pemanfaatan sumberdaya internal yang superior untuk menciptakan kemampuan inti dalam menciptakan nilai tambah untuk mencapai keunggulan komparatif dan kompetitif. Akibatnya perusahaan kecil tidak lagi tergantung pada strategi kekuatan pasar melalui monopoli dan fasilitas pemerintah. Dalam strategi ini UKM mengarah pada skill khusus secara internal yang bisa menciptakan produk inti yang unggul. Sumber daya perusahaan yang bisa dikembangkan menurut Pandian dkk. (1992; 22) adalah tanah, teknologi, tenaga kerja (kemampuan dan pengetahuannya) modal dan warisan bakat keahlian turun-menurun.

Untuk menciptakan produk yang berdaya saing tinggi maka perlu salah satu strategi dengan memanfaatkan keunggulan komperatif yang dimiliki karena adanya keunggulan dibidang SDA namun hal ini diperlukan pembinaan dari sumberdaya manusia melalui usaha penguasaan iptek untuk itu perlu adanya peningkatan keunggulan komperatif ini yaitu melalui :

1. Memperkuat dalam perdagangan internasional.
2. Menerapkan manajemen yang profesional
3. Secara bertahap mengembangkan penelitian dan pengembangan terapan pada produk-produk yang akan dijual agar meningkatkan daya saing usaha.

2.8.2). Fungsi dan Tujuan Pengembangan

fungsi dari pengembangan tidak lain sebagai awal pemberdayaan masyarakat karena dengan pengembangan dan pembinaan sebagai proses memperbaiki diri sehingga menjadikan masyarakat klaster jaringan yang mandiri dan dapat diandalkan kontribusinya.

Pengembangan bermanfaat untuk membentuk seseorang dalam mengenal hambatan-hambatan yang ada, baik yang datang dari luar maupun dari dalam orang itu sendiri, sehingga dapat dicari pemecahan yang terbaik.

Lebih lanjut bila pembinaan berjalan baik maka dapat membantu orang yang menjalankannya untuk dapat :

1. Melihat diri dan pelaksanaan hidup serta kerjanya.
2. Menganalisa situasi hidup kerjanya dari segala segi positif dan negatifnya.
3. Menentukan masalah hidup dan masalah dalam kerja.
4. Menemukan bidang hal dan kerja yang sebaiknya diubah dan diperbaiki.
5. Merencanakan sasaran dari program dibidang hidup dan kerjanya setelah mengikuti pembinaan.

Jadi pembinaan dan pengembangan membantu orang itu untuk mengenal hambatan-hambatan baik yang ada didalam maupun diluar hidup dn kerjanya dan juga dapat melihat segi-segi positif dan menemukan pemecahannya. disamping itu juga dapat menimbulkan motivasi atau dorongan dalam melaksanakan salah satu cara yang terbaik dalam mencapai tujuan dan sasaran hidupnya. Adapun tujuan dari pengembangan dan pembinaan dalam hal ini adalah organisasi menurut Thoha (1989:25) adalah:

Untuk meningkatkan kepercayaan dan dukungan diantara anggota organisasi untuk meningkatkan kesadaran berkonfrontasi dengan masalah-masalah organisasi, baik dalam kelompok maupun di antara anggota kelompok, meningkatkan suatu lingkungan kewenangan dalam tugas yang didasarkan atas pengetahuan dan keterampilan dengan demikian hakekat pengembangan dan pembinaan adalah merupakan suatu hal yang positif dari serangkaian sistem dan prosedur yang memuat program-program pembaharuan secara menyeluruh, baik idividu maupun instansi yang bersangkutan dimana individu tersebut bekerja. Disamping itu pengembangan juga dapat mempengaruhi perilaku yang dibina dan selanjutnya akan dapat bekerja lebih baik secara mencapai tujuan-tujuan dalam bekerja.

Maka tujuan-tujuan dalam bekerja. Maka tujuan pembinaan industri kecil pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan pengusaha industri yang

tanggung yang memiliki usaha yang efisien, sehat dan mandiri, juga mampu menjadi unsur kekuatan ekonomi rakyat yang memberikan sumbangan besar bagi pembangunan ekonomi nasional.

2.8.3) Pengembangan Industri kecil Menurut UU NO. 9 Tahun 1995 dan PP NO. 32 TAHUN 1998.

Menurut (PP 32 Tahun 1998) Pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.

Upaya penumbuhan kemampuan dan ketangguhan usaha kecil yang memiliki jumlah besar dan terbesar luas di seluruh tanah air, merupakan kegiatan yang tak dapat dipisahkan dari upaya menumbuhkan kemampuan, ketangguhan dan ketahanan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Kenyataannya menunjukkan, bahwa usaha kecil yang terdiri dari antara lain usaha kecil pemula, usaha kecil yang belum layak usaha, usaha kerajinan rumah tangga, nelayan, dan petani tersebut, yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, belum mampu memupuk modal sendiri atau memanfaatkan sumber permodalan yang ada, memanfaatkan peluang pasar, menata organisasi dan manajemen, apalagi menguasai teknologi. Didasari bersama bahwa usaha kecil merupakan bagian integral dari usaha nasional sehingga perkembangan usaha kecil mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan pembangunan nasional, oleh karena itu peranan usaha kecil dalam kegiatan pembangunan sosial ekonomi bangsa harus terus ditingkatkan.

Di dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, telah ditentukan bahwa usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memiliki kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) serta

kepemilikannyapun telah ditetapkan pula dalam pasal 5 Undang-undang Usaha Kecil, adalah harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Kegiatan dan kebijaksanaan pemerintah yang telah dilaksanakan dalam upaya meningkatkan peran usaha kecil sesuai dengan kegiatan usahanya yang terdapat diberbagai sektor, misalnya sektor pertanian, peternakan, pertambangan, perindustrian, belum terlaksana secara optimal dan terpadu. Dalam pelaksanaan program pembinaan usaha kecil. seakan-akan masing-masing pembina sesuai sektornya berjalan sendiri-sendiri, kurang terkoordinasi sehingga efektivitas pembinaan masih perlu ditingkatkan.

Tidak adanya perlakuan tambahan di bidang perpajakan atau dalam rangka perolehan perizinan, atau permodalan yang tidak mendukung, merupakan kendala bagi usaha kecil, sehingga sulit berkembang. Apabila dilihat dari peningkatan produk, pemasaran, sumber daya manusia atau teknologi usaha kecil, kemampuan dan peran serta usaha kecil pada kenyataannya masih jauh ketinggalan bila dibandingkan dengan peningkatan kegiatan usaha menengah atau usaha besar.

Oleh karena itu, diperlukan satu petunjuk yang disusun secara lengkap dan teratur dalam satu peraturan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha kecil. Sasaran umum pembinaan dan pengembangan tersebut adalah terwujudnya usaha kecil menjadi usaha dan gerakan ekonomi rakyat yang lebih tangguh dan mandiri serta memiliki daya saing tinggi serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.

Dan proses Pembinaan dan Pengembangan oleh pemerintah Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat merupakan langkah awal untuk mewujudkan perekonomian bagi masyarakat dan pemerintah adapun pengembangan dan pembinaan itu mencakup 4 bidang aspek yaitu antara lain : Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil dalam bidang:

- a. Produksi dan pengolahan;
- b. Pemasaran;
- c. Sumber daya manusia; dan
- d. Teknologi.

Pasal 15

Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dengan:

- a. meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan;
- b. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan;
- c. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan.

Pasal 16

Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang pemasaran, baik di dalam maupun di luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dengan:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- c. menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji coba pasar;
- d. mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi;
- e. memasarkan produk Usaha Kecil.

Pasal 17

Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dengan:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial;
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan, dan konsultasi Usaha Kecil;
3. menyediakan tenaga penyuluh dan konsultan Usaha Kecil.

Pasal 18

Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dengan:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang teknologi produksi dan pengendalian mutu.
- b. meningkatkan kemampuan di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru.
- d. memberi insentif kepada Usaha Kecil yang menerapkan teknologi baru dan melestarikan lingkungan hidup.
- e. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi.
- f. meningkatkan kemampuan memenuhi standardisasi teknologi.
- g. menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penelitian dan pengembangan di bidang desain dan teknologi bagi Usaha Kecil.

2.5.c) Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pembinaan dan pengembangan industri kecil

Hal ini dapat diperoleh dari sumber hasil analisa pada beberapa segi sedangkan menurut ahli Soekarno (1986: 4) faktor-faktor yang menjadi permasalahan dalam pengembangan industri secara umum antar lain disebabkan oleh :

1. Men (Manusia)
2. Methods (Metode)
3. Money (Uang)
4. Macines (Mesin)
5. Market (Pasar)
6. Material (Bahan Baku)

Dimana keenam unsur mengenai permasalahan dalam pengembangan industri kecil dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Faktor Manusia (*men*)

Manusia yang berperan sebagai penggerak dan Tenaga kerja pada industri kecil sebagian besar tidak memiliki pendidikan dan keterampilan yang

memadai, sehingga mereka menjalankan industri ini apa adanya dan kadang terkesan kurang perhitungan dalam pengembangan industrinya.

2. Faktor Metode (*methods*)

dari hasil pengamatan, industri-industri yang ada saat ini masih banyak menggunakan metode proses produksi sederhana dan tidak didukung dengan suatu sistem manajemen yang baik, sehingga tidak dapat diperoleh hasil yang optimal.

3. Faktor Uang (*money*) atau Modal

selain keterampilan dan metode proses produksi, faktor modal juga menjadi kendala utama dalam pengembangan industri. Banyak industri kecil yang mati dan bangkrut karena tidak adanya modal serta sulitnya mencari kredit untuk usaha.

4. Faktor Mesin (*machines*)

Faktor ini juga erat kaitannya dengan teknologi industri kecil yang ada sekarang sebagian besar masih menggunakan alat-alat tradisional, meski tidak semuanya namun, prosesnya kurang efisien dan kualitas barang yang masih rendah dan hal ini yang menyebabkan mereka kalah bersaing dalam pasar industri.

5. Faktor Pemasaran (*market*)

Faktor ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan menentukan sekali proses industri, baik itu industri besar, industri sedang maupun industri kecil. Karena proses produksi tidak akan sama sekali, jika produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan.

6. Faktor bahan Baku (*material*)

Setiap perusahaan industri tentu melakukan produksi dan memerlukan bahan mentah atau bahan baku sebagai alat untuk menciptakan barang produksi yang bernilai tinggi.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu berawal pada data dan bermuara pada kesimpulan (*Bungin, 2001: 18*). Sasaran atau obyek penelitian dibatasi agar data yang diambil dapat digali sebanyak mungkin serta agar penelitian ini tidak dimungkinkan adanya pelebaran obyek penelitian, oleh karena itu, maka kredibilitas dari peneliti sendiri menentukan kualitas dari penelitian ini (*Bungin, 2001: 26*)

Penelitian ini juga menginterpretasikan atau dengan bahasa peneliti tentang hasil penelitian yang diperoleh dari informan dilapangan sebagai wacana untuk mendapat penjelasan tentang kondisi yang ada.

Dalam penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian Diskriptif, yaitu jenis penelitian yang hanya menggambarkan, meringkas berbagai kondisi dan situasi yang ada, Penulis mencoba menjabarkan kondisi konkrit dari obyek penelitian dan menghubungkan variabel-variabel dan selanjutnya akan dihasilkan diskripsi tentang obyek penelitian. Penelitian pada dasarnya mempunyai tujuan-tujuan yang menggunakan cara-cara tertentu untuk memahami suatu objek yang ada. Uraian yang jelas dan sistematis atas data yang dilakukan diharapkan memberikan hasil yang maksimal sehingga dapat dikategorikan sebagai tulisan yang menggunakan nilai ilmiah.

Awal adanya penelitian adalah adanya suatu masalah atau fenomena kejadian yang tidak biasa didalam masyarakat dan dibutuhkan suatu usaha untuk dapat memecahkan masalah tersebut. Setelah itu dilakukan kajian dan analisis data dengan sumber data yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif kesimpulan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam penelitian sehingga proses analisis bertujuan untuk memperoleh hasil akhir.

Maksud penelitian sebagaimana dijelaskan oleh Kuncoroningrat (1981 : 22). adalah suatu usaha untuk dengan suatu usaha pijakan gejala-gejala tadi berdasarkan metodologi tadi dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa penelitian merupakan gejala secara sadar dilakukan dengan tujuan untuk menetapkan gejala-gejala yang ada dijadikan dasar untuk penyelesaian suatu masalah tersebut. Penelitian yang dilakukan digolongkan dengan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Pendapat lain tentang Penelitian Deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas sesuatu keadaan sejernih mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti.

Menurut Bog dan Taylor yang dimaksud dengan penelitian Deskriptif Kualitatif adalah Penelitian yang menghasilkan data Deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang individu atau organisasi tersebut secara utuh.

Jadi dalam kesimpulan yang dapat diambil tentang penelitian dengan menggunakan, penggambaran atas suatu fenomena yang akan diperhatikan dalam uraian sistematis, faktual, akurat jelas dan bisa berkaitan dengan hubungan yang timbul antara satu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.

3.2 Fokus Penelitian.

Penelitian Kualitatif menghendaki batas dalam penelitiannya dengan kata lain dalam penelitian ini fokus sangat penting artinya bahwa untuk menentukan batas penelitian yang akan dilakukan sehingga akan mempertegas batasan dan mempertajam pemahaman atas suatu masalah dan fenomena penelitian yang akan diteliti. fokus penelitian berhubungan dengan :

1. Upaya pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengembangan industri mebel dan kayu dikota Pasuruan.
 - a. Pembinaan dan pengembangan bidang Produksi dan Pengolahan
 - b. Pembinaan dan pengembangan bidang Pemasaran.
 - c. Pembinaan dan pengembangan bidang Sumber daya Manusia (SDM).
 - d. Pembinaan dan pengembangan bidang Teknologi
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan industri mebel dan kayu kota Pasuruan.

3.3. Lokasi dan Situs Penelitian

Pengertian dari Lokasi Penelitian ialah tempat dimana penelitian dilakukan berkaitan dengan hal ini maka penelitian ini berada dalam ruang lingkup yang dibatasi atas daerah atau wilayah.

Lokasi penelitian ini berada dilingkup Kota Pasuruan khususnya di industri mebel dan kayu alasan peneliti mengambil lokasi tersebut pertama karena peneliti melihat industri mebel ini merupakan salah satu unggulan dari Kota Pasuruan melihat potensi yang besar dan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah Kota Pasuruan dan kedua karena industri ini merupakan salah satu industri mebel terbesar di Jawa Timur untuk itu perlu adanya pengembangan pengkajian.

Situs Penelitian adalah tempat dan peristiwa dimana peneliti dapat mengawasi suatu kasus atau masalah yang diteliti. Berkaitan dengan hal itu peneliti mengambil Situs penelitian sebagai berikut :

1. Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Pasuruan sebagai unsur daerah pelaksana teknis daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dalam pengembangan industri.
2. Sampel usaha industri antara lain para pelaku industri itu sendiri seperti : Pedagang mebel, para pengrajin kayu dan mebel para pekerja yang berperan didalam sektor ini dan para konsumen sebagai pemakai.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data ialah subyek dimana data diperoleh. Untuk memperoleh data yang baik tentu harus ditunjang oleh data yang akurat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki data tersebut harus dapat digali dari sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. dalam hal ini penelitian menggali dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Jenis data primer merupakan asal diperoleh data secara langsung dari sumbernya. Yang menjadi sumber data primer yaitu :

1. Kepala Dinas bidang koperasi dan UKM Kota Pasuruan.

2. Kepala seksi bina usaha dan perkoperasian Kota Pasuruan.
3. Para pelaku usaha mebel dan kayu di wilayah itu.
4. Konsumen sebagai pemakai barang-barang produksi.

2. Sumber Data Sekunder

Ialah data yang telah dikumpulkan, disajikan dilaporkan atau disusun oleh pihak lain selain peneliti pada saat ini. Data ini relevan dengan fokus penelitian, sumber data sekunder ialah berupa arsip atau dokumen yang terdapat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan. BPS kota Pasuruan dan Juga lembaga tehnik industri mebel dan kayu di Kota Pasuruan. Berupa dokumen-dokumen, Laporan laporan dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.5 .Tehnik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan pembuatan laporan penelitian beberapa tehnik metode yang dilakukan oleh peneliti dan disesuaikan dengan jenis penelitian kualitatif yaitu :

3.5.1) Wawancara

Menurut *Lexy J Moleong (1991:135)* dijelaskan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (face to face) untuk mendapatkan informasi secara lesan. Dan peneliti memakai dua jenis wawancara yaitu :

- a. Wawancara berstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara sistematis.

Wawancara ini ditujukan kepada pertama, kepala Dinas perindustrian dan perdagangan Kota Pasuruan dan kedua, kepada sub bagian bidang UKM industri mebel dan kayu.

- b. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lebih luas dan leluasa tanpa terikat. Wawancara ini digunakan peneliti ketika dilakukan observasi dilingkungan industri mebel dan kayu karena wawancara bersifat informal dengan para pengrajin dan pelaku usaha yang ada dalam industri mebel dan kayu.

3.5.2) Observasi

Yaitu kegiatan pengamatan langsung Observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan sifat penelitian karena disebut pengamatan terlibat, observasi dilakukan peneliti untuk memperoleh sumber data asli secara langsung baik dari lingkungan Dinas maupun lingkungan industri mebel dan kayu sendiri. Sesuai pendapatnya Faisal (1990: 78), dalam metode observasi ini peneliti memilih jenis Observasi yaitu :

Observasi Partisipatif adalah observasi yang sekaligus melibatkan peneliti dilakukan untuk berhubungan langsung dengan sumber data dan kondisi yang ada dilapangan. Observasi dilakukan dilingkungan industri mebel dan kayu dan dalam Dinas baik rencana kerja dan perhatian terhadap topik ini dilakukan dengan mencatat ngamati serta menyimpulkan yang akan dikaji dalam penelitian. Observasi ditujukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya proses pembuatan mebel mulai dari produksi hingga pemasaran produk mebel. Dan peran Dinas perindustrian dalam upaya pengembangan industri kecil

3.5.3) Dokumentasi

Penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan membuat salinan dan mengadakan arsip-arsip serta catatan-catatan perusahaan yang diperlukan dalam penelitian ini, juga dengan Dokumen-dokumen yang ada dipelajari untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini. Dokumen tersebut meliputi laporan dan atau berbagai artikel dari majalah, koran atau jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk mendapatkan data sekunder

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat untuk mengumpulkan data Kountur (2004, 113). Sehingga satu satunya instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. *Bungin (2001: 71)* karena peneliti sebagai pengumpul data

yang mempengaruhi terhadap faktor instrumen.yang menjadi instrumen dalam penelitian adalah sebagai upaya pengumpulan data adalah :

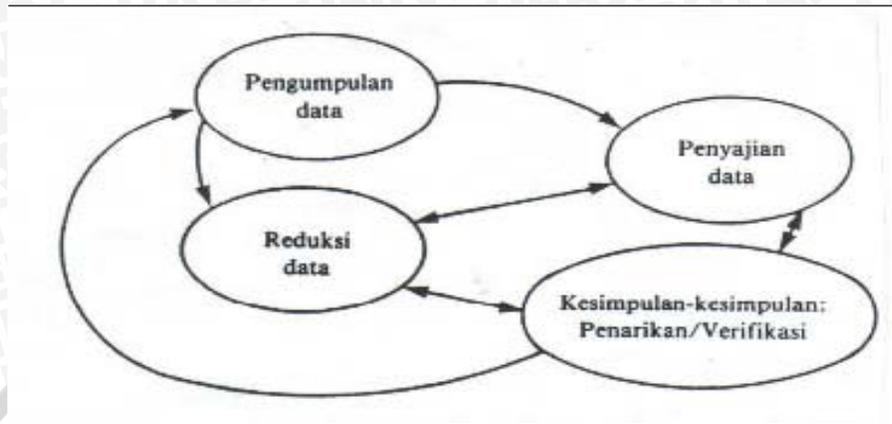
1. Peneliti sendiri yaitu dimana peneliti yang dapat menangkap serta mengolah setiap fenomena yang terjadi dengan masalah yang diteliti sehingga diperoleh kesimpulan dari penelitian.
2. Daftar pedoman wawancara yang mana digunakan sebagai kerangka dan dasar dalam wawancara atau mengajukan pertanyaan pada narasumber yang berkaitan dengan penelitian.
3. Alat-alat tulis untuk mencatat hasil wawancara serta sewaktu-waktu menyaksikan suatu kejadian selama dalam penelitian.

3.7 Analisis Data

Menurut *Maleong (2004 : 103)* analisis data adalah proses mengatur urutan data mengorganisasikan kedalam suatu pola kategori dari suatu uraian dasar. Dalam buku yang sama Bogan Taylor mendefinisikan analisis data sebagai proses merinci data secara formal untuk menentukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai bantuan pada data dan hipotesis itu. Data-data yang sudah terkumpul maka digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti tersebut.

Dari data tersebut penelitian berusaha menganalisis supaya dapat ditarik kesimpulan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis diskriptif kualitatif. Karena ditandai hanya dibatasi oleh prosentase yang selanjutnya menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan menjelaskan dan menguraikan secara sistematis dan mendalam tentang keadaan yang sebenarnya.

Gambar 1
Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif



Sumber : Matthew B. Miles dan Michael A. Hubberman, Metode Penelitian Kualitatif, UI Press, Jakarta, 1992, hal. 20

Menurut Miles dan Huberman (1992 : 160) langkah-langkah untuk memproses analisis data yakni dengan menggambarkan dan mendiskripsikan data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data adalah proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyerderhanaan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Kegiatan ini dimulai sejak awal pengumpulan data sampai pada laporan akhir merupakan bentuk analisis yang menajamkan dan mengarahkan dan membuang yang tidak perlu serta mengorganisasikan data sehingga akhirnya dapat ditarik dan diesensikan.
2. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan bentuknya dapat diikuti gambaran atau skema dan beberapa tabel yang dirancang untuk dapat menyusun agar dapat dimengerti.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah membuat kesimpulan terhadap data yang diperoleh sedangkan verifikasi merupakan tinjauan ulang pada catatan yang ada dilapangan. Data yang diperoleh sedemikian rupa dilakukan analisis data tersebut untuk memperoleh hasil yang sebenarnya.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PENYAJIAN DATA

4.1. Gambaran Umum Kota Pasuruan

4.1 a). Letak Geografis Kota Pasuruan

Gambar 1

Peta Kota Pasuruan



(Sumber : Internet Google.com 2005)

Kota Pasuruan adalah ibu kota Pasuruan, Jawa Timur, Kota Pasuruan terletak ditengah – tengah Kabupaten Pasuruan,

Lokasi Kota Pasuruan yang berada di garis khatulistiwa mempunyai perubahan iklim sebanyak dua jenis, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Bulan Oktober sampai April merupakan musim penghujan, sedangkan bulan Mei sampai September merupakan musim kemarau Dengan Luas 36,58 m2 Kota Pasuruan terdiri dari 81.313 penduduk laki - laki dan 84.679 penduduk perempuan yang tersebar dalam 3 (tiga). Kecamatan yaitu Kecamatan Purworejo, Kecamatan Gading Rejo dan kecamatan Bugul Kidul. Penduduk Kota Pasuruan yang mayoritas beragam Islam, terdiri dari beberapa etnis, dengan berbagai macam mata pencaharian antara lain, nelayan, pedagang, Pegawai dan beberapa sektor non formal.

Orientasi Wilayah

Kota Pasuruan memiliki wilayah seluas 35,29 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 158.864 jiwa (Sensus Penduduk 2000). Kota Pasuruan di sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kraton dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan. Luas wilayah Kota Pasuruan 35,92 Km².

Secara administratif, Kota Pasuruan ini terbagi menjadi tiga kecamatan dan 34 Kelurahan. Kota Pasuruan memiliki jumlah penduduk 158.864 jiwa (sensus penduduk 2000). Kota Pasuruan pada tahun 2006 memiliki beberapa komoditi unggulan disektor perkebunan. Komoditi yang dihasilkannya antara lain, berupa kelapa dalam sebesar 57 ton dan jambu mete sebesar 1 ton. Di lihat dari segi ekonomi, total nilai PDRB yang dicapai Kota Pasuruan pada tahun 2006 sebesar 1.359.672.142 (dalam jutaan rupiah) dengan kontribusi terbesar datang dari sektor perdagangan, hotel, sektor angkutan atau komunikasi dan dari sektor jasa.

Denyut nadi perekonomian Kota Pasuruan lebih didominasi sektor industri karena areal pertanian dan perkebunan yang relatif lebih sempit dibandingkan dengan kabupaten Pasuruan. Berbagai jenis industri kecil memang banyak berkembang , mulai dari jenis furniture, kerajinan kayu, suku cadang atau komponen mesin disel, suku cadang kendaraan perahu bermotor, hingga industri kecil cor dan logam. Industri mebel juga lebih dominan di Pasuruan sehingga Kota pasuruan juga lebih dikenal dengan mebelnya.

Wilayahnya terdiri dari 3 kecamatan, 19 kelurahan dan 15 desa. Tiga kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Purworejo, dan Kecamatan Bugulkidul. Kecamatan Bugulkidul memiliki wilayah terbesar (16,24 km²), sedang untuk Gadingrejo dan Purworejo masing-masing 10,46 km² dan 8,59 km². Kota Pasuruan merupakan wilayah datar, melandai dari selatan ke utara dengan kemiringan 0-1%, berada pada ketinggian 0-10 m di atas permukaan air laut, disebelah utara terdapat bagian yang agak cekung sehingga pembuangan airnya terlambat.

Wilayah Kota Pasuruan merupakan dataran *aluvium* dari campuran bahan endapan yang berasal dari daerah tufvulkanis intermedier Pegunungan Tengger di sebelah selatan bukit lipatan dan Pasuruan endapan berkapur Raci di bagian barat dan Grati di bagian timur.

Mengenai kondisi eksisting penggunaan tanah di Kota Pasuruan :

Luas kawasan terbangun 953,74 Ha atau sebesar 55 % dari luas wilayah

4.1 2). Keadaan Penduduk Kota Pasuruan

Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Tabel 2
**JUMLAH, PERKEMBANGAN DAN KEPADATAN
PENDUDUK TAHUN 2001**

| No | Kecamatan | Rata-rata | Pertumbuhan | Sex rasio | |
|---------------|--------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 1 | Gadingrejo | 10,46 | 55.61 | 96,21 | |
| 2 | Purworejo | 8,59 | 57.25 | 95,21 | |
| 3 | Bungul Kidul | 16,24 | 46,93 | 94,57 | |
| Jumlah | | 35,29 | 159.796 | 4528 0,59 | 95,37 |

Sumber : Kota Pasuruan dalam Angka 2001

Dari data kependudukan di atas maka Kota Pasuruan dapat digolongkan kepada Kelas Kota Sedang, dimana berdasar kriteria BPS mengenai kelas kota, Kota Sedang adalah Kota dengan jumlah penduduk antara 100.000 sampai 500.000 jiwa dijelaskan pula BPS menggolongkan Kota Pasuruan dianalisis berhubungan dengan :

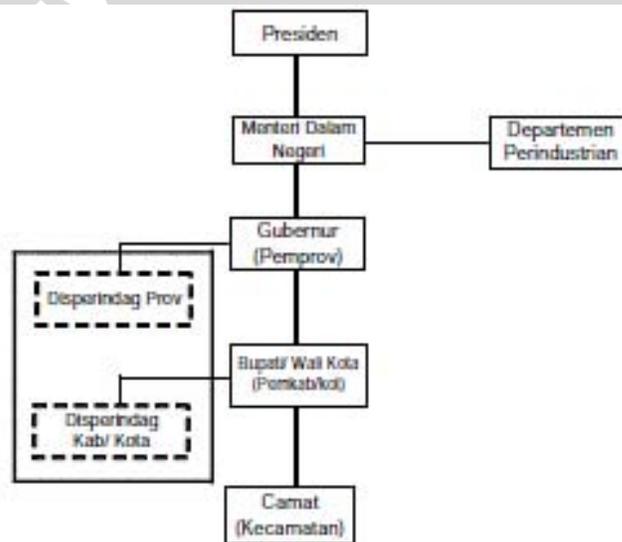
1. Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun : 0,59%
2. Jumlah KK : 35.708
3. Sektor andalan/potensi daerah : Industri meubel dan logam
4. Mata pencaharian : Pertanian : 60125 jiwa
 Industri : 19.970 jiwa

- Listrik : 158 jiwa
- Konstruksi : 1.290 jiwa
- Perdagangan : 22.917 jiwa
- Angkutan : 5.132 jiwa
- Keuangan : 1.106 jiwa
- Jasa-jasa : 11.887 jiwa

4.2. Gambaran umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pasuruan

4.2 a). Posisi dan Kedudukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Gambar 3



Gambar 3-2 Hubungan pemerintahan dalam pengembangan IKM sebelum dan setelah otonomi daerah

(Sumber : internet Google.com 2005)

• Disperindag

Sebelumnya berada dibawah Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan, tapi dengan adanya otonomi daerah, maka tahun 2001 menjadi bagian dari Pemerintah Daerah. Melaksanakan pengembangan perindustrian dan perdagangan di dalam provinsi secara keseluruhan. Sasarannya adalah

industri kecil, menengah dan besar. Tapi untuk bantuan teknologi, mereka bekerja sama dengan Program Dinas lainnya.

- Dinas Koperasi dan UKM

Sasarannya adalah industri mikro dan kecil. Tugas utamanya adalah pembentukan koperasi industri kecil dan bantuan kegiatannya.

- Dinas dibawah Departemen Dalam Negeri

Tugas utamanya adalah pembangunan pedesaan.

Disperindag merupakan dinas yang menangani pengembangan IKM industri pengolahan, dan melaksanakan kegiatannya dengan arah yaitu “Membangun UKM untuk pengentasan kemiskinan”.

Mereka memiliki fungsi seperti dibawah ini:

- 1). Membuat rencana pengembangan di bidang perindustrian dan perdagangan
- 2). Membantu sarana dan prasarana untuk industri.
- 3). Membantu membangun produk industri dan membantu menangani masalah lingkungan pabrik.
- 4). Memajukan perdagangan dalam negeri.
- 5). Memajukan dan membantu ekspor impor.
- 6). Membantu kegiatan bidang metrologi.
- 7). Pengujian dan sertifikasi kualitas produk.
- 8). Berbagai bantuan pada bidang perindustrian dan perdagangan.
- 9). Bantuan kerjasama antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota dalam bidang perindustrian dan perdagangan.
- 10). Pembinaan dan pengelolaan UPT.

Dari penjelasan gambar diatas dapat diketahui posisi dan kedudukan dinas perindustrian dan perdagangan dalam struktur organisasi pemerintah pusat secara vertikal yang baru setelah otonomi daerah bahwa dinas perindustrian pusat memiliki obyek-obyek tertentu yang termasuk dalam kajian dan pengelolaan dan juga sebaliknya dinas Perindustrian Kota atau kabupaten. meski pemisah antara kedua wilayah itu kadang tidak selalu jelas. Didalam otonomi daerah, untuk pengembangan IKM di dalam provinsi.

Hubungan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota tidak selalu jelas. Tapi skala perusahaan yang menjadi sasaran utamanya

adalah seperti pada daerah yang berwarna biru (nilai investasi Rp 1 miliar – Rp 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan) merupakan wilayah kerja utama dinas Provinsi. Sedangkan daerah yang berwarna oranye (nilai investasi Rp 1 miliar kebawah, tidak termasuk tanah dan bangunan) merupakan wilayah kerja utama dinas Kabupaten/ Kota. Dan menurut Disperindag Provinsi, sasaran utama mereka adalah perusahaan diseluruh daerah di dalam provinsi Jawa Timur. Untuk itu, setiap kali mereka perlu memberitahukan kepada Dinas di Kabupaten/ Kota di daerah tersebut. Adapun klasifikasi berdasarkan :

Gambar 4



Gambar 3-6 Wilayah kegiatan Dinas Provinsi dan Kab/ Kota

Dan, pembagian skala perusahaan menurut nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan, adalah perusahaan besar, menengah, dan kecil, seperti dibawah ini:

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Perusahaan besar: | Rp 10 miliar keatas |
| Perusahaan menengah: | Rp 200 juta – Rp 10 miliar |
| Perusahaan kecil (termasuk mikro): | Rp 200 juta kebawah |

(Sumber : Internet Google.com 2005)

Dan pembagian skala perusahaan menurut nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan dan perusahaan besar, menengah dan kecil seperti dibawah ini :

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Perusahaan besar | : Rp 10 Milyar keatas |
| Perusahaan sedang | : Rp 200 Juta – Rp 10 Milyar |
| Perusahaan Kecil | : Rp 200 Juta keatas |

Sebelum menyajikan data dan analisis tentu penulis mencoba membahas tentang gambaran umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan sebagai salah satu tempat penelitian gambaran ini meliputi ditetapkananya kedudukan, tugas, fungsi dan susunan tata kerja serta keadaan komposisi pegawai dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan

Kedudukan tugas pokok dan fungsi

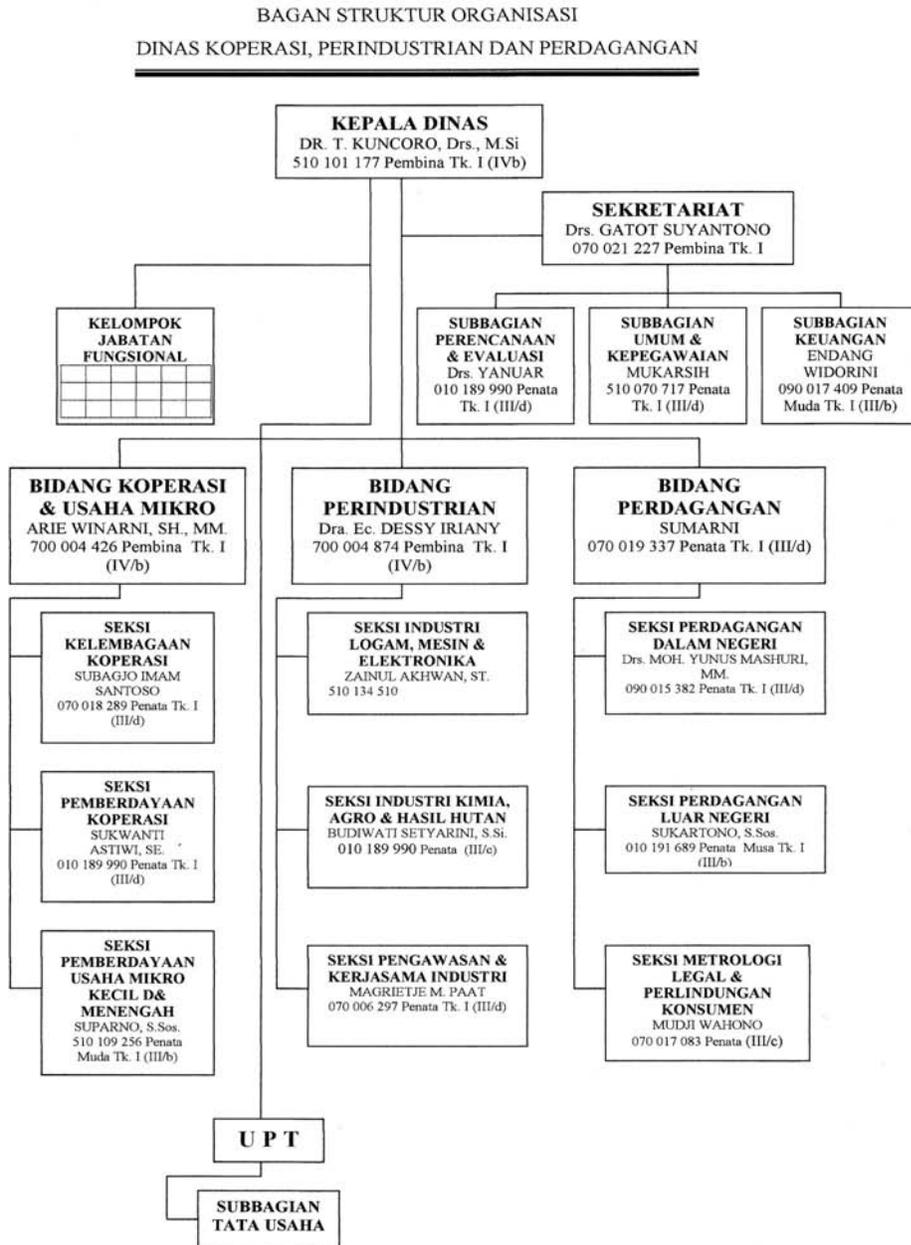
a. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan usaha pemerintah daerah dibidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

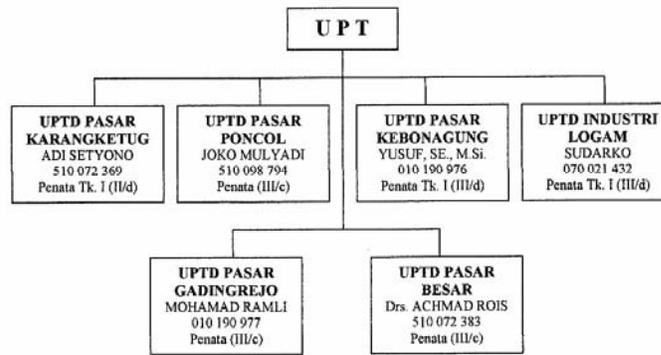
b. Fungsi :

1. Penyusunan perencanaan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil menengah, perindustrian dan perdagangan.
2. Perumusan kebijakan teknis bidang koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan.
3. Mengembangkan perdagangan dalam negeri dan luar negeri melalui pengendalian usaha dan akses pasar.
4. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang koperasi, usaha dan permodalan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.
5. Pelaksanaan kegiatan penata usahaan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan.
6. Pembinaan terhadap unit pelaksana Teknis Koperasi Perindustrian dan Perdagangan.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan Fungsinya.

4.2 1). Struktur dan Tata kerja Organisasi

Gambar 5
Bagan struktur organisasi





(Sumber : Data Disperindag tahun 2009)

Struktur organisasi adalah kerangka yang menunjukkan hubungan-hubungan antara pejabat maupun bidang-bidang kerja satu sama lain sehingga terlihat kejelasan fungsi dan tanggung jawab. Menurut perda struktur terdiri dari :

a. Kepala

Dinas mempunyai tugas sebagai memimpin, merencanakan, dan membina melakukan koordinasi, merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta pengawasan dan pengendalian teknis bidang perindustrian perdagangan dan mempunyai tugas mengoordinasikan dan memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas serta mengadakan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat.

b. Sekretariat :

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan penyusunan perencanaan.
2. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian.

3. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.
4. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan.
5. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja.
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Perindustrian

Melaksanakan persiapan, pemberian bimbingan secara teknis kepada kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana dan usaha perdagangan pengadaan dan penyaluran ekspor import serta pengawasan dan evaluasi kegiatan bidang perdagangan. Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan teknologi industri, pengembangan industri kecil dan menengah, pengembangan sarana dan prasarana industri serta pengawasan dan kerjasama industri;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan bidang perindustrian.
2. Perumusan kebijakan teknis dalam pengembangan teknologi industri, pengembangan industri kecil dan menengah sarana dan prasarana industri, keterkaitan industri hulu hilir dalam penguatan kelengkapan struktur industri serta pengawasan dan kerjasama industri.
3. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pengembangan teknologi industri, pengembangan industri kecil dan menengah sarana dan prasarana industri, keterkaitan industri hulu hilir dalam penguatan kelengkapan struktur industri serta pengawasan dan kerjasama industri.
4. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dalam pengembangan teknologi industri, pengembangan industri kecil dan menengah sarana dan prasarana industri, keterkaitan industri hulu hilir dalam penguatan kelengkapan struktur industri serta pengawasan dan kerjasama industri.

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan dan tata laksana, pengembangan sumber daya manusia serta pengawasan dan pengendalian koperasi, kebijakan teknis pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan kelembagaan dan tata laksana, pengembangan sumber daya manusia serta pengawasan dan pengendalian koperasi, kebijakan teknis pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.
3. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi kelembagaan dan tata laksana, pengembangan sumber daya manusia serta pengawasan dan pengendalian koperasi, kebijakan teknis pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.
4. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan tata laksana, pengembangan sumber daya manusia serta pengawasan dan pengendalian koperasi, kebijakan teknis pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. UPT Pasar

1. Melaksanakan pengawasan dan pemungutan retribusi harian dan bulanan.
2. Melaksanakan pembukuan setoran pendapatan retribusi dan pembuatan laporan bulanan.

3. Melaksanakan pengelolaan karcis retribusi dan menyetorkan pendapatan retribusi
4. Melaksanakan pengawasan pembersihan sampah dan keamanan pasar
5. Melaksanakan pembinaan petugas kebersihan dan pemungutan retribusi dan pedagang
6. Mengatur dan mengawasi Pedagang Kaki Lima (PKL) tetap
7. Menginventarisir dan mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana pasar
8. Melaksanakan pendataan pedagang
9. Melaksanakan penatausahaan UPT
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

UPT Industri

- a. Menyusun rencana kerja UPT
- b. Melaksanakan pelayanan jasa industri logam pada jenis-jenis pekerjaan pengecoran, machining, pengeboran, rolling, pemotongan, las, dan pekerjaan lain yang utilitasnya tersedia
- c. Melaksanakan pemeliharaan mesin-mesin produksi dan aset UPT lainnya
- d. Menerima dan menyetorkan hasil jasa dari pemanfaatan aset UPT kepada bendahara penerima
melaksanakan penata usahaan UPT
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Tata usaha

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum kepegawain keuangan perlengkapan dan penyusunan program2 sedangkan fungsi dari bagian tata usaha adalah :

1. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan dinas

2. Mengkoordinasi penyusunan evaluasi hasil kegiatan dan laporan program secara rutin dan berkala.
3. Penyusunan anggaran dan laporan pertanggung jawaban

4.2.3 Kondisi pegawai danKelembagaan dinas perindustrian

pada saat dilakukanya penelitian ini dinas perdagangan kota pasuruab dalam melaksanakan tugas pekerjaannya memiliki jumlah pegawai secara keseluruhan adapun secara rinci komposisi pegawai pada dinas diklasifikasi sebagai berikut



4.3. Perkembangan dan Pembinaan industri kecil Kota Pasuruan

4.3.1 Perkembangan Unit Usaha

Contoh Unit Usaha Perdagangan

INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

"UD. KRAMAT JATI"

KELURAHAN PETAHUNAN, KECAMATAN GADINGREJO

a. LATAR BELAKANG.

Kebijakan pembangunan sector industri telah memberikan kontribusi yang besar terhadap daerah.

Melalui pembangunan sector industri memberikan dampak terhadap perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan nilai produksi, peningkatan daya saing industri peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta penguatan teknologi yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu industri kecil menengah yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dan hasil produksinya merupakan salah satu produk unggulan Kota Pasuruan adalah Mebel Kayu.

Industri kecil menengah mebel kayu **UD. KRAMAT JATI** sebagai salah satu industri yang potensial dan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap daerah.

Industri mebel kayu **UD. KRAMAT JATI** menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, baik dari segi pendapatan maupun dari segi penyerapan tenaga kerja. Usaha ini merupakan contoh dari usaha dagang yang ada dalam industri mebel dan kayu.

a. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud dari pembangunan industri kecil menengah mebel kayu adalah :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Pengawasan dan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat.
2. Menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat terkait dengan sumber daya yang dimilikinya.

c. IDENTITAS.

1. Nama Perusahaan : **UD. KRAMAT JATI**
2. Nama Pemilik : CHOIRON
3. Kontak Person : CHOIRON
4. Alamat : Jl. Gatot Subroto Gang II RT. 02 RW. I
Kelurahan : Petahunan
Kecamatan : Gadingrejo
Kota : Pasuruan
Propinsi : Jawa Timur
5. Telepon : (0343) 431714
6. Email dan alamat situs :
7. Jumlah Tenaga Kerja : 13 orang
Laki-laki : 13 orang
Perempuan : - orang
8. Nilai Investasi : Rp. 100.000.000,-
9. Jenis kapasitas dan nilai produksi pertahun :

Tabel 4
Jenis kapasitas dan nilai produksi pertahun

| NO | JENIS PRODUKSI | KAPASITAS PRODUKSI | | NILAI PRODUKSI (Rp. 000,-) |
|----|----------------|--------------------|--------|--------------------------------|
| | | JUMLAH | SATUAN | |
| 1. | Kursi Tamu | 480 | Set | 960.000 |
| 2. | Tempat Tidur | 180 | Buah | 450.000 |
| 3. | Almari | 250 | Buah | 750.000 |

(Sumber : UD Kramat Jati)

10. Penjualan Per Tahun

Tabel 5
Penjualan Per Tahun

| No. | Jenis Produksi | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp. 000) | Nilai Penjualan (Rp. 000) | Lokasi Pemasaran |
|-----|----------------|--------|--------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1. | Kursi Tamu | 480 | Set | 2.000 | 2.500 | Surabaya, Bali, Malang |
| 2. | Tempat Tidur | 180 | Buah | 2.500 | 3.000 | Surabaya, Bali, Malang |
| 3. | Almari | 250 | Buah | 3.000 | 3.000 | Surabaya, Bali, Malang |

(Sumber : UD Kramat jati)

11. Jenis dan Kebutuhan Bahan Baku

Tabel 6
Jenis dan Kebutuhan Bahan Baku

| No. | Jenis Bahan Baku | Jumlah | Satuan | Nilai Bahan Baku | Asal Bahan Baku |
|-----|------------------|--------|----------------|------------------|-----------------|
| 1. | Kayu jati | 865 | M ³ | 640.000 | Perhutani |
| 2. | Kain | 9.600 | M | 500.000 | Surabaya |
| 3. | Spon | 2.650 | Lembar | 300.000 | Surabaya |
| 4. | Karet ban | 9.000 | Gulung | 25.000 | Lokal |
| 5. | Lem | 210 | Dos | 620.000 | Surabaya |
| 6. | Bahan Finishing | | | 285.000 | Surabaya |

(Sumber : UD Kramat Jati)

12. Jenis Mesin dan Peralatan.

Tabel 7
Jenis Mesin dan Peralatan.

| No. | Jenis Mesin | Tahun Pembelian | Jml | Harga Satuan (000) | NILAI (000) |
|-----|----------------|-----------------|-----|--------------------|-------------|
| 1. | Ms. Band Saw | 2000 | 1 | 8.000 | 8.000 |
| 2. | Ms. Router | 2001 | 2 | 600 | 1.200 |
| 3. | Ms. Cricle Saw | 2001 | 2 | 2.000 | 4.000 |

| | | | | | |
|----|-----------------------|------|----|-----|-------|
| 4. | Sander | 2002 | 6 | 300 | 1.800 |
| 5. | Hand Planer | 2002 | 12 | 400 | 4.800 |
| 6. | Bor | 2002 | 2 | 450 | 900 |
| 7. | Ms. Jahit | 2002 | 2 | 400 | 800 |
| 8. | Ms. Cross Cut | 2002 | 2 | 500 | 1.000 |
| 9. | Alat pertukangan kayu | 2002 | 20 | 250 | 5.000 |

(Sumber : Kramat Jati)

13. Pembinaan yang pernah diterima : Belum Pernah

14. Permasalahan yang dihadapi :

- Permodalan Masih Kurang
- Hanya sebagai supplier ke pedagang besar, sehingga tidak bisa menentukan harga yang layak

15. Kebutuhan untuk pengembangan sentra :

- Kebutuhan pelatihan Ekspor dan Import
- Pelatihan Managemen Industri
- Penambahan Modal

PROSPEK PENGEMBANGAN UNIT USAHA

Gambaran unit usaha dari sentra industri ini sangat beragam namun dapat Dicontohkan yaitu Perusahaan Mebel Kayu **UD. KRAMAT JATI** memiliki strategi peluang dalam mengembangkan sayap usahanya, persaingan dengan perusahaan sejenis semakin ketat. Perusahaan ini selalu menjaga kepercayaan para pelanggan, sehingga dapat memenuhi kepuasan pelanggan.

Semua karyawan bersama pemilik perusahaan mempunyai komitmen selalu melakukan peningkatan perbaikan system secara berkesinambungan, serta memenuhi standart persyaratan yang mengikat produksi.

Hal ini merupakan komitmen dan prospek yang akan dikembangkan dari pada kebanyakan unit usaha dalam sentra industri. Ditambah peran pemerintah sebagai pembuat regulasi sekaligus pemantau dari proses industri dikira sangat memberikan peluang sekaligus pengembangan yang optimal sentra industri yang ada sejak lama ini.

4.3 2. Perkembangan Sentra Industri Mebel

INGAT mebel ukir, langsung ingat Jepara, sebuah kabupaten di Jawa Tengah yang terkenal sebagai sentra mebel jati ukir. Namun, banyak yang belum mengetahui bahwa di Desa Bukir di pinggir Kota Pasuruan, Jawa Timur, juga ditemukan sentra kerajinan serupa.

Kalo kita pergi ke sana pada hari Jumat dan Sabtu. Jalan yang juga berfungsi sebagai jalur utama Pasuruan–Surabaya itu akan sangat macet, dipenuhi truk-truk, pikap, becak hingga andong pengangkut mebel.

Para penjual atau pembeli sudah mengerti, hari-hari tersebut merupakan hari transaksi. Di jalan itu orang menjual dan membeli mebel kayu jati setengah jadi atau mebel yang belum mendapat sentuhan akhir (finishing) sepenuhnya buatan warga setempat. Para pembeli yang datang umumnya berasal dari daerah di Jatim sendiri. Itulah potret kawasan mebel Bukir, Pasuruan, kawasan itu mulai berkembang sejak tahun 1973. Pada awalnya, sentra itu terletak di Jalan Jawa di salah satu sudut Kota Pasuruan bukan suatu hal yang mengejutkan lagi kalau produk industri rumahan yang dikenal dengan model antikan, seperti mebel Bukir itu banyak melibatkan tenaga kerja lokal. Mulai dari perajin hingga tukang pelitur. Mebel yang diperdagangkan umumnya dibuat di rumah-rumah penduduk dan sudah merupakan usaha turun-temurun dari warga sekitar

Dari begitu banyaknya desa di Kabupaten Pasuruan-paling tidak terdapat 11 desa yang terletak di pinggir Kota Pasuruan-yang memiliki spesifikasi keahlian membuat mebel tertentu setiap perajin memiliki keahlian membuat produk mebel ada anggapan bahwa setiap desa dikawasan ini memiliki keahlian berbeda-beda dan juga memiliki spesialisai dalam pembuatan produk mebel. Keahlian itu bisa juga dilihat di Desa Jaelan. Di desa ini, rata-rata perajinnya lebih terampil membuat bufet dibandingkan mebel jenis lain.

Kemudian ada Desa Tahunan dan Desa Sungi yang perajinnya ahli membuat lemari pakaian. Di Desa Pilang dan Desa Kompyangan, para perajin memiliki keahlian membuat meja dan kursi makan.

Sentra pembuatan tempat tidur dapat ditemukan dengan mudah di Desa Plinggisan, Desa Pilang, dan Desa Sidogiri. Sedangkan meja dan kursi tamu dibuat di Desa Sebani dan Desa Bukir.

Sumber para pengrajin menyebutkan, di setiap desa itu sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai perajin. Hanya sebagian kecil yang memilih profesi lain. Di desanya sendiri, Desa Tidu, ada sekitar 645 keluarga, dan sekitar 75 persen adalah perajin yang membuat bufet. Setiap lokasi perajin menampung lima sampai enam pekerja.

Dalam seminggu lima perajin bisa menyelesaikan delapan buah bufet. Sedangkan untuk meja ataupun kursi yang masih setengah jadi, seorang perajin bisa menyelesaikan satu buah setiap hari.

Hal ini tentu merupakan suatu hasil industri yang cukup menjanjikan mengingat jumlah kuantitas yang besar sebagai awal dari penciptaan sentra industri besar. Dari keterangan diatas dan dari kajian klaster yang merupakan basis penelitian dari peneliti dapat menyimpulkan bahwa apabila dilihat dari pengelompokan hasil dan jenis yang berbeda dalam penciptaan hasil mebel dikawasan ini merupakan awal baik bagi penciptaan jaringan klaster. Klaster dapat tumbuh dan berkembang karena adanya keterkaitanya antara industri inti dan industri pendukung sehingga membentuk suatu jaringan pemasaran yang baik. *(Sumber Kompas)* dari pameran terakhir, yaitu Pameran Produk Ekspor Indonesia di Jakarta beberapa bulan lalu, mereka mendapatkan pelanggan dari Perancis yang langsung memesan tujuh item produk dengan jumlah 290 buah.

Randy Chandra, Ketua Bidang Perdagangan Luar dan Dalam Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Pasuruan mengatakan :

Sebetulnya bukan masalah jika sebuah perusahaan mebel ingin menjajaki ekspor. Persoalannya, apakah mereka itu sudah memiliki tekad yang kuat untuk memperbaiki diri?

(wawancara dengan para pelaku usaha tanggal 17 juli 2009)

Ia justru memprihatinkan pemerintah kabupaten yang kurang menaruh perhatian terhadap perajin mebel lokal. Sulitnya bahan baku kayu akibat moratorium penebangan hutan (logging) oleh pemerintah memang tidak membuat perajin harus menganggur karena masih ada bahan baku kayu lokal. Hendaknya permasalahan-permasalahan ini dapat diantisipasi dan dapat diperbaiki sedini mungkin agar penciptaan sentra berbasis Klaster dapat mulai bersiap dan berbenah. Perkembangan ini harus mencakup seluruh aspek baik dari para pelaku,

4.3.3. Profil Perkembangan industri mebel di Kota Pasuruan.

Berikut ini profil sentra industri kerajinan mebel dan kayu Kota Pasuruan berdasarkan sumber Dinas perindustrian dan perdagangan Kota Pasuruan. Data yang diperoleh berdasarkan sumber yang telah terdaftar pada Dinas perindustrian dan perdagangan.

1. Nama Sentra : SENTRA INDUSTRI KERAJINAN KAYU (MEUBEL)

2. Jumlah Unit Usaha : 35 Unit Usaha

3. Alamat Sentra :

- Kelurahan : Petahunan
- Kecamatan : Gadingrejo
- Kota : Pasuruan
- Propinsi : Jawa Timur

4. Jumlah Tenaga Kerja :

- Laki – laki : 525 orang
- Perempuan : 40 orang
- Jumlah : 565 orang

4. Jenis, Kapasitas dan Nilai Produksi.

Table 4
Jenis, Kapasitas dan Nilai Produksi.

| No. | JENIS PRODUKSI | KAPASITAS PRODUKSI | | NILAI PRODUKSI (Rp. 000) |
|-----|------------------|--------------------|--------|----------------------------|
| | | JUMLAH | SATUAN | |
| 1. | Meja Kursi Tamu | 16.800 | Set | 33.600.000 |
| 2. | Tempat Tidur | 6.300 | Buah | 15.750.000 |
| 3. | Almari | 8.750 | Buah | 26.250.000 |
| 4. | Meja Kursi Makan | 4.800 | Set | 7.200.000 |

(Sumber : Data Disperindag Kota Pasuruan 2009)

6. Penjualan Pertahun

Table 5
Penjualan Pertahun

| No. | JENIS PRODUKSI | JML | SATUAN | HARGA SATUAN (Rp. 000) | NILAI PENJUALAN (Rp. 000) | LOKASI PEMASARAN |
|-----|------------------|--------|--------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1. | Meja Kursi Tamu | 16.800 | Set | 2.000 | 42.000.000 | Jawa, Bali & Kalimantan |
| 2. | Tempat Tidur | 6.300 | Buah | 2.500 | 18.900.000 | Jawa, Bali & Kalimantan |
| 3. | Almari | 8.750 | Buah | 3.000 | 30.625.000 | Jawa, Bali & Kalimantan |
| 4. | Meja Kursi Makan | 4.800 | Set | 1.500 | 9.600.000 | Jawa, Bali & Kalimantan |

(Sumber : Data Disperindag Kota Pasuruan 2009).

7. Jenis dan Kebutuhan Bahan Baku Per Tahun

Table 6
Jenis dan Kebutuhan Bahan Baku Per Tahun

| No. | JENIS BAHAN BAKU | JMH | SAT | NILAI BAHAN BAKU (Rp. 000) | ASAL BAHAN BAKU |
|-----|------------------|---------|--------|-----------------------------|-----------------|
| 1. | Kayu jati | 30.275 | M3 | 19.376.000 | Perhutani |
| 2. | Kain | 336.000 | M | 16.800.000 | Surabaya |
| 3. | Spon | 92.750 | Lembar | 2.782.500 | Surabaya |

| | | | | | |
|----|-----------------|---------|--------|-----------|----------|
| 4. | Karet Ban | 315.000 | Gulung | 7.875.000 | Surabaya |
| 5. | Lem | 7.350 | Dos | 4.557.000 | Surabaya |
| 6. | Bahan Finishing | 3.500 | Kg | 997.500 | Surabaya |

(Sumber : Data Disperindag Kota Pasuruan 2009)

8. Jenis Mesin / Peralatan

Table 7
Jenis Mesin / Peralatan

| No. | Jenis Mesin | Tahun pembelian | Jml | Harga Satuan (Rp. 000) | Nilai (Rp. 000) |
|-----|----------------|-----------------|-----|--------------------------|-------------------|
| 1. | Ms. Band Saw | 2000 | 35 | 8.000 | 280.000 |
| 2. | Ms. Router | 2000 | 70 | 600 | 42.000 |
| 3. | Ms. Circle Saw | 2000 | 70 | 2.000 | 140.000 |
| 4. | Sander | 2000 | 210 | 300 | 63.000 |
| 5. | Hand Planner | 2000 | 420 | 400 | 168.000 |
| 6. | Bor | 2000 | 70 | 450 | 31.500 |

| | | | | | |
|----|-----------------------|------|-----|-----|---------|
| 7. | Mesin Jahit | 2000 | 70 | 400 | 28.000 |
| 8. | Ms. Croos Cut | 2000 | 70 | 500 | 35.000 |
| 9. | Alat Pertukangan Kayu | 2000 | 700 | 250 | 175.000 |

(Sumber : Data Disperindag Kota Pasuruan 2009)

Dari keterangan diatas diketahui profil industri secara khusus namun sebenarnya ada banyak baik jenis usaha, jumlah usaha dan alat-alat yang masih belum dicantumkan dalam sentra usaha ini dikarenakan belum adanya ijin dan pendataan yang menyeluruh atas jumlah usaha jenis usaha diatas untuk itu saya sekedar menambahkan sebenarnya ada bermacam-macam produk lain antara lain sudah mulai berkembangnya industri kerajinan ukiran dekorasi pernikahan jawa dan aneka produk ukiran jepara seperti mimbar masjid aneka kursi jawa hal ini sudah mulai banyak berkembang sedangkan jumlah usaha menurut pengrajin sendiri ada banyak sekali pengrajin yang memproduksi mulai dari desa-desa sekitar sentra.

Hal ini ditanggapi oleh bagian pendataan Dinas perindustrian dengan benar hal ini disebabkan juga adanya kesadaran para pelaku usaha untuk melakukan ijin dan pendaftaran atas usaha mereka. Hal lain mungkin karena terlalu berbelitnya atas ijin usaha. Namun, Pemerintah melalui Dinas Perindustrian sudah mulai melakukan sosialisasi dan pendataan meski secara bertahap profil ini adalah gambaran sentra industri mebel skala kecil. Namun hal ini digunakan peneliti untuk mengetahui secara garis besar gambaran produksi dari sentra industri ini.

9. Pembinaan Yang Pernah Diterima :

- Pelatihan Peningkatan Kualitas Mutu Produksi
- Managemen Pemasaran

10. Permasalahan Yang Dihadapi :

- Masih Minimnya Perhatian Dari Instansi Terkait
- Masih diperlukan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan mutu produksi
- Kurangnya pengetahuan dan memperluas jaringan pasar
- Nilai Bahan Baku semakin mahal
- Harga produksi cenderung stabil
- Upah tenaga kerja semakin naik
- Biaya Produksi Naik
- Persaingan harga diantara unit usaha

4.3.3 a. Kondisi industri mebel dan kayu Kota Pasuruan

Sebelum mengetahui kondisi dari industri mebel dan kayu dipasuruan ini terlebih dahulu kita mencoba mengetahui struktur dari sentra industri mebel tepatnya dibukir sebenarnya kita mencoba menyusuri sepanjang jalan desa kraton menuju kebangil kita akan melihat disepanjang jalan baik kiri dan kanan yaitu bermacam-macam produk-produk kerajinan mebel seperti lemari kursi maupun perlengkapan rumah tangga berupa mebel.

Barangkat dari Bab 1 penelitian ini perkembangan kondisi industri mebel ini sebenarnya industri mebel ini sudah lahir dan ada sejak lama dibuktikan kemampuan para pengrajin yang diperoleh dari para pendahulu mereka secara turun menurun mereka tularkan. Setiap perkembangan industri tentu dibarengi dengan kendala dan tantangan-tantangan yang akan datang.

Dari kajian itu peneliti dapat menyimpulkan menggambarkan ada dua macam industri sesuai dengan konsep klaster industri yaitu industri inti dari industri sendiri dan juga industri pendukung yang akan saling bekerja sama membentuk sebuah jaringan dan peneliti menggambarkan bahwa ada tiga pelaku ekonomi dalam industri inti mebel dan kayu ini yaitu antara lain :

1. Para pengrajin kayu

Para pengrajin kayu dalam industri dibagi menjadi dua yaitu yang *pertama*, orang dan sekelompok orang dikawasan ini yang memiliki pekerjaan sebagai pembuat produk dari kayu baik secara tradisional maupun dengan

menggunakan alat moderen memproduksi kerajinan kayu secara rumahan proses dari usaha ini kebanyakan perorangan dan usaha bersama. Dalam proses produksi cukup sederhana pertama mereka membeli kayu melalui pemasok sebagai bahan baku dari penggrajian kayu dan setelah itu dengan dibantu alat-alat pertukangan sederhana mereka mulai memproduksi merakit kayu menjadi barang kerajinan mebel setengah jadi. Antara lain buffet, maja Kursi, Mimbar masjid, dipan, hingga ukiran dekorasi

Kedua, yaitu pengrajin kayu sekaligus memproduksi menjadi barang jadi yang siap jual dan diperdagangkan kepada konsumen meski jumlah kuantitasnya yang sedikit namun sudah mulai banyak industri ini dikembangkan karena apabila diolah barang setengah jadi ini akan memperoleh hasil ekonomis yang lebih tinggi. Ada bermacam-macam jenis industri penunjang industri penambahan nilai jual ini antara lain : industri pengecatan dan pemelituran barang-barang mebel, industri pemotongan kayu dan industri jasa pengangkutan meski relatif kecil dll.

2. Para Pedagang hasil kerajinan

Yaitu penjual mebel dan kerajinan mebel biasanya mereka memiliki toko atau bedak disepanjang jalan bukir mereka memanfaatkan lahan mereka untuk menjual dari pada produk mebel. Ada dua jenis macam barang produksi yang banyak dijual disentra industri yaitu Pertama barang jadi dalam hal ini berupa kerajinan yang telah berupa barang jadi barang yang siap pakai baik berupa lemari kursi dan barang-barang lain namun melalui proses produksi yang cukup rumit kedua hal ini barang setengah jadi yaitu jenis barang yang masih berupa almari kursi dan barang-barang lain berupa kayu jadi belum melalui proses pengecatan dan proses produksi. Dikalimantan didalam pulau jawa dan kota-kota besar lain diindonesia pasuruan indentik dengan penjualan pasar mebel setengah jadi atau istilah lain mentahan umumnya para pengusaha didaerah-daerah membeli mentahan dari kota pasuruan karena disamping beraneka macam jenis produk mebel dapat ditemui juga dikenal memiliki kualitas yang bagus.

Ketiga para pengepul kayu yaitu orang yang bekerja menyalurkan bahan mentah berupa kayu kepada pengrajin. Mereka memperoleh kayu dan bahan baku dari berbagai daerah di Jawa maupun diluar Jawa. Meski usaha ini relative kecil namun apabila hal ini berkebang dengan bantuan pihak Dinas Perindustrian kota tentu akan sangat menguntungkan bagi kelangsungan sentra dan klaster mebel di Kota Pasuruan

4.3.3 b. Potensi industri mebel Pasuruan.

Berkaitan dari keterangan dan data diatas dapat diketahui potensi yang mungkin akan menjadi pemasukan bagi daerah khususnya bagi pemerintah Kota Pasuruan. Pemerintah kota pasuruan dalam hal ini dinas Perindustrian dan perdagangan sebenarnya memiliki dua produk unggulan dan potensi yang akan dikembangkan secara tepat sehingga akan menjadi produk unggulan yaitu industri logam dan salah satunya industri mebel.

Potensi diartikan sesuatu atau peluang yang dipunyai suatu daerah untuk dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan daerah. Potensi diketahui melalui pendekatan sesuatu yang mungkin dapat dieksploitasi daerah apakah itu dari sektor-sektor sumber daya alam, apakah dari sektor-sektor perindustrian dan Perdagangan setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda meski kadang ada yang sama namun baik kuantitas dan kualitas tentu akan berbeda tergantung bagaimana sumber daya manusia mengelola

Pasuruan merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pada aspek industri karena meski Sumberdaya alam juga melimpah namun tidak begitu baik dari sisi kualitas. Sedangkan aspek industri sangat dirasa baik karena berada dijalur perlintasan kota pemasaran hasil-hasil produksi yaitu Surabaya Probolinggo dan Bali. Sebagaimana dikatakan diatas bahwa potensi hanya dapat dilaksanakan dan dikembangkan apabila sumber daya manusia mampu memaksimalkan potensi yang ada. Sumber Daya Manusia dalam hal ini yaitu para stake Holder yang berkepentingan dan juga para pembuat kebijakan yaitu dalam hal ini pemerintah daerah. Dalam karya tulis ini peneliti mencoba menjelaskan peran dari pada Pemerintah Daerah yang diwenangkan kepada Dinas yang bersangkutan yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Sehingga Potensi dapat diproteksi diatur melalui Regulasi yang menjadikan sektor industri ini berkembang baik sehingga dapat mensejahterakan masyarakat Pasuruan khususnya.

Potensi *Pertama*, yaitu dari segi produksi barang-barang yaitu perubahan proses produksi dari memproduksi barang mentah menjadi barang jadi yang siap pasar. Istilah lain penambahan produksi barang masyarakat khususnya para pembeli dan konsumen umumnya membeli produk kerajinan berupa barang setengah jadi atau mentahan. Untuk itu potensi penambahan produksi ini dapat menjadikan nilai tinggi bagi barang-barang yang akan dipasarkan

Kedua, yaitu dari segi pemasaran hendaknya produk-produk hasil kerajinan ini tidak hanya pulau jawa dan Kalimantan. juga diusahakan bagaimana bisa menembus pasar luar negeri dengan hasil akhir peningkatan pendapatan masyarakat mebel pasuruan.

Potensi yang sangat besar ini hendaknya dapat dikembangkan sedemikian rupa agar menambah nilai jual produk mebel pasuruan.

Ketiga, potensi penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak di era krisis global yang menyebabkan jumlah kuantitas pengangguran yang semakin meningkat ini dikira industri padat karya adalah salah satu jalan keluar bagi penyelesaian masalah pengangguran apabila industri ini dapat berkembang dengan baik tentu akan menciptakan penyerapan jumlah tenaga kerja yang besar. Hal ini merupakan potensi yang perlu dikembangkan.

Keempat, yaitu dari segi prestasi dari Kota Pasuruan dan perangkat sehingga menjadikan pasuruan menjadi kota industri yang dinilai berhasil dalam mengembangkan regulasi kotanya dapat menjadikan kota ini sebagai awal terbentuknya kota-kota industri yang berbasis klaster industri baik diindonesia.

4.4 Program kerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan tahun 2009

4.4.1. Visi dan Misi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan

a. Visi

Terwujudnya usaha perkoperasian, industri, perdagangan dan jasa berbasis daya saing Daerah.

b. Misi

1. Meningkatkan sumberdaya dan kinerja Dinas Koperasi perindustrian dan perdagangan.
2. Memberdayakan gerakan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dalam pencapaian pembangunan ekonomi kerakyatan.
3. Mengembangkan perdagangan dalam negeri dan luar negeri melalui pengendalian usaha dan akses pasar.
4. Meningkatkan daya saing industri kecil menengah dan industri berat serta dengan memperhatikan faktor-faktor produksi.
5. Memperdayakan ekonomi melalui recovery pembangunan dibidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

4.5.2. Rencana strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan tahun 2009 yang dituangkan dalam TOR tahun 2009

1. Latar Belakang

Dalam era otonomi daerah dan globalisasi suatu organisasi dituntut untuk semakin dapat efisien, efektif dan profesional, serta lebih meningkatkan kinerjanya. Sebagaimana halnya pemerintah daerah saat ini mempunyai kewenangan yang cukup luas dalam urusan. Oleh karena itu untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas kerja organisasi khususnya organisasi perangkat daerah, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai dan budaya organisasi (*organizational culture*), utamanya yang terkait dengan visi, misi kinerja (*performance*) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.

Sesuai dengan konsepsi dasar dan pemahaman tentang organisasi publik tentunya kita perlu memahami pula konsepsi dinas koperasi perindustrian dan perdagangan Kota Pasuruan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta regulasi yang mengaturnya juga perlu dipatuhi oleh para pelaku organisasi publik atau perangkat daerah. Dengan demikian sumber daya aparatur mempunyai peran yang sangat penting mengingat sumber daya aparatur merupakan salah satu faktor atau komponen organisasi sebagai penentu bahwa organisasi tersebut menjadi pasif atau aktif. Agar Dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan menjadi aktif diperlukan pengelolaan sumber daya yang memiliki secara benar dan profesional serta memiliki mekanisme kerja, sistem prosedur kerja dan menentukan strategi pencapaian kinerja.

Sesuai persepsi dasar tentang nilai-nilai pada kultur organisasi serta mengacu pada regulasi yang ada mauphun faktor lingkungan yang mempengaruhi maka dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan pada tahun 2009 akan melakukan trobosan-trobosan yang inovatif dengan dilandasi adanya perubahan-perubahan regulasi dari pemerintah yaitu dengan membuat program sebagai berikut :

2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya program kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2009 adalah mengkorelasikan antara visi dan misi, kebijakan rencana strategi, tugas pokok dan fungsi yang dapat diaplikasikan melalui program kegiatan.

Sedangkan tujuan Dinas Koperasi, Perindustrian dan perdagangan kota Pasuruan Tahun 2009 adalah :

- Bagi Pemerintah kota Pasuruan yaitu untuk menentukan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akuntebel khususnya hal yang berkaitan dengan perkoperasian, perindustrian dan perdagangan serta pelaksanaan perbaikan kinerja pembangunan ekonomi daerah.

- Bagi Stake Holder yaitu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai agenda kerja Dinas Perindustrian dan perdagangan melalui tugas pokok dan fungsi kinerja pada masing-masing perangkat daerah.
- Bagi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2009.

3. Dasar Pelaksanaan

Dasar pelaksanaan program kerja tahun 2009 dari Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Pasuruan adalah :

1. Peraturan pemerintah **RI Nomor 38 Tahun 2007** Tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah daerah dengan propinsi kabupaten kota.
2. Peraturan pemerintah **RI Nomor 41 tahun 2007** tentang organisasi perangkat daerah.

4. Strategi

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan mempunyai strategi dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan serta peluang yang ada. Adapun strategi diambil adalah :

1. Meningkatkan Sumberdaya dan kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
2. Memberdayakan gerakan koperasi dan usaha mikro menengah dalam pencapaian pembangunan ekonomi kerakyatan.
3. Meningkatkan daya saing industri kecil menengah dan industri berat.
4. Mengembangkan perdagangan dalam negeri dan luar negeri melalui pengendalian usaha dan akses pasar.
5. Meningkatkan daya saing industri kecil menengah dan industri berat serta dengan memperhatikan faktor-faktor produksi.
6. Memberdayakan ekonomi melalui recoveri pembangunan dibidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

5. Program / Kegiatan

Dengan mempertimbangkan strategi / kebijakan yang diambil tahun 2009 Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kota Pasuruan mempunyai program khusus yaitu pemberdayaan ekonomi melalui Recovery Pembangunan bidang Koperasi, Perindustrian dan perdagangan dengan model pendampingan terstruktur serta ditunjang Program/kegiatan tahun 2009 sebagai berikut :

1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
4. Penyediaan jasa alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8. Penyediaan makanan dan minuman
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

1. Pengadaan perlengkapan gedung
2. Pengadaan peralatan gedung kantor
3. Pengadaan mebelair
4. Pemeliharaan rutin berkala gedung
5. Pemeliharaan rutin kendaraan dinas
6. Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor
7. Pemeliharaan rutin mebelair.
8. Pemeliharaan rutin taman halaman tempat parkir dan pagar.
9. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.

3. Program : Peningkatan disiplin aparatur

Kegiatan : 1. Pengadaan pakaian kerja lapangan.

4. Program : Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

Kegiatan : 1. Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan Teknis

5. Program : Peningkatan pengembangan sisitem pelaporan capaian kinerja Dan keuangan

Kegiatan : 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja
2. Penyusunan pelaporan keuangan.

6. Program : Penciptaan iklim Usaha kecil menengah

Kegiatan : 1. Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah.

7. Program : Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan usaha mikro

Kegiatan :

1. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha kecil menengah
2. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan.
3. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / KUD.
4. Keterampilan Usaha bagi anggota Koperasi.

8. Program : Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM

Kegiatan :

1. Sosialisasi diruangkan informasi penyediaan permodalan
2. Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga
3. Temu usaha Koperasi dan Pelaku ekonomi
4. Penetapan jaringan usaha koperasi (JUK) SP
5. Pasar Ramadan
6. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa operasi pasar.
7. Penunjang pasar murah propinsi jawa timur tahun 2009
8. Pembinaan usaha golongan ekonomi lemah.
9. Monitoring evaluasi dan pelaporan modal usaha pracangan
10. Biaya operasional team penagihan pinjaman.

9. Program : Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM**Kegiatan :**

1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dalam program
2. Pembangunan sistem informasi perencanaan.
3. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerja sama usaha koperasi
4. Penyebaran modul-modul pola pengembangan koperasi
5. Penilaian klasifikasi
6. Lomba koperasi
7. Penilaian kinerja KSP / USP Koperasi
8. Sosialisasi perpajakan dan akuntansi perpajakan.
9. Bintek dan pelatihan koperasi sekolah.
10. Rintisan penerapan teknologi sederhana/made joint modern pada JUK
11. Workshop usaha pengembangan koperasi
12. Pembinaan simpan pinjam
13. Bintek manajemen simpan pinjam pola konvensional.

10. Program : Pemberdayaan Koperasi**Kegiatan : 1. Sosialisasi Koperasi****11. Program : Perlindungan Konsumen dan Pengamanan perdagangan****Kegiatan :**

1. Koordinasi peningkatan hubungan kerja sama dengan lembaga perlindungan konsumen
2. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa.
3. Operasionalisasi dan pengembangan dan penertiban pasar.
4. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana sampah
5. Pembinaan dan pengembangan UPTD Pasar.

12. Program : Peningkatan Kerja Sama Perdagangan internasional**Kegiatan :**

1. Promosi Produk Unggulan Kota pasuruan di Jakarta
2. Promosi Produk Unggulan Kota pasuruan di Surabaya
3. Promosi Produk Unggulan Kota pasuruan di Bali

4. Promosi Produk Unggulan Kota pasuruan di Balikpapan
5. Pameran pembangunan / USI Fair

13. Program : Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.

Kegiatan : 1. Peningkatan Program Pengembangan Ekspor dengan Instansi

14. Program : Peningkatan Efektifitas Perdagangan Dalam Negeri

Kegiatan :

1. Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/Produk
2. Pengembangan Kelembagaan kerjasama kemitraan
3. Pengembangan Pasar lelang daerah
4. Peningkatan Sistem jaringan Informasi Perdagangan.
5. Intensifikasi Retribusi dan pendapatan lain pasar.
6. Monitoring harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya.

15. Program : Pembinaan Pedagang kaki lima dan Asongan

Kegiatan : 1. Penataan Tempat berusaha Pedagang, kaki lima dan Asongan

16. Program : Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

Kegiatan :

1. Pengembangan kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian
2. Pengembangan sistem inovasi teknologi industri.
3. Pembentukan gugus kendali mutu dalam percepatan produksi

17. Program : Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Kegiatan :

1. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri (UPTD Logam)
2. Perluasan penetapan kapasitas Iptek sistem Produksi.
3. Pengujian standar produk manufaktur

18. Program : Peningkatan Penataan Struktur industri.

Kegiatan :

1. Pembinaan keterkaitan Produksi Industri hulu hingga kehilir
2. Updating Potensi IKM dan keterkaitan hulu hilir dalam penciptaan Klaster Industri.

19. Program : Pengembangan Sentra Industri Potensial

Kegiatan :

1. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
2. Penyediaan sarana fasilitas dan unilitas produksi.
3. Peningkatan kemampuan industri kecil batik
4. Peningkatan kemampuan industri kecil Kerajinan

4.5.Upaya dalam Pembinaan dan Pengembangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap pengrajin mebel dan kayu Kota Pasuruan

Tentang upaya yang dilakukan pemerintah daerah pasuruan berhubungan langsung dengan peran serta masyarakat dalam kaitannya konsep klaster industri kecil harus dapat mampu berjalan sendiri secara mandiri dan didukung oleh peran dalam hal ini pemerintah daerah kesimpulannya adanya koordinasi kedua stake holder tersebut baik yang dibantu maupun yang memberikan arahan. Upaya dan pengembangan dan pembinaan menurut pihak dinas perindustrian sebenarnya sudah dilakukan meski belum maksimal Dinas perindustrian dan perdagangan malalui Bapak Dr.T Kuncoro, MSi menjelaskan berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan beliau menjelaskan :

Begini Mas pembinaan dan pengembangan industri mebel dan kerajinan kayu dinas prindustrian berkonsep pada pembinaan dan pengembangan pada penciptaan dan pemerataan kesempatan kerja dan berusaha dapat menjadikan mebel sebagai produk unggulan, modernisasi masyarakat, memperkuat struktur industri dan meningkatkan ekspor nasional dalam hal ini pembinaan dan pengembangan industri kecil diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dan diharapkan dapat berkembang kearah lebih kemajuan dan kemandirian (wawancara pada Diperindag tanggal 15 juli 2009).

Berdasarkan keterangan demikian bapak kepala Dinas juga menambahkan tentang sasaran yang ingin dicapai dinas perindustrian dan perdagangan dalam pengembangan dan pembinaan khususnya untuk semua masyarakat industri mendatang dikota pasuruan beliau juga menambahkan :

Dan ada tiga sasaran yang ingin dicapai Disperindag selain hanya berusaha mempertahankan keberadaan industri kecil. yang pertama adalah pemberdayaan ekonomi rakyat dalam era global sekarang ini yang. Kedua, adalah terwujudnya kemampuan para pengusaha dalam persaingan dipasar bebas yang semakin hari semakin maju dan yang terakhir yaitu terciptanya peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi serta kualitas SDM khususnya bagi para pengrajin. (Wawancara pada disperindag tanggal 15 juli 2009)

Disperindag menjalankan program kerja berdasarkan ketiga hal tersebut.

Hal diatas adalah sasaran dari Dinas perindustrian kedepan sejalan dengan perkembangan masyarakat Kota Pasuruan.

4.5.1 Pengembangan dan pembinaan Aspek Produksi

Pengembangan dan Pembinaan Aspek Produksi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan yang ada dalam renstra kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan peneliti menghubungkan mengambil dua program berkenaan dengan pengembangan Aspek Produksi yaitu dua program yaitu :

- a. Peningkatan Kualitas kelembagaan dan Koperasi
- b. Penataan Struktur Industri

Sejalan dengan itu kata bapak Dr. T Kuncoro MSi selaku kepala Dinas perindustrian dan perdagangan Kota Pasuruan menyatakan :

Begini mas sebenarnya kami dari pihak Dinas telah melakukan berbagai kegiatan untuk lebih meningkatkan kualitas produksi mebel baik penyuluhan maupun pengarahan yang berhubungan dengan proses produksi. Aspek produksi sebenarnya erat kaitanya dengan kemampuan dari pengrajin dalam usaha membuat barang mereka diharapkan mampu membuat produk dan hasil yang bagus berkualitas baik

Perlu dicatat pula dalam pengembangan industri kecil mebel sendiri khususnya dalam pelayanan kami dari dinas telah membentuk dua UPTD yang ada ditiap pasar mebel yaitu di pasar mebel bokir dan pasar mebel randu agung UPTD ini bertujuan untuk membantu pengrajin dalam urusan teknis maupun penyuluhan diharapkan dapat bekerja maksimal dan dapat melayani pelaku usaha.

(Wawancara pada disperindag tanggal 15 juli 2009)

Sedangkan yang akan dijabarkan dibawah ini ada kaitanya dengan dengan program Disperindag berhubungan dengan Aspek Produksi dalam Renstra tahun 2009 ada dua yang antara lain :

Program : Peningkatan Kualitas kelembagaan dan Koperasi**Kegiatan :****Latar Belakang**

Hal-hal yang melatar belakangi peningkatan kelembagaan dan Koperasi adalah cinta yang kurang baik dari masyarakat pertisipasi anggota rendah, pengurus yang kurang transparan yang berdampak kepada kinerja koperasi itu sendiri.

Disamping itu juga perlu diperhatikan antara lain banyaknya koperasi yang tumbuh karena terangsang akibar fasilitas-fasilitas yang tersedia bahkan sengaja dirangsang untuk kepentingan-kepentingan tertentu, yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan sebagai badan hokum, namun tidak terpantau dengan baik, Untuk itu tentunya perlu sesuatu kebijakan dukungan untuk menubuhkembangkan atau meningkatkan kualitas usaha dan kelembagaan seperti penyusunan dan penyempurnaan peraturan yang berkaitan dengan Koperasi, penataan dan dukungan penguatan organisasi koperasi serta penumbuh wirausaha mandiri malalui pelatihan Diklat pelatihan Teknis Non teknis dan sebagainya.

Pada akhirnya segenap esensi dari pada menejemen Koperasi adalah mengoptimalkan potensi organisasi Koperasi (anggota, Pengurus, Pengawas dan Manajemen atau pelaksana)

Maksud dan Tujuan

- a. Maksud : Diharapkan dapat menumbuh kembangkan sosok koperasi yang sesuai dengan jati diri koperasi dengan menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Koperasi.
- b. Tujuan : Revitalisasi Kelembagaan dengan kegiatan agar dapat menjalankan aktifitas dengan menerapkan nilai dasar dan prinsip koperasi yang membedakan dengan Bidang usaha lain.

Sasaran

Koperasi (KSP/USP Koperasi)

Nama dan organisasi

Dinas KOPERINDAG

Sumber pendanaan

APBD Tahun 2009 Kota Pasuruan

Lingkup lokasi

Lingkup Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan

Lokasi

Kota Batu Malang (Work shop, Bintek, Sosialisasi dan Diklat Pasuruan (koordinasi, Lomba, Penilaian dll.)

Metodologi

A . Kajian Literatur

B. Work Shop, Diklat, Bintek, (tatap muka /pembelajaran)

Waktu pelaksanaan

| No | Uraian | Mei | Juni | | | |
|----|---------------------|-----|------|--|--|--|
| 1. | Persiapan | | | | | |
| 2. | WorkShop dan Bintek | | | | | |
| 3. | Diklat manajemen | | | | | |
| 4. | Laporan | | | | | |

Tenaga ahli

Instruktur terkait

Output

Tersedianya dana, Tersediannya SDM, Tersediannya Perda

Out come

Terlaksananya Kegiatan dan pemahaman hasil kegiatan.

Program : Penataan Struktur Industri

Kegiatan :

1. Pembinaan keterkaitan produksi industri Hulu hingga hilir
2. Update potensi IKM dan keterkaitan hulu hilir dalam rangka penciptaan Klaster Industri.

Latar Belakang

Acuan pembangunan yang terkait langsung dengan sektor industri dan perdagangan adalah :

1. Mengembangkan usaha kecil menengah dan koperasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, peningkatan akses kepada sumber daya produktif, Pengembangan kewirausahaan dan pengusaha kecil, menengah koperasi berkeunggulan kompetitif.
2. Memacu peningkatan daya saing melalui pengembangan ekspor, pengembangan industri kompetitif, penguatan institusi pasar dan persaingan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Penataan struktur industri yang berorientasi pada daya saing global dengan prioritas pembangunan keunggulan kompetitif dari cabang-cabang industri yang mengelola sumberdaya dalam negeri yang dapat terbaharukan dan berkeunggulan kompetitif.
4. Pengembangan industri pendukung, yang didukung oleh langkah-langkah pengembangan produk IKM, pengembangan kemampuan SDM, Pemasyarakatan penggunaan teknologi informasi, pengembangan teknologi mutu, desain dan pengemasan.
5. Produk Kluster kecil dan menengah IKM Kota Pasuruan sangat potensial untuk dikelola menjadi produk berkualitas ekspor. Pemerintah pasuruan memberikan perhatian yang besar untuk mengembangkan IKM, antara lain : dengan memberikan pelatihan teknologi proses dan manajemen produksi serta fasilitasi kepada pelaku pasar melalui kegiatan industri.promosi.

Maksud dan Tujuan

Maksud adalah untuk pendataan IKM Mebel di Kota Pasuruan.

Tujuan Untuk mendapatkan data dan informasi terbaru tentang IKM mebel di Kota Pasuruan.

Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai melalui penguasaan mebel di Kota Pasuruan.

Sumber pendanaan

Biaya yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daeran Kota Pasuruan tahun 2009

Input : Tersedianya dana, SDM, Peraturan Daerah.

Output : Terlaksananya pendataan IKM mebel

Outcame : data dan informasi IKM mebel

Time Schedul

| Kegiatan | Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nop | Des |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga hilir | | | | | | | | | | | | |
| Updating potensi IM dan ketrkaitan hulu hilir dalam rangka penciptaan klaster industri | | | | | | | | | | | | |

4.5.2 Pengembangan dan Pembinaan Aspek Pemasaran

Melihat dari potensi ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota pasuruan berupaya memberikan bantuan seluas-luasnya dam mempromosikan produknya wujud upaya pengembangan dan pembinaan yang dilakukan Dinas terkait dalam bidang pemasaran antara lain :

Mengikut sertakan industri kecil dalam pameran-pameran pada tingkatan lokal regional maupun nasional. memberikan akses pasar yang potensial kewilayah-wilayah yang strategis.

Adapun Pengembangan dan Pembinaan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan menurut Bapak Dr.T Kuncoro Msi selaku kepala dinas mengatakan :

*Kalau masalah pemasaran menurut saya sebenarnya para pengrajin tidak terlalu mengalami kesulitan karena industri mebel ini sudah terkenal diindonesia dan juga karena sudah banyak industri perdagangan yang ada disepanjang jalan dilokasi sentra ini para penjual rata-rata telah memiliki langganan tetap sehingga terkadang para pengrajin tidak perlu repot cari pelanggan dengan sendirinya pelnaggan mencari pengrajin. melalui Bedak dan perdagangan untuk mencari produk dagangan sendiri
Tetapi kelemahan dari pengrajin adalah capat puas dengan hasil selama ini yang sudah diperoleh. Padahal jika mau lebih dikembangkan industri ini menjadi salah satu kontribusi besar bagi peningkatan pendapatan Daerah. Ditambah disperindag kurang memiliki dana untuk melakukan pengembangan dan pembinaan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
(Wawancara pada Disperindag tanggal 15 juli 2009)*

Dan dijelaskan pula upaya yang dilakukan Disperindag dalam Renstra kerja tahun 2009 peneliti mengambil dua contoh program yang berhubungan dengan Aspek Pemasaran dan dijabarkan dibawah ini :

Program : Peningkatan efisiensi Perdagangan Dalam negeri

Kegiatan :

latar belakang

Dalam rangka era globalisasi perdagangan bebas dan kemandirian para pengusaha dalam persaingan usaha dibidang perdagngan, khususnya dalam pengembangan efisiensi perdagangan dalam negeri Dinas koperasi perindustrian dan perdagangna perlu adanya kegiatan-kegiatan yang mendukung sehingga dapat mendorong para pelaku usaha maupun IMK sekota Pasuruan.

Adapun dalam memacu pengusaha maupun para pelaku UMK dibutuhkan pembinaan-pembinaan maupun dukungan agar pelaku usaha dapat saling membutuhkan satu sama lain sehingga dapat meningkatkan produktifitas kerja yang lebih baik dan saling menguntungkan serta dapat menciptakan persaingan yang sehat antara satu dengan yang lain.

Pengusaha maupun UMK diharapkan mampu meningkatkan nilai produksi dalam rangka pemenuhan tujuan dari usahanya yang antara lain : berkaitan dengan hal tersebut diatas maka melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan melakukan kegiatan-kegiatan dalam negeri antara lain:

1. Pengembangan pasar dan Distribusi barang/produk
2. Pengembangan kelembagaan kemitraan kerjasama (temu usaha kemitraan usaha kecil, menengah dan besar).
3. Pengembangan pasar lelang Daerah
4. Peningkatan sistem jaringan informasi perdagangan.
5. Intensifikasi retribusi dan pendapatan lain pasar.

Maksud dan Tujuan

1. Meningkatkan kualitas produksi, design, manajemen usaha serta sebagai sarana promosi dan pemasaran produk.
2. Untuk meningkatkan dan pengembangan kemitraan dan pengembangan sistem jaringan pasar.
3. Meningkatkan pengawasan pengedaran barang dan jasa operasi pasar.
4. Membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga murah.

Tujuan

1. Meningkatkan peluang jasa dan jaringan informasi pasar.
2. Monitoring harga kebutuhan pokok barang penting lainnya.
3. Meningkatkan pengawasan peredaran barang dan jasa sehingga tidak ada produk yang tidak layak jual

Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah para pengusaha, perancangan serta pengusaha lain di Kota Pasuruan

Sumber Pendanaan

Biaya yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Pasuruan tahun 2009.

Lingkup, Lokasi

Kerja sama kemitraan perdagangan negeri dan monitoring kegiatan harga

Motodologi

Metode yang ditetapkan dalam kegiatan ini meliputi tahapan sebagai berikut :

Kajian Survey Lapangan

Evaluasi kegiatan yang berlangsung

Jangka waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan dalam waktu 12 bulan yaitu Januari sampai dengan Desember.

Output :

meningkatkan daya saing maupun menjaga melonjaknya harga-harga barang produksi masyarakat.

Program : Memperluas jaringan Pemasaran produk**Kegiatan :****Latar belakang**

Dalam rangka meningkatkan kemampuan pengusaha dalam bidang kualitas produksi, design produksi, manajemen usaha dan informasi pasar dalam perdagangan nasional dan internasional ekspor untuk bisa menangani persaingan dengan negara-negara lain. Dan mengingat bahwa pengusaha kota pasuruan yang mempunyai produk-produk unggulan-unggulan khususnya furniture masih tetap membutuhkan uluran tangan dari bantuan pemerintah daerah dalam hal promosi produk unggulan dan pemasaran, untuk kegiatan promosi produk unggulan dan pemasaran untuk di kota sendiri, luar propinsi dan luar negeri maka kami memprogramkan untuk kegiatan-kegiatan promosi produk pasuruan melalui pameran-pameran yang akan dilakukan di Jakarta, Bali, Balikpapan, Surabaya dan di Kota Pasuruan sendiri.

Disamping promosi produk peningkatan sistem dan jaringan informasi juga sangat penting didukung oleh maksud bahwa pengusaha kita bisa menjalin kerja sama dengan pengusaha lain.

Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah sebagai sarana promosi dan pemasaran produk-produk unggulan Kota Pasuruan, utamanya produk Furniture mebel dan logam.

b. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

1. Memperkenalkan Produk-produk Kota Pasuruan diajang pameran dalam maupun luar negeri
2. Memperluas jaringan pemasaran produk dengan menjual langsung ataupun kerjasam antar pengusaha

Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah pengusaha-pengusaha yang mempunyai produk unggulan furniture mebel dan logam jasa

Nama Organisasi pengguna Jasa

Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.

Sumber Pendanaan

Biaya yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Pasuruan tahun Anggaran 2009

Lingkup Lokasi Kegiatan

a. Lingkup kegiatan

1. Peningkatan kerja sama perdagangan intenasinal
2. Promosi produk-produk unggulan berupa furniture mebel dan logam

b. Lokasi kegiatan

kegiatan ini akan dilakukan dijakarta (Incraft dan Smes'co), Bali, Balikpapan dan Pasuruan sendiri.

Jangka waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini diregistrasikan dalam waktu 6 bulan yaitu April sampai dengan oktober

4.5. 3 Pengembangan dan Pembinaan Aspek Sumber Daya Manusia

Dalam ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam suatu industri. SDM dalam suatu industri kecil tidak harus terpenuhi dari segi kuantitatif juga dari segi kualitasnya misalkan dalam hal kemampuan keterampilan yang dimiliki dan bahkan pada tingkat keinginan dan motivasi untuk meningkatkan mutu produksi

Sebenarnya SDM para pengrajin jika dilihat dari pendidikan formalnya memang sangat rendah dan minim mereka rata-rata hanya berpendidikan SMP bahkan SD namun jika kita lihat dari hasil kerajinan yang dihasilkan sangat mengherankan hal ini dapat diketahui dari mutu hasil kerajinan itu sendiri bahkan produk dari pada industri ini sudah terkenal baik dari sisi hasil maupun kualitasnya.

sebenarnya hal ini dikarenakan keahlian dengan tradisional yang sudah ada sejak dari dulu dan diturunkan secara turun-menurun disekitar sentra ini mereka memiliki keterampilan mengukir kayu dan memahat hancul dari alat-alat pertukangan biasa hal ini patut kita lestarikan dan kita bina ditambah juga sebenarnya para pengrajin juga banyak berasal dari jepara mereka umumnya membaur dan menetap disekitar lingkungan industry hal ini yang menyebabkan beraneka ragam keahlian.

(Wawancara pada Disperindag taggal 15 juli 2009)

Dengan program pengembangan dan pembinaan yang ada dalam renstra tahun 2009 dikelompokkan menjadi dua yaitu

Program : Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

UKM

Kegiatan :

Latar belakang

Keberadaan pengusaha kecil dan menengah termasuk yang bersekala usaha mikro serta koperasi (UMKM) merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar masyarakat posisi itu menuntut peran UMKM sebagai jaringan utama dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan. Namun perkembangannya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan pelaku ekonomi yang lain. Jumlah UMKM serta penyerapan tenaga kerja yang besar dengan kualitas SDM yang rendah menjadi hambatan mendasar dalam pengembangan UMKM disamping itu terdapat berbagai permasalahan kebijakan termasuk regulasi, Birokrasi dan retribusi yang berlebihan sehingga menyebabkan

beban biaya transaksi yang besar pada UMKM dan keterbatasan akses terhadap sumberdaya produktif seperti modal, teknologi, pasar dan informasi. Sementara itu tantangan eksternal yang mendasar adalah pesatnya perkembangan Globalisasi ekonomi dan liberalisasi. Oleh karena itu berbagai upaya harus dilakukan segera, terutama yang berkaitan dengan perbaikan kelembagaan maupun peningkatan daya beli konsumen dan perluasan akses kesumberdaya produktif dan peningkatan ketersediaan pendanaan. UMKM juga menghadapi masalah struktural yang pemecahannya membutuhkan waktu dan keseriusan terutama pada keterbatasan jumlah lembaga penyediaan layanan pengembangan usaha.

Tantangan kedepan dalam pengembangan kenaikan juga disarankan semakin barseiring dengan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan yang berlangsung sangat cepat bersamaan dengan pesatnya mobilisasi dana infestasi dan semakin pendeknya daur hidup produk. Adanya tantangan tersebut yang disertai oleh cepatnya perubahan selera konsumen dan terbukanya pasar bebas memberikan konsekuensi pada perlunya mempercepat peningkatan kemampuan UMKM secara lebih merata untuk lebih berdaya saing. Penguatan UMKM salah satunya diarahkan kepada fasilitasi Stake Holder dan UKM pada Pemerintah Daerah termasuk Kabupaten/kota (paradigma otonomi daerah) meliputi :

1. Penguatan kepada aparat yang membidangi KUMKM
2. Pelaku KUMKM, lembaga pembiayaan dan pihak terkait
3. Kegiatan kemitraan dengan pembuat aturan (DPRD)

Maksud dan Tujuan

Maksud :

1. Meningkatkan daya saing dan skala usaha KUMKM dengan kegiatan ekonomi daerah
2. Tersedianya dan berperannya lembaga-lembaga pendukung untuk meningkatkan akses UMKM terhadap SDM, Modal, Pasar, Teknologi dan Informasi
3. Tumbuhnya wirausaha baru dan meningkatnya pengetahuan dan sikap wirausaha KUMKM.

Tujuan :

1. Untuk mengembangkan pelaku kewirausahaan menumbuhkan WUB manajemen kemampuan dan kualitas manajemen serta memperkuat atau meningkatkan dengan penguasaan teknologi jaringan informasi.
2. Memfasilitasi peningkatan kemitraan UMKM dalam pembuatan aturan.
3. Terselenggaanya pelatihan kewirausahaan
4. Terselenggaranya pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi dan KUD
5. Terselenggarakan keterampilan usaha bagi anggota koperasi sebagai upaya peningkatan kualitas usaha.

Sasaran.

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya pengetahuan serta sikap wirausaha dan meningkatnya produktifitas UMKM serta meningkatnya penyediaan lapangan usaha dan penyerahan tenaga kerja.

Nama dan Organisasi pengguna jasa

Bidang koperasi, UMKM Disperindag

Sumber pendanaan

Biaya yang digunakan dalam pelaksanaan program dibebankan pada anggaran APBD tahun 2009 Kota Pasuruan.

Lingkup lokasi Program, data dan fasilitas penunjang

Lingkup : Penyusunan rencana serta persiapan kegiatan yang diperlukan guna terselenggarakan masing-masing kegiatan dan identifikasi, inventarisasi berbagai penyampaian laporan terhadap hasil pelaksanaan kegiatan.

Lokasi kegiatan

- Batu Malang _ Diklat dan Workshop
- Kota Pasuruan _ bintek

Data dan fasilitas penunjang

Pengamat kegiatan pada tahun sebelumnya yang terkait Permasalahan dan unsur strategis.

Metodologi

- a. Bagian literatur
- b. Workshop, Diklat, Bintek

Waktu Pelaksanaan

- Work shop dan Bintek
- Diklat Kewirausahaan
- Diklat Manajemen Koperasi

Program : Peningkatan kemampuan pengusaha untuk menunjang ekspor

Kegiatan :**Latar Belakang**

Dalam era globalisasi perdagangan bebas dan kemandirian para pengusaha sangat menentukan dalam persaingan untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan usaha. Hal tersebut sangat berperan dalam negeri, utamanya pasar luar negeri atau ekspor.

Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu peningkatan keterampilan dalam penanganan prosedur dokumen ekspor karena pengetahuan dan keterampilan tersebut sangat menunjang dalam proses ekspor dan pemanfaatan fasilitas-fasilitas dari negara-negara lain.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pengiriman peserta diklat ekspor dan impor sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pengusaha ekspor dan calon pengusaha ekspor dari Kota Pasuruan
- b. Meningkatkan pengetahuan dan informasi tentang perdagangan ekspor dan impor bagi pengusaha Kota Pasuruan.
- c. Meningkatkan kerja sama dan kemitraan dalam pengembangan perdagangan ekspor produk-produk Kota Pasuruan.

Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah pengusaha-pengusaha yang mempunyai produk-produk ekspor dan impor.

Organisasi

Bidang Perdagangan dan Perindustrian Kota Pasuruan.

Sumber Pendanaan

Biaya yang digunakan dibebankan pada anggaran Pendapatan dan belanja Kota Pasuruan tahun 2009

Lingkup lokasi kegiatan

Lingkup kegiatan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengusaha untuk menunjang ekspor import

Lokasi kegiatan : Pusat Pelatihan dan Pengembangan Ekspor daerah Propinsi Jawa timur di Surabaya.

Waktu Pelaksanaan

Input : Tersedianya Dana

Output : Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersedianya dana dan informasi dari calon pengusaha importir yang unggul di Kota Pasuruan.

4.5.4. Pengembangan dan Pembinaan Aspek Teknologi

Aspek teknologi erat kaitannya dengan modernisasi dari pada produksi dan pembuatan hasil industri karena mekanisasi yang semakin canggih tentu berpengaruh juga pada industri kecil namun hasil akhirnya tentu adalah pencapaian efisiensi dan efektifitas dari pada hasil produksi.

Menurut Bapak Dr. Kuncoro, MSi selaku kepala dinas Dalam kaitannya pengembangan Aspek teknologi mengatakan :

*Berkenaan dengan aspek teknologi sebenarnya suatu hal yang relative kami dari pihak Dinas selaku pemberi penyuluhan juga sudah mengupayakan adanya modernisasi dan bantuan berbagai alat-alat produksi namun semua itu juga didukung juga dengan adanya kemampuan dari para pengrajin itu sendiri mereka cenderung menggunakan alat-alat tradisional namun kualitasnya juga tidak kalah dengan hasil yang menggunakan mesin. hal ini dapat kami usahakan namun secara bertahap.
(Wawancara pada Disperindag tanggal 15 juli 2009)*

Dalam kaitannya pengembangan Aspek Teknologi dalam Renstra tahun 2009 peneliti mengklasifikasi dan menghubungkan ada dua program untuk dapat meningkatkan pengembangan Aspek Teknologi yaitu :

Program : Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri**Kegiatan :**

1. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
2. Perluasan Penerapan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
3. Pengujian standart Produk manufaktur.

Latar Belakang

Reformasi dan globalisasi yang diiringi dengan krisis ekonomi berdampak terhadap persaingan industri dan kondisi perusahaan yang ingin mempertahankan eksistensinya melalui berbagai cara agar tetap berjalan dan berproduksi.

Berbagai tuntutan dalam persaingan industri maka perlu adanya program peningkatan teknologi industri dengan kegiatan diatas.

Kondisi Kota Pasuruan dengan jumlah industri sebanyak 701 yang terbagi dalam industri IKAHH sebanyak 487 dan ILMEA sebanyak 214 dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 16.492 orang.

Maksud dan Tujuan

dengan adanya program peningkatan teknologi industri di UPTD

tujuan

untuk mengembangkan UPTD kota Pasuruan dibidang Teknologi industri

sasaran

Sasaran yang hendak dicapai meliputi UPTD pengusaha IKM Kota **Pasuruan**.

Sumber pendanaan

Biaya yang digunakan APBD Kota Pasuruan tahun anggaran 2009

Input : Tersedianya dana, SDM, Peraturan daerah

output : terlaksanannya pelayanan teknologi industri di UPTD

outcome : berkembangnya UPTD dibidang teknologi industri.

Time schedule

| No | Keterangan | Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nop | Des |
|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | Pengembangan dan Pelayanan teknologi industri(UPTD) | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Perluasan penerapan kapasitas iptek system produksi | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pengujian standart produk manufaktur | | | | | | | | | | | | |

Program : Peningkatan Kapasitas IPTEK dalam sistem produksi**Kegiatan :**

1. **Pengembangan Kapasitas pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan kualitas**
2. **Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri.**
3. **Pembentukan gugus kendali mutu dalm percepatan produksi.**

Latar belakang

Pentingnya peranan teknologi dalam pembangunan suatu bangsa telah diakui secara luas, terutama oleh bangsa-bangsa yang sudah mencapai kemajuan ditingkat internasional di era otonomi daerah dan globalisasi dewasa ini proses pembanguann diindonesia harus mengkombinasikan antara dimensi ekonomi dengan dimensi teknologi. Teknologi dapat dipilah menjadi empat komponen yaitu : Perangkat teknis (*technoware*), kemampuan Sumber daya Manusia (*Humanware*). Perangkat informasi (*inforware*) dan perangkat organisasi atau kelembagaan dan peraturan regulasi keempat komponen teknologi saling komplementer antara satu dengan yang lainnya. Dalam rangka pemulihan ekonomi untuk segera menggerakkan sektor riil dalam jangka pendek, pemerintah maupun Program revitalisasi dan pengembangan industri dan perdagangan yang difokuskan salah satunya pada peningkatan teknoligi industri dan perdagangan yang difokuskan pada peningkatan teknologi industri, meliputi peningkatan efektifitas dan efisiensi produktifitas penerapan Standarisasi, pengembangan lembaga sertifikasi produk, pengembangan kemampuan invovasi melalui penelitian dan pengembangan industri (Industrial Reserch & Development) yang berorientasi kepada nilai tambah dan pasar serta peningkatan kandungan lokal

sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan kapasitas iptek sistem produksi dalam kegiatan industri, perlu kiranya pemerintah pasuruan melaksanakan kegiatan bimbingan dan pelatihan serta bantuan peralatan teknologi pengolahan proses produksi untuk peningkatan mutu produk

Maksud dan tujuan

Untuk memfasilitasi pembentukan Gugus kendali Mutu Pada pengusaha mebel.

Adapun tujuan

Untuk meningkatkan proses dan mutu produksi mebel

Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai meliputi pengusaha mebel di Kota Pasuruan

Sumber Pendanaan

Biaya yang digunakan dalam pelaksanaan teknis dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah Kota Pasuruan tahun Anggaran 2009

Input : Tersedianya Dana, SDM, Peraturan daerah

Output : Terlaksanannya fasilitasi pembentukan Gugus kendali Mutu Pada Industri mebel

Outcome : Peningkatan Kemampuan daya saing produk mebel

Time Scedule

| Kegiatan | Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Spt | Okt | Nop | Des |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.Pengembangan kapasitas, pranata pengukuran standarisasi pengujian dan pengukuran | | | | | | | | | | | | |
| 2.Pengembangan sistem inovasi teknologi industri | | | | | | | | | | | | |
| 3.Pembentukan Gugus kendali mutu dalam percepatan produksi | | | | | | | | | | | | |

4.6. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam mengembangkan industri kecil mebel dan kayu

4.6.1 Faktor Pendukung dalam mengembangkan industri mebel dan kayu.

a. Lokasi yang strategis

Mungkin banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa di Desa Bukir di pinggir Kota Pasuruan, Jawa Timur, juga ditemukan sentra kerajinan Mebel yang sangat potensial dan terkenal diluar jawa.

Kalo kita pergi ke sana pada hari Jumat dan Sabtu. Jalan yang juga berfungsi sebagai jalur utama Pasuruan–Surabaya itu akan sangat macet, dipenuhi truk-truk, pikap, becak hingga andong pengangkut mebel.

Para penjual atau pembeli sudah mengerti, hari-hari tersebut merupakan hari transaksi. Itulah potret kawasan mebel Bukir, Pasuruan, kawasan itu mulai berkembang sejak tahun 1973. Pada awalnya, sentra itu terletak di Jalan Jawa di salah satu sudut Kota Pasuruan. Karena letaknya yang berada disepanjang jalan perlintasan antara kota-kota besar yaitu Surabaya, Banyuwangi, Probolingga, Jember Hingga Bali sebagai pusat dari kerajinan.

b. Kualitas Produk yang sudah terkenal baik

Dari data diketahui banyaknya desa di Kabupaten Pasuruan-paling tidak terdapat 11 desa yang terletak di pinggir Kota Pasuruan yang memiliki spesifikasi keahlian membuat mebel tertentu setiap perajin memiliki keahlian membuat produk mebel. ada anggapan bahwa setiap desa dikawasan ini memilki keahlian berbeda-beda dan juga memiliki spesialisai dalam pembuatan produk mebel. Keahlian itu bisa juga dilihat di Desa Jaelan. Di desa ini, rata-rata perajinnya lebih terampil membuat bufet dibandingkan mebel jenis lainnya. Kemudian ada Desa Tahunan dan Desa Sungi yang perajinnya ahli membuat lemari pakaian.

Di Desa Pilang dan Desa Kompyangan, para perajin memiliki keahlian membuat meja dan kursi makan. Sentra pembuatan tempat tidur dapat ditemukan dengan mudah di Desa Plinggisan, Desa Pilang, dan Desa Sidogiri. Sedangkan meja dan kursi tamu dibuat di Desa Sebani dan Desa Bukir.

Sumber para pengrajin menyebutkan, di setiap desa itu sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai perajin. Hanya sebagian kecil yang memilih profesi lain. Di desanya sendiri, Desa Tidu, ada sekitar 645 keluarga, dan sekitar 75 persen adalah perajin yang membuat bufet. Setiap lokasi perajin

menampung lima sampai enam pekerja. Dalam seminggu lima perajin bisa menyelesaikan delapan buah bufet. Sedangkan untuk meja ataupun kursi yang masih setengah jadi, seorang perajin bisa menyelesaikan satu buah setiap hari. Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa industri ini sudah ada sejak lama dan kualitasnya juga sangat baik.

4.6.2 Faktor Penghambat dalam mengembangkan industri mebel dan kayu.

Sedangkan untuk factor penghambat yang dapat menjadikan industri ini mengalami kemunduran dan menjadikan tidak berkerjanya system dalam klaster industri. Adapun guna mengidentifikasi dari masalah dan penghambat dari industri ini adalah untuk dapat dibuat suatu antisipasi perbaikan dari berbagai pihak terkait secara garis besar serta tidak dapat mengikuti perkembangan pasar peneliti melihat secara obyektif ada lima antara lain :

a. Masih Minimnya Perhatian Dari Instansi Terkait

Hal ini dibuktikan dari sumber wawancara dengan para pelaku usaha yang menurut kurangnya penyuluhan dan sosialisasi bantuan oleh instansi terkait meski sudah adanya UPTD terbukti disebutkan bapak Mikson Toyifur :

Mengenai dengan pembinaan dan bantuan yang saya lihat selama ini sangat kurang seperti contoh pembuatan dua pasar mebel bukir dan pasar randu agung terbukti sangat tidak efektif. Para penjual hasil kerajinan malah lebih suka berjualan dipinggir jalan sepanjang sentra industri ini untuk itu menurut saya perlu adanya kajian ulang dari pemerintah terkait.

Dari keterangan bapak mikson toyifur tadi dapat peneliti mesimpulkan perhatian pemrintah kurang tepat sasaran dan terkesan kurang kontinuitas tidak secara berkelanjutan. Sebaiknya pemerintah melibatkan para pengusaha sendiri dalam pembuatan kebijakan dan inovasi program hal ini tentu akan sangat membantu dan mengakomodasi kepentingan para pelaku usaha.

b. Masih diperlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan mutu produksi.

Meskipun kualitas dan hasil produksi dalam sentra ini dinilai sangat baik namun perlunya peningkatan hal ini dapat terjadi jika pemerintah terkait dapat melakukan pelatihan dan penyuluhan terstruktur untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan mutu produk yang dihasilkan

c. Kurangnya pengetahuan dan memperluas jaringan pasar

Pada poin ini menurut peneliti sangat menarik karena jaringan pasar adalah kunci dari Klaster dapat berkembang dengan baik adapun salah satu pendapat dari salah satu pelaku usaha UD AMANAH pemilik bapak Mikson Toyifur :

“ Menyebutkan ada banyak sebenarnya para pengusaha mebel pasuruan yang menjual dan memasarkan produk mereka hingga keluar negeri bahkan beromset milyaran tapi mereka cenderung bergerak sendiri dan tidak ada upaya untuk menularkan kepada pengusaha lain ”

Beliau juga menyebutkan :

“Untuk memperoleh jaringan pasar yang luas dari industri mebel disamping para pelaku industri itu sendiri juga peran pemerintah sebagai jembatan yang mengubungkan antar daerah untuk dapat bekerja sama. Hendaknya juga dibuat suatu hubungan antara pengusaha yang go internasional dengan pengusaha local untuk dapat bekerja sama memasarkan hasil kerajinan pasuruan kepada dunia luar”
(Wawancara dengan pelaku usaha tanggal 17 juli 2009)

Jaringan pasar tergantung pada usaha para pengusaha sendiri bagaimana dapat memasarkan dan menciptakan kepercayaan kepada para pelanggan pemerintah daerah khususnya dinas juga harus memiliki peran aktif sebagai penyedia data dan melakukan inovasi untuk dapat menjabatani keinginan pengusaha dengan masyarakat konsumsi hasil kerajinan.

d. Nilai Bahan Baku semakin mahal

Bahan baku merupakan hal yang paling penting dalam proses produksi pembuatan barang jika hal ini tidak terpenuhi otomatis akan mengganggu sentra industri mebel ini Seperti yang diutarakan Sabar, perajin mebel :

"Saat ini bahan baku sangat susah dicari. Kalaupun ada, harganya sulit terjangkau," Yang bisa dilakukan para perajin mebel sekarang ini, hanya bisa berharap dapat penghasilan untuk kebutuhan perut saja. Sebab, selisih antara harga jual dengan modal yang sebelumnya dikeluarkan hanya tipis. Bagaimana kita bisa maju kalo bahan baku saja susah didapat (Wawancara dengan pelaku usaha pada tanggal 17 juli 2009)

Berkenaan dengan hal diatas bahan baku harus menjadi prioritas utama dalam penyediaan awal bagi terciptanya suatu barang.

e. Persaingan harga diantara unit usaha

Permasalahan persaingan harga antar unit usaha timbul karena adanya para tengkulak hal ini disampaikan Said Khusni, seorang penjual hasil mebel asal

Kelurahan Krapyakrejo mengungkapkan indikasi kuat adanya permainan tengkulak. Para tengkulak ini datang dengan membawa modal besar.

"hambatan yang terbesar sekarang adalah dengan adanya para tengkulak Mereka menawarkan pembelian mebel dengan harga miring alias sangat murah. Para perajin yang kesulitan modal, harus melepas produknya dengan pembelian tersebut. Jangan berpikir untung, bisa impas dengan biaya operasionalnya saja sudah disyukuri," .Setelah membeli produk perajin dengan harga miring, pengusaha besar luar daerah itu menghadang pembeli dengan membuka toko mebel berskala besar. Pola persaingan tidak fair ini membuat jalan pemasaran perajin mebel bermodal kecil menjadi tertutup. Sehingga tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali melempar produknya pada para tengkulak. (Wawancara dengan pelaku usaha tanggal 17 juli 2009

e. Faktor modal yang tidak seimbang dan Permainan para tengkulak

Faktor ini merupakan faktor yang dihadapi industri kecil pada umumnya modal menjadi prioritas sebagai proses pertama produksi produk mebel faktanya meski ada kebijakan dari pemerintah pusat mengenai bantuan sector modal masih minim masyarakat yang menggunakan kemudahan ini. Diatas telah dijelaskan sebenarnya ada dua pelaku usaha disektor ini yaitu pengrajin dengan pedagang. Para pengrajin mebel sector kecil umumnya menggantungkan kelangsungan usahanya pada penjualan produk. Setelah mereka memiliki modal mulai memproduksi barang lagi. Kedua para pedagang dan pemilik bedak mereka menggantungkan usaha mereka pada penjualan produk mereka kepada konsumen. Bedanya juga pada kedua pelaku usaha ini juga modal apabila mereka mempunyai modal yang besar dengan sangat cepat usaha mereka berkembang demikian sebaliknya para pemilik modal kecil semakin hari semakin mendekati kehancuran

4.B. PEMBAHASAN

4.1 Program kerja Dinas Koperasi perindustrian dan perdagangan Kota Pasuruan tahun 2009

4.1.1 Visi dan Misi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota pasuruan

a. Visi

Terwujudnya usaha perkoperasian, industri, perdagangan dan jasa berbasis daya saing Daerah.

b. Misi

1. Meningkatkan sumberdaya dan kinerja Dinas Koperasi perindustrian dan perdagangan.
2. Memberdayakan gerakan koperasi dan usah mikro, kecil dan menengah dalam pencapaian pembangunan ekonomi kerakyatan.
3. Mengembangkan perdagangan dalam negeri dan luar negeri melalui pengendalian usaha dan akses pasar.
4. Meningkatkan daya saing industri kecil menengah dan industri berat serta dengan memperhatikan faktor-faktor produksi.
5. Memperdayakan ekonomi melalui recoveri pembangunan dibidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

4. 2. Rencana strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pasuruan tahun 2009

1. Latar Belakang

Dalam era otonomi daerah dan globalisasi suatu organisasi dituntut untuk semakin dapat efisien, efektif dan profesional, serta lebih meningkatkan kinerjanya. Sebagaimana halnya pemerintah daerah saat ini mempunyai kewenangan yang cukup luas dalam urusan. Oleh karena itu untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas kerja organisasi khususnya organisasi perangkat daerah, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai dan budaya organisasi (*organizational culture*), utamanya yang terkait dengan visi, misi kinerja (*performance*) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.

Sesuai dengan konsepsi dasar dan pemahaman tentang organisasi publik tentunya kita perlu memahami pula konsepsi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta regulasi yang mengaturnya juga perlu dipatuhi oleh para pelaku organisasi public atau perangkat daerah. Dengan demikian sumber daya aparatur mempunyai peran yang sangat penting, mengingat sumber daya aparatur merupakan salah satu faktor atau komponen organisasi seagai penentu bahwa organisasi tersebut menjadi pasif atau aktif. Agar Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menjadi aktif diperlukan

pengelolaan sumber daya yang memiliki secara benar dan profesional serta memiliki mekanisme kerja, sistem prosedur kerja dan menentukan strategi pencapaian kinerja.

Sesuai persepsi dasar tentang nilai-nilai pada kultur organisasi serta mengacu pada regulasi yang ada maupunhun faktor lingkungan yang mempengaruhi maka dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan pada tahun 2009 akan melakukan trobosan-trobosan yang inovatif dengan dilandasi adanya perubahan-perubahan regulasi dari pemerintah yaitu dengan membuat program sebagai berikut :

2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya program kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2009 adalah mengkorelasikan antara visi dan misi, kebijakan rencana strategi, tugas pokok dan fungsi yang dapat diaplikasikan melalui program kegiatan.

Sedangkan tujuan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2009 adalah :

- Bagi Pemerintah Kota Pasuruan yaitu untuk menentukan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akuntebel khususnya hal yang berkaitan dengan perkoperasian, perindustrian dan perdagangan serta pelaksanaan perbaikan kinerja pembangunan ekonomi daerah.
- Bagi Stake Holder yaitu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai agenda kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui tugas pokok dan fungsi kinerja pada masing-masing perangkat daerah.
- Bagi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2009.

3. Dasar Pelaksanaan

Dasar pelaksanaan program kerja tahun 2009 dari dinas Perindustrian dan perdagangan kota pasuruan adalah :

1. Peraturan pemerintah **RI Nomor 38 Tahun 2007** Tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah daerah dengan propinsi kabupaten kota.
2. Peraturan pemerintah **RI Nomor 41 tahun 2007** tentang organisasi perangkat daerah.

4. Strategi

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan mempunyai strategi dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan serta peluang yang ada. Adapun strategi diambil adalah :

1. Meningkatkan Sumberdaya dan kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
2. Memberdayakan gerakan koperasi dan usaha mikro menengah dalam pencapaian pembangunan ekonomi kerakyatan.
3. Meningkatkan daya saing industri kecil menengah dan industri berat Mengembangkan perdagangan dalam negeri dan luar negeri melalui pengendalian usaha dan akses pasar.
4. Meningkatkan daya saing industri kecil menengah dan industri berat serta dengan memperhatikan faktor-faktor produksi.
5. Memperdayakan ekonomi melalui recovery pembangunan dibidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

5. Program / kegiatan

Dengan mempertimbangkan strategi / kebijakan yang diambil tahun 2009 Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kota Pasuruan mempunyai program khusus yaitu pemberdayaan ekonomi melalui Recovery Pembangunan bidang Koperasi, Perindustrian Perdagangan dengan model pendampingan terstruktur serta ditunjang Program/kegiatan tahun 2009 sebagai berikut :

1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :
2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan :
3. Program : Peningkatan disiplin aparatur
Kegiatan :

4. Program : Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
Kegiatan :
5. Program : Peningkatan pengembangan sisitem pelaporan capaian kinerja
Dan keuangan
Kegiatan :
6. Program : Penciptaan iklim Usaha kecil menengah
Kegiatan :
7. Program : Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan usaha mikro
Kegiatan :
8. Program : Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM
Kegiatan :
9. Program : Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM
Kegiatan :
10. Program : Pemberdayaan Koperasi
Kegiatan :
11. Program : Perlindungan Konsumen dan Pengamanan perdagangan
Kegiatan :
12. Program : Peningkatan Kerja Sama Perdagangan internasional
Kegiatan :
13. Program : Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.
Kegiatan :
14. Program : Peningkatan Efektifitas Perdagangan Dalam Negeri
Kegiatan :
15. Program : Pembinaan Pedagang kaki lima dan Asongan
Kegiatan :
16. Program : Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
Kegiatan :
17. Program : Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Kegiatan :
18. Program : Peningkatan Penataan Struktur industri.
Kegiatan :
19. Program : Pengembangan Sentra Industri Potensial

4.3. Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengembangan dan pembinaan industri mebel Kota Pasuruan

4.3.1 Pengembangan dan Pembinaan Aspek Produksi

Pengembangan dan Pembinaan Aspek Produksi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan yang ada dalam renstra kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan peneliti menghubungkan mengambil dua program berkenaan dengan pengembangan Aspek Produksi yaitu dua program yaitu :

- a. Peningkatan Kualitas kelembagaan dan Koperasi
- b. Penataan Struktur Industri

Sedangkan yang akan dijabarkan dibawah ini ada kaitanya dengan dengan program Disperindag berhubungan dengan Aspek Produksi dalam Renstra tahun 2009 yang antara lain :

Program : Peningkatan Kualitas kelembagaan dan Koperasi

Kegiatan :

Latar Belakang

Hal-hal yang melatar belakangi peningkatan kelembagaan dan Koperasi adalah cinta yang kurang baik dari masyarakat partisipasi anggota rendah, pengurus yang kurang transparan yang berdampak kepada kinerja koperasi itu sendiri.

Disamping itu juga perlu diperhatikan antara lain banyaknya koperasi yang tumbuh karena terangsang akibar fasilitas-fasilitas yang tersedia bahkan sengaja dirangsang untuk kepentingan-kepentingan tertentu, yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan sebagai badan hokum, namun tidak terpantau dengan baik, Untuk itu tentunya perlu sesuatu kebijakan dukungan untuk menubuhkembangkan atau meningkatkan kualitas usaha dan kelembagaan seperti penyusunan dan penyempurnaan peraturan yang berkaitan dengan Koperasi, penataan dan dukungan penguatan organisasi koperasi serta penumbuh wirausaha mandiri malalui pelatihan Diklat pelatihan Teknis Non teknis dan sebagainya. Pada akhirnya segenap esensi dari pada menejemen Koperasi adalah mengoptimalkan potensi organisasi Koperasi (anggota, Pengurus, Pengawas dan Manajemen atau pelaksana)

Maksud dan Tujuan

- c. Maksud : Diharapkan dapat menumbuh kembangkan sosok koperasi yang sesuai dengan jati diri koperasi dengan menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Koperasi.
- d. Tujuan : Revitalisasi Kelembagaan dengan kegiatan agar dapat menjalankan aktifitas dengan menerapkan nilai dasar dan prinsip koperasi yang membedakan dengan Bidang usaha lain.

Program : Penataan Struktur Industri**Kegiatan :**

1. **Pembinaan keterkaitan produksi industri Hulu hingga hilir**
2. **Update potensi IKM dan keterkaitan hulu hilir dalam rangka penciptaan kluster industri.**

Latar Belakang

Acuan pembangunan yang terkait langsung dengan sektor industri dan perdagangan adalah :

1. Mengembangkan usaha kecil menengah dan koperasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, peningkatan akses kepada sumber daya produktif, Pengembangan kewirausahaan dan pengusaha kecil, menengah koperasi berkeunggulan kompetitif.
2. Memacu peningkatan daya saing melalui pengembangan ekspor, pengembangan industri kompetitif, penguatan institusi pasar dan persaingan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Penataan struktur industri yang berorientasi pada daya saing global dengan prioritas pembangunan keunggulan kompetitif dari cabang-cabang industri yang mengelola sumberdaya dalam negeri yang dapat terbaharukan dan berkeunggulan kompetitif.
4. Pengembangan industri pendukung, yang didukung oleh langkah-langkah pengembangan produk IKM, pengembangan kemampuan SDM, Pemasyarakatan penggunaan teknologi informasi, pengembangan teknologi mutu, desain dan pengemasan.
5. Produk Kluster kecil dan menengah IKM kota pasuruan sangat potensial untuk dikelola menjadi produk berkualitas ekspor. Pemerintah pasuruan

memberikan perhatian yang besar untuk mengembangkan IKM, antara lain dengan memberikan pelatihan teknologi proses dan manajemen produksi serta fasilitasi kepada pelaku pasar melalui kegiatan industri.promosi.

Dalam upaya untuk penataan struktur industri di Kota Pasuruan, maka perlu dilakukan updating data potensi IKM mebel dan keterkaitan hulu hilir melalui kegiatan pendataan dalam rangka persiapan penciptaan klaster industri.

Pembahasan

Kesimpulan hasil penelitian peneliti mengungkap banyak hal yang sangat penting dalam kaitannya penciptaan kualitas produk klaster dalam industri mebel sebenarnya sejak lama telah terjadi pola klaster dengan sendirinya terbukti dengan adanya pengelompokan adanya hasil tiap desa tentang klasifikasi hasil kerajinan. Dari begitu banyaknya desa di Kabupaten Pasuruan-paling tidak terdapat 11 desa yang terletak di pinggir Kota Pasuruan-yang memiliki spesifikasi keahlian membuat mebel tertentu setiap perajin memiliki keahlian membuat produk mebel

Ada anggapan bahwa setiap desa dikawasan ini memiliki keahlian berbeda-beda dan juga memiliki spesialisasi dalam pembuatan produk mebel. Keahlian itu bisa juga dilihat di Desa Jaelan. Di desa ini, rata-rata perajinnya lebih terampil membuat bufet dibandingkan produk mebel jenis lainnya.

Kemudian ada Desa Tahunan dan Desa Sungi yang perajinnya ahli membuat lemari pakaian. Di Desa Pilang dan Desa Kompyangan, para perajin memiliki keahlian membuat meja dan kursi makan. Sentra pembuatan tempat tidur dapat ditemukan dengan mudah di Desa Plinggisan, Desa Pilang, dan Desa Sidogiri. Sedangkan meja dan kursi tamu dibuat di Desa Sebani dan Desa Bukir. Jadi setiap produk yang dihasilkan sudah membentuk suatu kelompok yang berada di tiap desa yang berbeda-beda. Hal ini juga didukung oleh kemampuan tiap individu dalam hal ini para pengrajin karena diketahui bahwa mereka memperoleh kreatifitas dan keahlian sudah dari turun-temurun dari orang tua sebelum mereka seperti keahlian membuat buffet, kursi, lemari yang sudah ada sejak dulu. Jadi, mereka sudah mengetahui karakter dan kekhususan dari produk yang mereka buat. Hal ini merupakan nilai tambah bagi terciptaan

klaster berdasarkan klasifikasi disamping adanya pengembangan komponen lain terkait industri pendukung dari pada klaster industri

Berhubungan dengan Upaya juga dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas perindustrian dan perdagangan peneliti memperoleh data yaitu dengan dua program baru tahun 2009 yaitu yang *pertama*, mengembangkan dan perubahan melalui peningkatan peran kelembagaan juga menggalakkan koperasi sebagai salah satu mitra dari industri kecil hal ini tentu sangat membantu dalam kaitannya aspek modal dan biaya produksi. Diharapkan dengan adanya koperasi para pengrajin yang kekurangan modal dapat memperoleh pinjaman dan kemudahan lain. Dan dari koperasi untuk dapat membantu pembiayaan baik produksi maupun modal usaha. Namun, kenyataan di Lapangan sangat berbeda cenderung mengarah nilai negatif koperasi yang ada masih berbentuk koperasi simpan pinjam yang justru membebani dengan bunga yang tinggi dan persyaratan yang rumit.

Menurut Pendapat penulis untuk mengatasi permasalahan modal bagi pengusaha kecil yang ada di Industri ini adalah membentuk koperasi kusus yang koperasi kusus mebel menjamin produk mebel maksudnya ketika pengusaha kecil membuat produk mebel dapat dijual dan membeli di koperasi kusus mebel tersebut. Pemikiran ini muncul dari peneliti karena diketahui dilapangan kebanyakan pedagang mebel di industri ini adalah para pendatang yang berasal dari daerah lain yang harus memiliki modal yang besar untuk menjalankan usahanya. Modal yang besar ini dibutuhkan karena ketika produk mereka dijual biasanya terjadi pada hari sabtu yang ramai dikunjungi pembeli otomatis para pedagang setelah produk yang dijual harus membayar pembuat produk mebel atau para pengrajin, sedangkan apabila para pembuat produk mebel tidak laku produknya mereka akan cenderung menjual berada dijalan-jalan untuk menunggu para pembeli dan harganya pun sangat jauh lebih murah dibandingkan dengan produk yang dioperkan kepada pedagang langsung. Tentu saja hal ini sangat merugikan para pengrajin mebel kususnya, pengrajin rumahan yang menggantungkan mata pencarian dengan menjual produk rakitan mereka.

Pemerintah daerah dalam kaitannya sebagai perencana program-program kebijakan bagi masyarakat yang berwenang khususnya Dinas Perindustrian dan perdagangan jika mau dan bisa membuat koperasi bersama mungkin bisa ditempatkan disetiap Dinas pasar yang ada antara lain pasar mebal Bokir dan pasar mebel Randu Sari. Koperasi mebel ini tentu akan sangat efektif apabila dikelola dan dikembangkan oleh para pelaku usaha sendiri kenapa para pelaku usaha kecil sendiri karena mereka lebih mengetahui kondisi dan keadaan di industri ini Meski dibutuhkan juga penyuluh yang berasal dari pemerintah.

Peneliti dapat menyimpulkan dari sumber dan pengamatan dilapangan dan data-data yang diperoleh, sebenarnya pemerintah sudah maksimal dalam pengembangan industri mebel ini hal ini dicontohkan Dinas perindustrian baru-baru ini membentuk dan membuat dua pasar khusus mebel yang khusus menjual produk mebel yaitu pasar mebel Bokir dan pasar mebel Randu Sari sebenarnya konsep dari program ini sangat bagus namun kenyataan di lapangan pasar ini sekarang sepi dan para pembeli cenderung membeli dibedak dan pedagang pinggiran jalan. Peneliti menyimpulkan dalam pembuatan kebijakan Dinas perindustrian dan perdagangan kurang melibatkan para pelaku usaha sendiri seharusnya mereka berkonsultasi dan minta pendapat dari para pelaku usaha di Industri ini.

Program yang kedua yaitu penataan struktur industri sendiri dari hulu hingga hilir sehingga hal ini membuktikan bahwa pemkot Pasuruan sudah melakukan berbagai upaya perencanaan yang lebih untuk mengatur dan mengembangkan sektor industri mebel ini menuju penciptaan dalam kaitanya dengan klaster industri. Namun dilapangan masih dalam tahap persiapan dan pendataan. Kesulitan proses pendataan adalah disebabkan karena jumlah yang banyak dan tersebar jadi kebanyakan mereka tidak terdaftar. Diketahui bahwa program penataan struktur industri pada poin kelima menjelaskan adanya pengembangan industri pendukung maksudnya disamping penataan struktur industri dari industri rumahan hingga industri besar juga sudah dikembangkan industri-industri baru yang termasuk dalam industri pendukung konsep klaster industri contoh dari industri pendukung seperti industri penggrajian kayu diketahui di lapangan industri ini sudah mulai banyak diterapkan di lapangan

seperti contoh UD Mitra Usaha yang khusus memberikan jasa memotong dan membuat kayu glonggongan menjadi kayu lapis. Menurut para pengrajin untuk membentuk usaha dagang ini harus berhubungan langsung dengan dinas kehutanan karena sebagian besar kayu yang dipasok dan berasal dari Dinas kehutanan setempat.

Jadi dalam penataan struktur industri dalam klaster adanya perkembangan jaringan kerja sama dalam arti saling membutuhkan saling bekerja sama untuk dapat bersama-sama menciptakan iklim usaha di Industri ini yang berdaya saing global. Industri klaster baik industri inti maupun industri pendukung sektoral dalam suatu tempat dan kawasan tertentu. Industri inti dalam industri mebel ini adalah pengrajin mebel yang terdiri dari industri rumahan yang pekerjaannya merakit menghasilkan barang mebel. Industri pendukung dicontohkan oleh peneliti adalah industri perdagangan mebel, industri penggrajian kayu, industri pengecatan dan industri pelituran kayu. Juga ditambahkan selama kehidupan klaster, akan terjadi perubahan jumlah dan ukuran usaha inti, serta spesialisasi dan ukuran usaha penunjang. Perubahan-perubahan tersebut untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi pada pasar dan upaya peningkatan kapasitas proses produksi. Adanya kolektifitas dan kerjasama yang baik antara industri inti dengan industri pendukung akan sangat mempercepat proses pengembangan kawasan sentra menjadi bentuk klaster industri yang kuat dan mandiri.

4.3.2 Pengembangan dan Pembinaan Aspek Pemasaran

Dan dijelaskan pula upaya yang dilakukan Disperindag dalam Renstra kerja tahun 2009 peneliti mengambil dua contoh program yang berhubungan dengan Aspek Pemasaran dan dijabarkan dibawah ini :

Program : Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri

Kegiatan :

latar belakang

Dalam rangka era globalisasi perdagangan bebas dan kemandirian para pengusaha dalam persaingan usaha dibidang perdagngan, khususnya dalam pengembangan efisiensi perdagangan dalam negeri Dinas koperasi perindustrian dan perdagangna perlu adanya kegiatan-kegiatn yang

mendukung sehingga dapat mendorong para pelaku usaha maupun IMK sekota Pasuruan.

Adapun dalam memacu pengusaha maupun para pelaku UMK dibutuhkan pembinaan-pembinaan maupun dukungan agar pelaku usaha dapat saling membutuhkan satu sama lain sehingga dapat meningkatkan produktifitas kerja yang lebih baik dan saling menguntungkan serta dapat menciptakan persaingan yang sehat antara satu dengan yang lain.

Pengusaha maupun UMK diharapkan mampu meningkatkan nilai produksi dalam rangka pemenuhan tujuan dari usahanya yang antara lain :
berkaitan dengan hal tersebut diatas maka melalui inas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota pasuruan melakukan kegiatan-kegiatan dalam negeri antara lain:

1. Pengembangan pasar dan Distribusi barang/produk
2. Pengembangan kelembagaan kemitraan kerjasama (temu usaha kemitraan usaha kecil, menengah dan besar).
3. Pengembangan pasar lelang Daerah
4. Peningkatan sistem jaringan informasi perdagangan.
5. Intensifikasi retribusi dan pendapatan lain pasar.

Program : Memperluas jaringan Pemasaran produk

Kegiatan :

Latar belakang

Dalam rangka meningkatkan kemampuan pengusaha dalam bidang kualitas produksi, design produksi, manajemen usaha dan informasi pasar dalam perdagangan nasional dan internasional ekspor untuk bisa menangani persaingan dengan negara-negara lain. Dan mengingat bahwa pengusaha kota pasuruan yang mempunyai produk-produk unggulan-unggulan khususnya furniture masih tetap membutuhkan uluran tangan dari bantuan pemerintah daerah dalam hal promosi product unggulan dan pemasaran, untuk kegiatan promosi produk unggulan dan pemasaran untuk dikota sendiri, luar propinsi dan luar negeri maka kami memprogramkan untuk kegiatan-kegiatan promosi produk pasuruan melalui pameran-pameran yang akan dilakukan di jakarta, Bali, Balikpapan, Surabaya dan dikota pasuruan sendiri.

Pembahasan

Tujuan dari pemasaran adalah upaya untuk memperkenalkan produk daerah unggulan yang dipunyai sehingga hal ini digunakan acuan kemajuan suatu bidang industri. Hal ini juga menimbulkan pengaruh terhadap pemasukan pemerintah daerah. Diketahui pula bahwa pemasaran adalah urat nadi bagi kelangsungan perkembangan industri kecil itu sendiri karena dari hasil pemasaran ini dapat diketahui apakah suatu usaha sudah dapat dikatakan berkembang atau belum. Pada umumnya para pelaku pembuat mebel kurang bisa memasarkan barang yang mereka produksi sendiri. Pengrajin kebanyakan mengoperkan barang rakitan mereka kepada para pedagang atau bedak penjual hasil kerajinan. Ditambah pula bahwa industri mebel Pasuruan ini sudah ada sejak dulu tentu sudah banyak daerah lain yang mengetahui kualitas dan keunggulan dari produk mebel tersebut. Terbukti industri mebel ini dinilai sebagai industri mebel terbesar di Jawa Timur. Meski menguasai pemasaran jawa timur sistem klaster tidak sebatas dalam pemasarannya saja disamping itu juga jaringan investasi pemasaran regional haruslah dapat berperan dalam pemasaran internasional serta iklim investasi yang baik.

Melihat dari potensi ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan berupaya memberikan bantuan seluas-luasnya dalam mempromosikan produknya wujud upaya pengembangan dan pembinaan yang dilakukan Dinas terkait dalam bidang pemasaran antara lain :

Dengan mengikut sertakan industri kecil dalam pameran-pameran pada tingkatan lokal regional maupun nasional. memberikan akses pasar yang potensial kewilayah-wilayah yang strategis. Tidak kalah pentingnya adalah penciptaan produksi yang baik. Selama ini, Pemerintah Daerah Kota Pasuruan bekerjasama dengan para pelaku bisnis telah melakukan promosi dengan mengikuti berbagai pameran, baik lokal maupun internasional. Para produsen juga telah melakukan inovasi produk dengan menciptakan alternatif kayu jati yang semakin langka. Demikian pula halnya dengan desain produk. Selain mempertahankan desain yang klasik, para produsen juga mulai memasuki model desain kontemporer. Itu semua mendukung merek mebel Pasuruan sebagai produsen kerajinan mebel.

Disamping promosi produk peningkatan sistem dan jaringan informasi juga sangat penting didukung oleh maksud bahwa pengusaha kita bisa menjalin kerja sama dengan pengusaha lain. Kesimpulan dari peneliti melihat sebenarnya aspek Pemasaran yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan sudah sangat baik terbukti pasar industri ini hingga menembus pasar Japan dan Singapura. Namun, hal ini relative masih sedikit sehingga perlu ditularkan dan dikembangkan serta perlu ditambahkan dalam format Renstra dalam kaitannya klaster industri memerlukan adanya kerjasama tiap komponen untuk melakukan aspek pemasaran adanya kesadaran tiap unit usaha untuk dapat mengembangkan klaster kedepan hendaknya pemerintah melalui dinas melakukan pembinaan kepada industri besar yang telah menembus pasar dalam dan luar negeri untuk melakukan kerjasama dengan industri kecil berkembang maupun terkait berkaitan dengan pemasaran hal ini dinilai lebih efektif karena adanya semangat untuk melakukan kerjasama sebagai usaha bersama menciptakan pemasaran yang mengarah pada klaster industri lain. Peran sejumlah perusahaan kunci (*hub companies*) untuk membuka pasar baru sangat menonjol. Dicontohkan dalam klaster di Negara Cina Perusahaan-perusahaan ini biasanya sangat inovatif dalam mencipta desain baru yang diminati pasar. Mereka sangat rajin berpromosi untuk memperkuat merk dan citra, juga memiliki jaringan kerja sama kuat dengan berbagai lembaga penunjangnya antara satu usaha dengan usaha lainnya.

Upaya yang ketiga yaitu diadakannya pengenalan produk atau pameran-pameran. Maksud dari pameran dan pengenalan produk ini kepada konsumen sehingga tertarik untuk membeli hasil kerajinan. Untuk para pengrajin sendiri diharapkan para pelaku usaha kecil dapat berkembang dalam variasi produk yang sesuai dengan permintaan pasar sesuai dengan permintaan trend masyarakat. Peneliti melihat bahwa selama ini di Industri mebel dan kayu perkembangan hanya bersifat statis dalam penciptaan produk sejenis alasan para pengrajin mereka takut tidak laku jadi mereka hanya menjual produk-produk lama yang kebanyakan diminati masyarakat.

Upaya alternative lain yang dapat ditawarkan peneliti dalam kaitannya aspek Pemasaran sesuai dengan konsep klaster industri diperoleh dari kasus klaster industri jepara ditandai dengan keluarnya kebijakan baru dari pemerintah untuk membuka investai asing di bidang mebel tahun 1997. Menurut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal, hingga awal Juni 2004 investasi yang masuk Jepara Rp 4 triliun lebih. Dibukannya kerangka investor tersebut mendorong sejumlah investor untuk menanamkan modal di industri. melayani proses perizinan investasi agar tidak berbelit-belit. perizinan membutuhkan waktu 5-7 hari. Mencontoh dari kebijakan baru dibuat pemda jepara Bagi klaster industri investasi adalah sesuatu yang sangat penting berhubungan dengan penanaman modal dengan iklim usaha yang baik.

Selanjutnya untuk menerapkan klaster industri dalam aspek pemasaran dalam pengembangan di Industri ini yaitu pengembangan industri pendukung di kawasan mebel Pasuruan ini antara lain usaha jasa transportasi dan optimalisasi peran bedak dan pedagang disekitar kawasan industri. Diketahui di lapangan bedak dan pedagang hasil kerajinan mebel ini lokasinya berada disepanjang jalan antara pasar mebel bokir hingga menuju kesurabaya dan merupakan jalan alternative dari Kota Bali, Probolinggo, jember dan Banyuwangi menuju kekota Surabaya. Jadi, apabila hari sabtu yang rame dikunjungi pembeli tentu akan menyebabkan kemacetan yang panjang. Dalam kaitannya konsep klaster industri diketahui bahwa industri inti dan pendukung dikembangkan secara terpisah baik dari segi kapasitas jenis maupun lokasi. Namun yang terjadi kebanyakan pedagang mebel yang memiliki modal dan lokasi yang besar mengeksploitasi semua kesempatan yang ada dari satu (UD) Usaha Dagang mereka kebanyakan sekaligus membuat usaha pengecatan, usaha pembursakan dan usaha perdagangan serta cenderung bagaimana memperkaya diri tanpa adanya kepedulian usaha kerja sama dengan para pelaku usaha kecil. Hal ini yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara usaha yang memiliki modal besar dengan usaha yang memiliki modal kecil disilah sebenarnya peran pemerintah untuk menjebatani dan mengarahkan terjadinya kerja sama. Dalam aspek pemasaran bagaimana kerjasama untuk

dapat bersama-sama memasarkan produk keluar negeri diketahui dilapangan kebanyakan pedagang besar memiliki link atau jaringan pemasaran hingga keluar negeri hal apabila dibuat kerjasama antara keduanya tentu akan sangat menguntungkan.

4.3. 3 Pengembangan dan Pembinaan Aspek Sumber Daya Manusia

Peneliti menjelaskan peran pemerintah digambarkan Dengan program pengembangan dan pembinaan yang ada dalam renstra tahun 2009 dikelompokkan menjadi dua yaitu :

Program : Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan UKM

Kegiatan :

Latar belakang

Keberadaan pengusaha kecil dan menengah termasuk yang berskala usaha mikro serta koperasi (UMKM) merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar masyarakat posisi itu menuntut peran UMKM sebagai jaringan utama dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan. Jumlah UMKM serta penyerapan tenaga kerja yang besar dengan kualitas SDM yang rendah menjadi hambatan mendasar dalam pengembangan UMKM disamping itu terdapat berbagai permasalahan kebijakan termasuk regulasi, Birokrasi dan retribusi yang berlebihan sehingga menyebabkan beban biaya transaksi yang besar pada UMKM dan keterbatasan akses terhadap sumberdaya produktif seperti modal, teknologi, pasar dan informasi. Sementara itu tantangan eksternal yang mendasar adalah pesatnya perkembangan Globalisasi ekonomi dan liberalisasi. Oleh karena itu berbagai upaya harus dilakukan segera, terutama yang berkaitan dengan oerbaikan kelembagaan maupun peningkatan daya beli konsumen dan perluasan akses kesumberdaya produktif dan peningkatan ketersediaan pendanaan.

Tantangan kedepan dalam pengembangan kenaikan juga disarankan semakin barseiring dengan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan yang berlangsung sangat cepat bersamaan dengan pesatnya mobilisasi dana infesstasi dan semakin pendeknya daur hidup produk. Adanya tantangan tersebut yang disertai oleh cepatnya perubahan selera konsumen dan terbukanya pasar bebas memberikan konsekuensi pada perlunya mempercepat

peningkatan kemampuan UMKM secara lebih merata untuk lebih berdaya saing. Penguatan UMKM salah satunya diarahkan kepada fasilitasi Stake Holder dan UKM pada Pemerintah Daerah termasuk Kabupaten/kota (paradigma otonomi daerah) meliputi :

1. Penguatan kepada aparat yang membidangi KUMKM
2. Pelaku KUMKM, lembaga pembiayaan dan pihak terkait
3. Kegiatan kemitraan dengan pembuat aturan (DPRD)

Maksud dan Tujuan

Maksud :

1. Meningkatkan daya saing dan skala usaha KUMKM dengan kegiatan ekonomi daerah
2. Tersedianya dan berperannya lembaga-lembaga pendukung untuk meningkatkan akses UMKM terhadap SDM, modal, Pasar, teknologi dan informasi
3. Tumbuhnya wirausaha baru dan meningkatnya pengetahuan dan sikap wirausaha KUMKM.

Program : Peningkatan kemampuan pengusaha menunjang ekspor

Kegiatan :

Latar Belakang

Dalam era globalisasi perdagangan bebas dan kemandirian para pengusaha sangat menentukan dalam persaingan untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan usaha. Hal tersebut sangat berperan dalam negeri, utamanya pasar luar negeri atau ekspor.

Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu peningkatan keterampilan dalam penanganan prosedur dokumen ekspor karena pengetahuan dan keterampilan tersebut sangat menunjang dalam proses ekspor dan pemanfaatan fasilitas-fasilitas dari negara-negara lain.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pengiriman peserta diklat ekspor dan inpor sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pengusaha ekspor dan calon pengusaha ekspor dari Kota Pasuruan

2. Meningkatkan pengetahuan dan informasi tentang perdagangan ekspor dan impor bagi pengusaha Kota Pasuruan.
3. Meningkatkan kerja sama dan kemitraan dalam pengembangan perdagangan ekspor produk-produk Kota Pasuruan.

Pembahasan

Untuk dapat meningkatkan SDM para pelaku industri kecil agar mampu merealisasikan potensi kerja yang terdapat dalam bidang usaha yang dikelola serta memberikan keterampilan yang lebih maka, salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan melakukan Dalam ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam suatu industri. SDM dalam suatu industri kecil harus terpenuhi dari segi kuantitatif juga dari segi kualitasnya misalkan dalam hal kemampuan keterampilan yang dimiliki dan bahkan pada tingkat keinginan dan motivasi untuk meningkatkan mutu produksi itu sendiri. Diklat yaitu Pendidikan dan pelatihan hal ini dilakukan untuk memberikan bekal keterampilan yang harus dipunyai dalam mengelola industrinya. Usaha-usaha lain yang berkaitan dengan kewirausahaan dan penciptaan kemandirian dari masyarakat setempat Dalam pengembangan SDM dalam hal ini manusianya adapun menurut renstra kerja Dinas Perindustri dan Perdagangan Kota Pasuruan peneliti menghubungkan ada dua yaitu :

Dalam ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam suatu industri. SDM dalam suatu industri kecil tidak harus terpenuhi dari segi kuantitatif juga dari segi kualitasnya misalkan dalam hal kemampuan keterampilan yang dimiliki dan bahkan pada tingkat keinginan dan motivasi untuk meningkatkan mutu produksi itu sendiri. Aspek pengembangan dan pembinaan SDM haruslah bersifat dinamis dan terlaksana secara berkesinambungan. yang dapat ditarik kesimpulan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang berhubungan dengan bagaimana pengembangan dan pembinaan industri kecil pada aspek Sumberdaya manusia yang mengarah pada klaster industri ini. Sebetulnya ada banyak ide-ide dan gagasan-gagasan yang disampaikan kepada peneliti sehubungan dengan bagaimana mengusahakan agar sentra industri mebel ini dapat menjadi suatu unggulan daerahnya baik dari kadin LSM maupun para pedagang sekaligus pelaku

dalam industri mebel. Ini membuktikan adanya kemauan dan kritikan dari masyarakat untuk mau peduli. Dalam kaitannya klaster industri SDM sebagai pelaku terciptanya inovasi dan kreatifitas dari proses produksi dalam industri mebel.

Disinilah peran dari pemerintah yang diharapkan total dapat melakukan sosialisasi dan pembinaan agar masyarakat menjadi lebih meningkat pengetahuannya dan juga memiliki kesadaran untuk terus memperoleh hasil yang lebih baik. Klaster industri menuntut adanya konsistensi baik kuantitas maupun kualitas dalam penciptaan produk klaster industri. Dari kedua Renstra baru tahun 2009 peneliti mengambil dua contoh program yang dilakukan pemerintah daerah khususnya Dinas Koperindag untuk mengembangkan Aspek Sumber daya Manusia yaitu dengan mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif apabila hal ini terwujud tentu merupakan suatu tanda-tanda baik bagi penciptaan klaster industri karena dengan adanya kemandirian, inovasi dan keterampilan yang dimiliki para pelaku usaha sedikit banyak akan meningkatnya peran dari komponen inti klaster baik industri inti maupun industri pendukung klaster industri.

Program yang kedua yaitu : *Peningkatan kemampuan pengusaha untuk menunjang ekspor* maksud dari program ini adalah bagaimana para pengusaha dapat dengan mudah melakukan ekspor dan memasarkan produk mereka secara luas. Baik dari segi prosedur pengurusan bahkan pengenaan pajak ekspor. Hal ini perlu karena semakin luasnya pemasaran produk mebel dan kayu ini sampai keluar negeri perlu adanya proteksi dan kebebasan. Dalam kaitannya konsep klaster industri. Klaster industri mengharuskan adanya jaringan pemasaran yang luas dari sentra industri dan juga penciptaan iklim investasi dari komponen klaster. Jaringan dan investasi ini lah yang akan menciptakan kuatnya klaster secara menyeluruh baik industri inti maupun penunjang.

Peneliti mengamati sebenarnya telah cukup banyak upaya pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang *concern* dengan pengembangan usaha kecil. Hanya saja, upaya pembinaan usaha kecil sering tumpang tindih dan dilakukan sendiri-sendiri. Perbedaan

persepsi mengenai usaha kecil ini pada gilirannya menyebabkan pembinaan usaha kecil masih terkotak-kotak atau *sector oriented*, di mana masing-masing instansi pembina menekankan pada sektor atau bidang pembinaannya sendiri-sendiri. Akibatnya terjadilah dua hal: (1) ketidakefektifan arah pembinaan, (2) tiadanya indikator keberhasilan yang seragam, karena masing-masing instansi pembina berupaya mengejar target dan sasaran sesuai dengan kriteria yang telah mereka tetapkan sendiri. Karena egoisme sektoral atau departemen, dalam praktek sering dijumpai terjadinya persaingan antar organisasi pembina. Bagi pengusaha kecil pun, mereka sering mengeluh karena hanya selalu dijadikan obyek binaan tanpa ada tindak lanjut atau pemecahan masalah mereka secara langsung. Sebenarnya solusi yang rasional yang bisa difikirkan oleh semua pihak antara lain : *Pertama*, system informasi yang up to date baik dari dalam maupun pengetahuan hubungan dengan pihak lain karena dengan ini industri dapat bertukar pengalaman dan solusi yang sesuai dengan kondisi dan kedua peran serta dari para pelaku usaha sendiri karena diketahui bahwa sebenarnya yang lebih tahu akan kondisi dan situasi dari industri sendiri adalah para pengusaha didalamnya untuk itu harusnya mereka juga dilibatkan dalam pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan industri mereka.

Solusi lain yang dapat ditawarkan oleh peneliti adalah program kemitraan dan jaringan subkontak peneliti mengambil contoh di klaster-klaster di Negara Taiwan. program kemitraan dan jaringan subkontrak agaknya belum memasyarakat di Indonesia. Penelitian usaha kecil di enam propinsi menemukan bahwa program kemitraan masih kurang dibandingkan dengan jumlah pengusaha kecil yang ada (Bachruddin, 1996). Hal ini terbukti karena sebagian besar pengusaha kecil (89%) belum mempunyai bapak angkat. Padahal para pengrajin yang sudah menjalin program kemitraan merasakan manfaat yang besar dalam bidang permodalan, pemasaran dan yang paling utama adalah manajemen.

Diperoleh data Khusus untuk pulau Jawa, proporsi UMKM yang terlibat dalam Program Kemitraan maupun keterkaitan usaha masih dalam tahap embrional. menunjukkan bahwa hanya terdapat 4 persen UMKM yang terlibat dalam program kemitraan usaha melalui skema Bapak-Anak angkat. Dari total

6.595 unit usaha kecil dan rumah tangga yang terlibat dalam program ini, 29% mengaku menjalin hubungan dengan usaha besar terutama dalam pengadaan bahan baku, 15% menerima bantuan uang atau barang modal, 10% memiliki kaitan pemasaran, dan hanya 1% berupa konsultasi dan bimbingan. Bagian terbesar (45%) hubungan antara si besar dan kecil amat

Implikasinya, agaknya sudah saatnya diperlukan orientasi prinsip kemitraan. Jaringan kemitraan harus didasarkan atas prinsip sinergi, yaitu *saling membutuhkan dan saling membantu*. Prinsip saling membutuhkan akan menjamin kemitraan berjalan lebih langgeng karena bersifat "alami" dan tidak atas dasar "belas kasihan". Berlandaskan prinsip ini, usaha besar akan selalu mengajak usaha kecil sebagai *partner in progress*. Dalam kaitannya industri mebel dan kayu kota pasuruan hendaknya dapat dikembangkan system ini yaitu hubungan kerja sama yang erat antar industri bepak yaitu industri besar dengan industri mebel kecil yaitu pengrajin kayu hendaknya mereka bisa saling bekerja sama bahu-membahu untuk dapat menyelesaikan aspek pemasaran, aspek permodalan, dan aspek pembinaan SDM. Ditambahkan pula harus adanya peran faktor financial dalam hal ini bank dan lembaga perbankan lain. Diharapkan peran mereka tidak hanya penyedia simpanan uang namun harus berupaya mengembangkan objek melalui berbagai program-program yang pro terhadap industri kecil.

4.3 4. Pengembangan dan Pembinaan Aspek Teknologi.

Pembahasan dari Aspek teknologi erat kaitannya dengan modernisasi dari pada produksi dan pembuatan hasil industri karena mekanisasi yang semakin canggih tentu berpengaruh juga pada industri kecil namun hasil akhirnya tentu adalah pencapaian efisiensi dan efektifitas dari pada hasil produksi. Disamping itu juga dalam Renstra tahun 2009 peneliti mengklasifikasi dan menghubungkan ada dua program untuk dapat meningkatkan pengembangan Aspek teknologi melalui dua program yaitu :

Program : Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Kegiatan :

1. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

2. Perluasan Penerapan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
3. Pengujian standart Produk manufaktur.

Latar Belakang

Reformasi dan globalisasi yang diiringi dengan krisis ekonomi berdampak terhadap persaingan industri dan kondisi perusahaan yang ingin mempertahankan eksistensinya melalui berbagai cara agar tetap berjalan dan berproduksi.

Berbagai tuntutan dalam persaingan industri maka perlu adanya program peningkatan teknologi industri dengan kegiatan diatas.

Kondisi Kota Pasuruan dengan jumlah industri sebanyak 701 yang terbagi dalam industri IKAHH sebanyak 487 dan ILMEA sebanyak 214 dengan penyerapan tenaga

Tujuan

untuk mengembangkan UPTD kota Pasuruan dibidang Teknologi industri

Program : Peningkatan Kapasitas IPTEK dalam sistem produksi

Kegiatan :

1. **Pengembangan Kapasitas pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan kualitas**
2. **Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri.**
3. **Pembentukan gugus kendali mutu dalm percepatan produksi.**

Latar belakang

Pentingnya peranan teknologi dalam pembangunan suatu bangsa telah diakui secara luas, terutama oleh bangsa-bangsa yang sudah mencapai kemajuan ditingkat internasional di era otonomi daerah dan globalisasi dewasa ini proses pembanguann diindonesia hrus mengkombinasikan antara dimensi ekonomi dengan dimensi teknologi. Teknologi dapat dipilah menjadi empat komponen yaitu : Perangkat teknis (*technoware*), kemampuan Sumber daya Manusia (*Humanware*). Perangkat informasi (*inforware*) dan perangkat organisasi atau kelembagaan dan peraturan regulasi keempat komponen teknologi saling komplementer antara satu dengan yang lainnya. Dalam rangka pemulihan ekonomi untuk segera menggerakkan sektor riil dalam jangka pendek, pemerintah maupun Program revitalisasi dan pengembangan

industri dan perdagangan yang difokuskan salah satunya pada peningkatan teknologi industri dan perdagangan yang difokuskan pada peningkatan teknologi industri, meliputi peningkatan efektifitas dan efisiensi produktifitas penerapan Standarisasi, pengembangan lembaga sertifikasi produk, pengembangan kemampuan inovasi melalui penelitian dan pengembangan industri (Industrial Reserch & Development) yang berorientasi kepada nilai tambah dan pasar serta peningkatan kandungan local sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan kapasitas iptek sistem produksi dalam kegiatan industri, perlu kiranya pemerintah Pasuruan melaksanakan kegiatan bimbingan dan pelatihan serta bantuan peralatan teknologi pengolahan proses produksi untuk peningkatan mutu produk

Maksud dan tujuan

Untuk memfasilitasi pembentukan Gugus kendali Mutu Pada pengusaha mebel. tujuannya Untuk meningkatkan proses dan mutu produksi mebel

Pembahasan

Kesimpulan Dari kedua program diatas adapun erat kaitannya dengan penciptaan klaster industri adanya peran dari teknologi sangat penting bagi proses produksi yang akan menjadikan produk dan barang-barang produksi sebagai barang yang berkualitas tinggi serta dapat bersaing baik dipasar domestic maupun dipasar internasional. Klaster dapat berkembang dan tumbuh baik karena adanya jaringan pemasaran yang baik serta komponen-komponen teknologi lainnya.

Untuk itu sebagai perwujudan dari pada klaster industri di industri mebel di Pasuruan ini bantuan dan arahan dari dinas terkait, diatas sangat baik yaitu untuk menciptakan empat pengembangan teknis teknologi yaitu teknologi manusia, teknologi informasi, dan teknologi organisasi (manajemen). Apabila dapat berkembang dengan baik dan dapat saling membentuk jaringan kerjasama antara komponen sehingga menciptakan kumpulan industri kuat yang mengarah pada klaster industri. klaster industri merupakan kelompok industri sektoral yang berkembang mengikuti arus globalisasi modernisasi .

Peneliti mengambil kesimpulan kebanyakan tingkat pengetahuan para pengrajin dalam kaitannya alat-alat mekanik dan mesin-mesin sudah cukup

terbukti mereka dinilai dapat menghasilkan produk yang berkualitas, Meski dibutuhkan penguasaan alat-alat pertukangan dan permesinan yang baru. Diperoleh dari hasil wawancara kebanyakan masyarakat disekitar untuk mengolah hasil hanya berupa alat-alat pertukangan tradisional tapi anehnya produk mereka diakui berkualitas, peneliti menyimpulkan selain adanya mekanisasi dibutuhkan juga keuletan ketelatenan dari para pengrajin sehingga mereka dapat merakit, memadukan unsur seni dalam pembuatan produk. Untuk mesin-mesin mungkin perlu hanya dibutuhkan untuk kapasitas produksi dengan kuantitas besar sehingga membutuhkan efisiensi waktu dan tenaga,

Peneliti menilai adanya peran dari Dinas terkait melalui renstra ini sudah baik bahkan sudah mengarahkan kebijakan membentuk arus klaster industri bersama dari aspek teknologi. Namun realita dilapangan peneliti memperoleh sumber bahwa pembinaan ini ada namun relative sedikit dinas terkait harus mencoba menemukan inovasi-inovasi, ide-ide baru bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi untuk bisa menghasilkan teknologi baru dibidang permebelan apakah alat-alat baru, contoh produk baru maupun teknik Sehingga dibutuhkan adalah bagaimana mengembangkan teknologi informasi layanan akan data dan pengetahuan dengan adanya informasi yang up to date masyarakat industri jadi tahu kondisi usaha sejenis untuk diperoleh kesimpulan ide-ide yang dibutuhkan untuk bisa memajukan klaster industri mebel. Peneliti belum melihat adanya suatu informasi yang menghubungkan antara pengusaha dengan konsumen serta pengenalan produk kedalam maupun keluar negeri secara luas selain pameran. Harusnya dengan adanya informasi industri akan semakin dikenal oleh dunia diluar Kota Pasuruan. Informasi dapat berupa informasi promosi produk kedaerah lain melalui informasi internet atau berita media elektronik dalam penciptaan teknologi industri peneliti menambahkan pula upaya sederhana yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah teknologi antara lain :

1. Memperkenalkan desain-desain dan prototipe sederhana tetapi bermanfaat (teknologi tepat guna)
2. Meningkatkan mutu produk melalui bantuan penyediaan tenaga ahli dan instruktur serta fasilitator dari Dinas terkait

3. Melaksanakan pelatihan teknis, magang, studi banding dan sejenisnya untuk lebih meningkatkan kemampuan teknis.

Ketiga hal diatas adalah bagaimana mengembangkan dari aspek teknologi secara sederhana dan kebanyakan digunakan dalam pengembangan industri-industri kecil namun meski dinilai sederhana apabila direalisasikan akan tercipta efisiensi dan efektifitas dalam kaitanya aspek teknologi.

Teknologi tepat guna adalah bagaimana secara efektif dan efisien teknologi dapat diterapkan dalam kegiatan industri seperti kegiatan produksi barang, kegiatan pemanfaatan teknologi informasi.

Kedua adalah meningkatkan mutu produk yaitu produk utama yaitu hasil kerajinan mebel tentu kelompok industri kecil akan sangat dibantu apabila dilaksanakan penyuluhan pengembangan oleh dinas terkait.

Ketiga yaitu melaksanakan pelatihan untuk dapat menambah pengalaman dan pengetahuan dari industri kecil yaitu pelaku usaha, dan dilakukan magang-magang yang dilakukan Dinas terkait dengan institusi berhubungan dengan industri mebel, hal ini dilakukan untuk mengirim sebagian pelaku industri kecil untuk dapat magang dan kerja nyata. hal lain berhubungan dengan pengembangan kemampuan para pelaku industri kecil diharapkan dengan adanya kegiatan-kegiatan diatas dapat meningkatkan baik pengetahuan maupun keahlian dari pada pelaku usaha di Industri mebel Pasuruan.

4.4 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam mengembangkan industri kecil mebel dan kayu di Kota Pasuruan

4.4 1. Faktor Pendukung dalam mengembangkan industri mebel dan kayu Kota Pasuruan.

Factor pendukung adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh industri mebel untuk dapat dimaksimalkan mulai yaitu dari proses produksi hingga pemasaran. Pengembangan dari banyak aspek yang berkaitan dengan kemajuan dan kebutuhan penciptaan klaster industri perlu adanya antisipasi dan penanganan dari pihak terkait. Setelah melakukan survey dan penelitian serta beberapa sumber data peneliti dapat menyimpulkan factor pendukung dalam industri ini ada dua yaitu :

a. Lokasi yang strategis

Sebagai tujuan pemasaran dikira hal ini sebagai factor pendukung dari terbentuknya kota ini menjadi klaster industri yang kuat karena salah satu criteria dari klaster adalah adanya lokasi yang mudah untuk melakukan transaksi perdagangan sehingga akan lebih menguatkan struktur industri inti dari sentra industri tersebut. Lokasi yang berada diantara jalur perdagangan Kota Surabaya dengan probolinggo sungguh sangat potensial sebagai kawasan klaster industri. Untuk itu, peran dari pemerintah daerah. Khususnya, Dinas perindustrian dan perdagangan melalui Dinas Jasa Raharja untuk lebih memperhatikan alur perjalanan kota serta kondisi jalan yang akan digunakan sebagai jalur utama pengenalan dari produk Pasuruan itu sendiri. Karena dari pengamatan peneliti semakin lama kondisi jalan semakin memprihatinkan banyak terdapat lubang dan rusak akibat dilalui angkutan berat. Hal ini juga diperparah dengan adanya kemacetan yang sering terjadi pada hari sabtu dan minggu pada waktu banyaknya pembeli dan terjadi akibat pembeli yang memarkir kendaraannya sembarangan dipusat industri Mebel. Sehingga dapat diperbaiki dan Selayaknya dapat terlaksana dan dapat dijadikan bahan pengembangan kawasan industri mebel Pasuruan.

b. Kualitas Produk yang sudah terkenal baik

Bukan suatu hal yang mengejutkan lagi kalau produk industri rumahan yang dikenal dengan model antikan, seperti mebel Bukir itu banyak melibatkan tenaga kerja lokal. Mulai dari perajin hingga tukang pelitur. Mebel yang diperdagangkan umumnya dibuat di rumah-rumah penduduk dan sudah merupakan usaha turun-temurun dari warga sekitar

Hal ini tentu merupakan suatu hasil industri yang cukup menjanjikan mengingat jumlah kuantitas yang besar sebagai awal dari penciptaan sentra industri besar. Dari keterangan diatas dari kajian klaster yang merupakan basis penelitian dari peneliti dapat menyimpulkan bahwa apabila dilihat dari pengelompokan hasil dan jenis yang berbeda dalam penciptaan hasil mebel dikawasan ini merupakan awal baik bagi penciptaan jaringan klaster. Juga akan terjaga kualitas tiap produk-produknya dikarenakan hal diatas. Untuk itu,

peran dari pemerintah yaitu untuk dapat mengarahkan baik dari segi pemasaran maupun dari segi penciptaan kualitas agar diperoleh hasil akhir yang terbaik.

Dengan adanya keunggulan ini sebenarnya sentra industri ini memiliki modal awal untuk menarik para konsumen secara besar dan pengenalan produk berasal dari mulut kemulut hal ini dikira lebih efektif dari pada melalui iklan, karena konsumen merasakan langsung hasil yang telah dibelinya. Untuk itu peran pemerintah menjadi lebih ringan ditambah dengan pengenalan melalui iklan antar daerah mungkin akan menjadikan Kota Pasuruan tujuan pedagang-pedagang besar sektor mebel di Indonesia.

4.4 2. Faktor Penghambat dalam mengembangkan industri mebel dan kayu

a. Masih Minimnya Perhatian Dari Instansi Terkait

Peran pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kota Pasuruan sebenarnya sudah ada upaya-upaya. Namun masih minim dan masih bersifat struktural untuk itu yang perlu digaris bawahi sebenarnya peran Pemerintah Kota hanya mengarahkan dan menjembatani memfasilitasi dari industri yang terkait sebagai contoh pemkot melakukan kebijakan pembentukan dua pasar mebel induk yaitu pasar Bukir dan yang kedua faktanya kedua pasar itu sekarang tidak dapat berfungsi dengan mestinya bahkan para tengkulak malah menjual barang-barang mereka dipinggir jalan disepanjang jalan menuju Surabaya hal ini malah menimbulkan masalah baru bagi pemerintah yaitu kemacetan.

Apa yang menyebabkan hal ini terjadi salah satu sebab adanya kebutuhan dari para pengrajin sendiri para pengrajin yang tidak memiliki jaringan usaha dengan para pemilik bedak dan usaha memilih menjual produk mereka dipinggir jalan untuk memperoleh uang kebutuhan sehari-hari secara cepat dan untuk melakukan proses produksi selanjutnya.

b. Kurangnya pengetahuan dan memperluas jaringan pasar

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya jaringan pasar dalam industri ini sudah sangat baik manun hanya saja sebagian saja pengusaha yang

dapat menembus jaringan luas kurangnya pamarataan distribusi dan usaha untuk mengajak pengusaha lain hal ini memerlukan peran pemerintah untuk menjebatani sekaligus memberikan sosialisasi yang baik kepada kedua belah pihak. dalam system klaster jaringan pemasaran akan sangat terfokus pada hubungan kerja sama yang baik antara pengusaha-pengusaha baik dari industri inti maupun industri pendukung hal ini akan sangat baik jika ada kesadaran dari masyarakat untuk dapat memajukan sentra industri ini.

c. Nilai Bahan Baku semakin mahal

Hal ini dipengaruhi oleh adanya kesulitan dari pada bahan baku yang digunakan untuk memproduksi barang Mebel yaitu kayu kebanyakan kayu diperoleh dari Kalimantan jenis kayu yang banyak digunakan antara lain kayu jati, kayu meranti, kayu sengon dan kayu local dengan kualitas rendah. Dikarenakan semakin sedikitnya jumlah kayu yang siap untuk ditebang para produsen atau pengepul kayu kebanyakan diperoleh dari Dinas kehutanan dan juga dari hubungan dengan pengepul luar kota sehingga diperoleh kayu yang diinginkan. Banyak hambatan-hambatan yang ada dalam pengiriman kayu sebagai bahan baku utama mulai dari perijinan, kualitas, hingga perdagangan yang rumit sehingga menyebabkan para pengrajin merasakan kenaikan bahan baku ini hal ini yang mau tidak mau harus menaikkan harga dari produksi itu sendiri. Untuk itulah diperlukannya suatu upaya-upaya alternative untuk dapat mengatasi masalah bahan baku diantaranya dan dicontohkan dapat diperoleh kayu lain sebagai pengganti bahan baku utama seperti kayu jati bisa diganti kayu akasia dicontohkan dalam pembuatan meja kursi meski kualitas jauh namun apabila sudah dirubah menjadi barang jadi meja kursi jadi kualitas dari kayu tidak kalah bersaing.

d. Persaingan harga diantara unit usaha

Kondisi para pengusaha mebel di Kota Pasuruan kini sedang tergecent. Mereka kesulitan memasarkan produk dengan harga standar. Penyebabnya karena, saat ini pasar mebel dikuasai para tengkulak. Ironisnya, para tengkulak ini mayoritas berasal dari luar kota. Akibat permainan pasar pengusaha

bermodal besar membuat para perajin sulit memasarkan produknya dengan harga semestinya. Untuk itu perlu adanya regulasi yang dapat melindungi para pengusaha khususnya pengusaha kecil dari tengkulak. Jika pemerintah lebih mengembangkan masyarakat sekitar dan memberikan bantuan dan penyuluhan tentu Pengusaha kecil akan tahu praktek-praktek kecurangan yang sering terjadi pada lingkungan mereka. Untuk itu perlu adanya system klaster karena dengan system ini akan lebih melindungi pengusaha bersekala kecil yang saling kerjasama kolektifitas dengan pengusaha besar.

e. Faktor modal yang tidak seimbang dan Permainan para tengkulak

Kenapa demikian mungkin ini adalah pekerjaan pemerintah daerah dan Dinas terkait. Berkaitan dengan teori pada klaster industri apabila diterapkan konsep ini modal bukan faktor utama yang lebih ditekankan adalah faktor jaringan kerja sama sehingga para pengrajin dan pedagang melakukan kerjasama untuk dapat memasarkan hasil mebel dan keduanya memperoleh untung satu sama lain. System Klaster lebih menekankan siklus kerja jaringan dan komponen-komponen didalamnya. Solusi yang dapat ditawarkan selain penciptaan jaringan klaster industri mungkin juga dibuat suatu Koperasi yang berupa koperasi barang yang memungkinkan para pengrajin kecil untuk lebih memperoleh modal cepat sebagai penciptaan industri local.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapat diketahui bahwa peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan khususnya Kota Pasuruan dalam pengembangan dan pembinaan industri kecil mebel dan kayu melalui upaya dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam rencana kerja hendaknya suatu kajian penelitian perlu dikembangkan dan dihubungkan dengan kondisi dan potensi yang ada para pelaku usaha dan pengrajin industri kecil itu sendiri secara garis besar dapat peneliti menyimpulkan :

1. Bahwa dalam melaksanakan konsep pembinaan dan pengembangan terhadap industri kecil Kota Pasuruan perlu adanya koordinasi dan kerja sama antara berbagai pihak yang berkepentingan didalamnya. Sedangkan berdasarkan konsep Klaster industri kecil. Sebagai acuan pembentukan klaster industri mebel Peran industri inti dan industri penunjang dalam proses industri klaster lebih menekankan pada pembentukan jaringan dan peran dari semua pihak.
2. Konsep Klaster dilihat sesuai dan mampu berkembang jika digunakan didalam industri mebel dan kayu di Kota Pasuruan. Hal ini didukung oleh dua faktor utama antara lain yaitu: Pertama, komitmen dari Dinas perindustrian perdagangan dan koperasi kota Pasuruan untuk pembentukan sentra industri mebel menjadi klaster industri mebel hal ini dituangkan dalam rencana strategi yang mengarah pada pembentukan konsep klaster industri. *Kedua*, faktor keadaan dan kondisi sekarang dari industri itu sendiri yang sebenarnya sudah memiliki potensi untuk pembentukan klaster industri. Diketahui bahwa kota Pasuruan sebagai kota industri menjadi Kebutuhan untuk pengembangan Sentra antara lain : Diperlukan perhatian dan pembinaan secara intensif, Perlu adanya peningkatan ketrampilan dan pengetahuan, Perlu adanya sarana dan prasarana dalam upaya memperluas kontak bisnis, Perlu adanya penetapan standar harga

penjualan untuk mengurangi persaingan yang Tidak sehat diantara unit usaha, dan Perlu adanya work shop kerja dan produksi

3. Adanya potensi yang dapat dikembangkan Dinas perindustrian dan perdagangan Potensi *Pertama*, yaitu dari segi produksi barang-barang yaitu perubahan proses produksi dari memproduksi barang mentah menjadi barang jadi yang siap pasar. Istilah lain penambahan produksi barang masyarakat khususnya para pembeli dan konsumen umumnya membeli produk kerajinan berupa barang setengah jadi atau mentahan. Untuk itu potensi penambahan produksi ini dapat menjadikan nilai tinggi bagi barang-barang yang akan pasarkan *Kedua*, yaitu dari segi pemasaran hendaknya produk-produk hasil kerajinan ini tidak hanya pulau jawa dan kalimantan juga diusahakan bagaimana bisa menembus pasar luar negeri dengan hasil akhir peningkatan pendapatan masyarakat mebel pasuruan. Potensi yang sangat besar ini hendaknya dapat dikembangkan agar menambah nilai jual produk mebel pasuruan. *Ketiga*, potensi penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak di era krisis global yang menyebabkan jumlah kuantitas pengangguran yang semakin meningkat ini dikira industri padat karya adalah salah satu jalan keluar bagi penyelesaian masalah pengangguran apabila industri ini dapat berkembang dengan baik tentu akan menciptakan penyerapan jumlah tenaga kerja yang besar. Hal ini merupakan potensi yang perlu dikembangkan.
4. Terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pengembangan adapun kendala yaitu : masih minimnya perhatian dari instansi terkait, kurangnya pengetahuan dari jaringan pasar, nilai bahan baku yang semakin mahal, persaingan antar unit usaha, dan faktor modal yang tidak seimbang atau adanya permainan para tengkulak.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dihasilkan dan disajikan peneliti telah menguraikan hasil data yang diperoleh dari pihak Disperindag dan dari pihak pengrajin sendiri. Dan dari pemaparan data yang tersaji ternyata upaya pengembangan sektor industri oleh Dinas perindustrian ini tidak lepas dari adanya kendala dan hambatan. Oleh karena itu beranjak dari temuan-temuan yang ada maka, berikut ini penulis mencoba memberikan masukan yang mungkin bisa memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan industri mebel ini antara lain

1. Hal Pertama yang dijadikan masukan oleh peneliti yaitu harus adanya kerja sama dan peran aktif dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan baik pengrajin pedagang dan juga pemerintah untuk dapat menciptakan klaster industri mebel hal ini disebabkan klaster adalah konsep yang memfokuskan adanya jaringan kerjasama dan itu dapat terlaksana karena adanya kepentingan.
2. Agar hasil pengembangan dan pembinaan yang dilaksanakan Disperindag dapat lebih mengenal maka harus ada beberapa pembenahan terutama dalam mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan apa yang benar-benar diperlukan dan dihadapi oleh para pengrajin dan pedagang dalam upaya mengembangkan usahanya.
3. Untuk permasalahan pemasaran maka perlu adanya perbaikan dari sisi intern maupun eksteren pengrajin mebel dan kayu sendiri. Sisi intern yang cara lebih meningkatkan kualitas kerajinan industri tersebut serta kaitannya dengan konsep klaster industri maka pemasaran hasil produk lebih mengarah pada adanya jaringan kerja sama antara pengrajin pedagang maupun pemerintah sebagai pemberi pelatihan dan bimbingan kepada pengusaha kecil
4. Untuk mengatasi masalah SDM menyangkut adanya keterbatasan kualitas dan kuantitas adanya faktor penghambat dalam pengembangan dan pembinaan maka fenomena tersebut perlu diperhatikan menurut penulis langkah penembahan tenaga pembina dalam bentuk tenaga konsultan

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, T.D. 1987. *Profit in Small Firms*. Gower Publising Company Ltd. Aldershot. England: Hants.
- Arikunto, Suharsimi.1993. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*. Rineka cipta
- B, Taufik 2002. *Mikroekonomi untuk kebijakan publik* : Jakarta Pustaka Petronomika.
- BPS. (1999). *Statistical Yearbook of Indonesia 1998*. Biro Pusat Statistik, Jakarta.
- Gunawan Sumodiningrat, 1998, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Penerbit, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Kuncoro, Mudrajad dan PT Asana Wirasta Setia.1997. *Pengembangan Pola Pembinaan Usaha Kecil dan Masyarakat di Sekitar Obyek dan Kawasan Pariwisata*, PT Asana Wirasta Setia dan Deparpostel, Yogyakarta.
- Kountur, Ronny. *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis* penerbit PPM
- Marbun, BN, 1996. *Manajemen Perusahaan kecil dilengkapi undang-undang tentang usaha kecil*. Jakarta : PT. Pustaka Binaman
- Moleong, Lexy. 1997. *Metodologi penelitian Kualitatif*, Bandung
- Miles, Huberman. 1992 '*Analisis data kualitatif*' UPI Jakarta
- Partomo sartika dan abdurahman soejoedono, 2002. *Ekonomi Skala kecil menengah dan koperasi*.ghalia indonesia
- PP No.32 Tahun. 1998. *Tentang pembinaan dan pengembangan industri kecil*
- PERRY, Martin. 2000. *mengembangkan usaha kecil dengan memanfaatkan berbagai bentuk jaringan kerja ekonomi*. penerjemah, tri budi Satrio Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Porter, Michel E. 1980. *tekhnik menganalisis industri dan Persaingan'* Penerjemah, Agus Maulana jakarta: Erlangga
- Sudisman, U., & Sari, A.1996. *Undang-Undang Usaha kecil 1995 dan Peraturan Perkoperasian*. Jakarta: Mitrainfo.
- Salah, Irsan Azhary 1986 'industri kecil' : Sebuah tinjauan dan Perbandingan Pengantar ; Dorojatun Kunchoro Jakti Jakarta: LP3ES
- Schmitz, H., and Nadvi, K., 1999. "*Clustering and Industrialization in Industrial Clusters in Developing Countries.*"*World Developmen* Pergamon, Oxford.
- Staley, E., and Morse
- Tambunan, T. (1999). *Perkembangan Industri Skala Kecil Di Indonesia*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Tugiman, Hiro 1995. *peranan usaha kecil dan koperasi dalam memanfaatkan sisa laba BUMN*. Bandung : PT Eresco
- Undang-Undang No 9 tahun 1995 tentang Pengembangan usaha kecil

JURNAL

- Kuncoro, M. 2002. *Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Lembaga Penelitian dan Pengembangan masyarakat; universitas sebelas maret surakarta. HTTP .petra.ac.id/ejournal/index.php/ind/article/viewPDF
- Kartasasmita, Ginanjar 1995. *Perencanaan pembangunan nasional*, Malang Universitas Brawijaya.

- Kuncoro, M. *Usaha Kecil di Indonesia Profil, Masalah dan Strategi Pemberdayaan*
- Kuncoro, M. 2008. *Pembiayaan usaha kecil*. Economic review :1-10
- Kuncoro, M. 2001. *Analisis formasi keterksitan, Pola klaster dan orientasi pasar*.
Jurnal Empirika : 1-20
- Luar negeri, kerja sama. 2008. Rencana pembinaan dan pengembangan SDM industri kecil dan menengah di Indonesia survei laporan 1-30
- Kartasmita, Ginanjar 1995. *Perencanaan pembangunan nasional*, Malang Universitas Brawijaya.

INTERNET

- Tafdil, Husni. Pengembangan Usaha Kecil Dengan Model Klaster Industri Kecil (Kasus Usaha Kecil di Provinsi Sumatera Barat)
<http://lp.unand.ac.id/?pModule=penelitian&pSub=penelitian&pAct=list>
">
- Rachmat ppkwu. 2006. *Kajian strategi pemberdayaan dan penguatan usaha kecil menengah* diakses pada tanggal 15 Maret 2009 dari <http://ppkwu.uns.ac.id/index.php>
- Rustina, Untari. 2005. "Pola Pertumbuhan Klaster Industri Kecil Indonesia" diakses pada tanggal 15 Maret 2009 dari <http://digilib.itb.ac.id>
- Lembaga Penelitian dan Pengembangan masyarakat; universitas sebelas maret surakarta. HTTP .petra.ac.id/ejournal/index.php/ind/article/viewPDF
- PP No.32 Tahun 1998 *Tentang pembinaan dan pengembangan industri kecil*
<http://www.depkop.go.id/index.php/Download-document/561-1998-32-%7C-Peraturan-Pemerintah-Nomor-32-Tahun-1998>.
- Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 *tentang Pengembangan usaha kecil* (1 of 12) diakses pada 2/3/2005 8:01:08 AM dari <http://kukm.mweb.co.id/peraturan/uu-9-1995.htm>
- Daerah, Pemerintah 2009. "Potensi Daerah" diakses pada tanggal 27 juli 2009 dari <http://pasuruan.go.id/wpcontent/uploads/2009>
- Supratikno, Hendrawan 2008. "Revitalisasi Klaster Industri" diakses pada juli 2009 dari <http://www.megawati-institute.org/sites/all/themes/megapendidikan/megaweb2>.



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Alamat : Jl. Pahlawan No. 28c Telp 0343-424019 Pasuruan

SURAT KETERANGAN
UNTUK MELAKUKAN SURVEI/RISET/PKL
NOMOR ;072/99/423.205/2009

Membaca : Surat Dari Departemen Pendidikan Nasional Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi Jl. Mayjen Haryono No. 163 Malang Nomor : /J.1071.14/PG/2009., Tanggal 24 Juni 2009, Perihal Permohonan Ijin Riset

Mengingat : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1972
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No.187/1972 Tgl 17 Juli 1972. dengan ini diijinkan untuk melakukan Survei/ Riset/ PKL oleh :

Nama : ROSIFAN ANWAR H
NIM : 0510310119
Program : Ilmu Administrasi
Program Studi : S-1 Administrasi Publik
A l a m a t : Ry. Cemorokandang No. 02 Malang
Thema Survei/Riset/PKL : **“PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL BERBASIS KLASTER INDUSTRI “ (STUDI TENTANG PENGENBANGAN INDUSTRI MEBEL DAN KAYU PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PASURUAN)**

Tempat Survei/Riset/PKL/ : 1. Dinas Perindustrian Kota Pasuruan
Lamanya Survei/Riset/PKL : dari tanggal 10 Juli s/d 10 september 2009
Peserta/ Pengikut : -
Nama Penanggungjawab : Dr. M.R. KHOIRUL MULUK, MSi.

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Survei/Riset/PKL, yang bersangkutan diwajibkan melapor/ konsultasi terlebih dahulu dengan Pimpinan Terkait.
2. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar tujuan Survei/Riset/PKL
3. Dilarang mengikut sertakan peserta lain diluar Daftar Peserta/Pengikut yang ada.
4. Mentaati ketentuan – ketentuan yang berlaku di Daerah Hukum setempat dan menjaga tata tertib dan kesopanan serta menghindari pertanyaan-pertanyaan baik lisan maupun tulisan yang dapat menyinggung perasaan, atau menghina Agama, Bangsa, dan Negara dari suatu golongan penduduk.
5. Selesai melakukan Survei/Riset/PKL hendaknya melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Walikota Pasuruan Cp. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas untuk bahan/data pengembangan Daerah.
6. Apabila pemegang Surat Keterangan ini tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian agar yang berkepentingan maklum dan pihak yang terkait memberikan bantuan seperlunya guna kelancaran.

Pasuruan, 10 Juli 2009

An.KEPALA BADAN KESBANG POL DAN
LINMAS
KOTA PASURUAN
Sekretaris



Ir. ABD. RAHM JAILANI, MM
Pembina TK. I

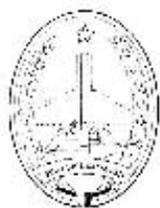
NIP. 19600620 197903 1 001

Tembusan : Disampaikan kepada Yth

1. Walikota Pasuruan (sebagai laporan)
2. DANDIM 0819 Pasuruan
3. KAPOLRESTA Pasuruan
4. Ka. Dinas Perindustrian Kota Pasuruan
5. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Brawijaya Malang
6. Yang Bersangkutan

AGENDA KERJA

PROGRAM BIDANG KOPERASI DAN UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA PASURUAN
TAHUN 2009

CURRICULUM VITAE

Nama : Rosifan Anwar H
Nomor Induk Mahasiswa : 0510310119
Tempat Tanggal lahir : Malang, 28 Juni 1986
Alamat : Ry. Cemorokandang No 02. Malang
Pendidikan :

| | |
|------------------------------|------------|
| SDN KEDUNGREJO 1 MALANG | TAHUN 1996 |
| SMP NEGERI 2 MALANG | TAHUN 2002 |
| MAN 1 MALANG | TAHUN 2005 |
| UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG | |
| FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI | TAHUN 2009 |



PEDOMAN WAWANCARA

Bagi Pemerintah Daerah

1. Sebenarnya apa tujuan dan sasaran dari pembinaan dan pengembangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan ?
2. Dalam pembinaan dan pengembangan yang berhubungan dengan Aspek Produksi langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan oleh Disperindag ?
3. Dalam pembinaan dan pengembangan yang berhubungan dengan Aspek pemasaran langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan oleh Disperindag ?
4. Dalam pembinaan dan pengembangan yang berhubungan dengan Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan Disperindag?
5. Dalam pembinaan dan pengembangan yang berhubungan dengan Aspek Teknologi langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan Disperindag?
6. Faktor apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industri ini ?

Bagi Pelaku Usaha

1. Bagaimana latar belakang keberadaan industri dan bagaimana sejarah terbantuknya sentra ini ?
2. Bagaimana kondisi para pengusaha mebel diindustri mebel ini dan bagaimana menurut bapak agar pemasaran dan jaringan pemasaran yang luas diindustri ini?
3. Bagaimana kondisi bahan baku pembuatan industri sekarang ini dan bagaimana hubungannya dengan pengrajin?
4. Faktor apa saja dengan kendala dan hambatan yang ada dalam peningkatan pengembangan industri mebel dan kayu menurut bapak ?

GAMBAR Jenis-jenis hasil kerajinan industri mebel dan kayu



(Sumber : Industri rumahan desa Ngegot Pasuruan 2008)





GAMBAR Profil UD Kramat Jati



(Sumber : Pasar Mebel Bokir Pasuruan 2008)

GAMBAR Profil Perkembangan



(Sumber : Pasar mebel Bokir Pasuruan 2008)



GAMBAR Para Pengrajin Kayu



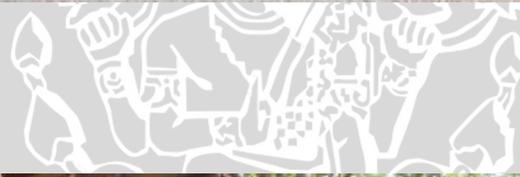
(Sumber : Industri kerajinan desa ngegot Kota Pasuruan)

GAMBAR Para Pedagang Hasil Kerajinan



(Sumber : Pasar mebel Bokir Kota Pasuruan 2008)

GAMBAR Industri Pengepul Kayu



(Sumber : Industri penggrajian kayu dinas kehutanan Kota Pasuruan)

